



PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

TAHUN 2025

#BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025.

LKjIP Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Muaradua, Maret 2026

Bupati Ogan Komering Ulu Selatan,



Abusama



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

INSPEKTORAT KABUPATEN

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Jl. Serasan Seandanan No. 20 Muaradua Kode Pos 32211

Laman : <http://inspektorat.okuselatankab.go.id>

PERNYATAAN REVIU

ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2025

Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah melakukan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja disajikan secara akurat andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, ditemukan beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti agar tidak menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinena Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2025.

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



ARDIANSYAH. SH.,CIAP
Pembina IV.a
NIP. 198109252007011011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM	2
1. Kondisi Geografis.....	2
2. Kondisi Demografis	3
3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
C. PERENCANAAN STRATEGIS	10
D. DASAR HUKUM	31
BAB II PERENCANAAN KINERJA	34
A. Perencanaan Kinerja dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026	34
1. Visi dan Misi	35
2. Arah Kebijakan	39
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	49
A. Pengukuran Kinerja	49
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	50
1. Tujuan 1 : Meningkatkan perekonomian dan pengurangan kemiskinan.....	59
2. Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	83
3. Tujuan 3 : Meningkatkan Akses Pendidikan berkualitas	99
4. Tujuan 4 : Mewujudkan derajat Kesehatan Masyarakat	106
5. Tujuan 5 : Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender	120
6. Tujuan 6 : Meningkatkan Infrastruktur daerah yang berkualitas	124
7. Tujuan 7 : Meningkatkan Investasi yang kondusif	144
BAB IV PENUTUP	157
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	157
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	159

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Peta Administrasi Kabupaten OKU Selatan	43
Gambar II.1	Visi	61
Gambar II.2	Misi Pembangunan	62
Gambar III.1	Perbandingan Nilai NTP Tahun 2025	67
Gambar III.2	Perbandingan Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	68
Gambar III.3	Perbandingan Jumlah Koperasi Aktif	72
Gambar III.4	Perbandingan Realisasi PDRB Perdagangan	73
Gambar III.5	Perbandingan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	74
Gambar III.6	Perbandingan Jumlah Koperasi Aktif	75
Gambar III.7	Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2022 – 2025	80
Gambar III.8	Perbandingan Capaian Tingkat Nasional	81
Gambar III.9	Nilai SAKIP Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023-2026	86
Gambar III.10	Nilai SAKIP Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	88
Gambar III.11	Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat	94
Gambar III.12	Perbandingan Skor SPIP Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan ..	98
Gambar III.13	Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP dan SMA antara Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan	103
Gambar III.14	Program Penunjang Penurunan Stunting	113
Gambar III.15	Kegiatan Pelayanan KB Gratis	115
Gambar III.16	Pelaksanaan Program Perbaikan Tidak Layak huni	129
Gambar III.17	Nilai tingkat pengangguran terbuka antara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan	151

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025	2
Tabel I.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Semester I 2025	4
Tabel I.3	Nama Perangkat Daerah	5
Tabel I.4	Data Jumlah ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan	8
Tabel I.5	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kaupaten OKU Selatan Tahun 2022-2026	11
Tabel I.6	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2022-2026	20
Tabel I.7	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026	21
Tabel II.1	Arah Kebijakan	40
Tabel II.2	Perjanjian Kinerja	44
Tabel III.1	Skala Pengukuran Kinerja	50
Tabel III.2	Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021 – 2025	51
Tabel III.3	Capaian Tujuan 1 Meningkatkan Perekonomian dan Pengurangan kemiskinan	59
Tabel III.4	Capain sasaran 1.1 “Meningkatnya Pariwisata Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi”	60
Tabel III.5	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025	60
Tabel III.6	Capaian Kinerja Sasaran Sektor Pariwisata	63
Tabel III.7	Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tahun 2025	64
Tabel III.8	Capaian Sasaran Kesejahteraan Petani Tahun 2021 – 2025	65
Tabel III.9	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Petani	69

Tabel III.10	Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tahun 2025	70
Tabel III.11	Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tahun 2021- 2025	71
Tabel III.12	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Industri dan Perdagangan	75
Tabel III.13	Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2025	76
Tabel III.14	Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tahun 2021- 2025	77
Tabel III.15	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.	78
Tabel III.16	Capaian sasaran 5 “Meningkatnya ketahanan pangan”	79
Tabel III.17	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025	79
Tabel III.18	Skor PPH	81
Tabel III.19	Tingkat Ketahanan Pangan	82
Tabel III.20	Capaian Tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan”	83
Tabel III.21	Capaian Sasaran “ Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas”	84
Tabel III.22	Perbandingan Realisasi Dan Capaian Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Tahun 2021 – 2025.....	85
Tabel III.23	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Transparansi Dan Akuntabilitas.	89
Tabel III.24	Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik	90
Tabel III.25	perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 -2025	91
Tabel III.26	Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik	95
Tabel III.27	Capaian sasaran 3 “ Meningkatkan Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah”	96
Tabel III.28	Perbandingan Realisasi Dan Capaian Tahun 2021-2025	96
Tabel III.29	Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya	98
Tabel III.30	Capaian Tujuan “ Meningkatkan akses pendidikan berkualitas” ..	99

Tabel III.31	Perbandingan Realisasi Dan Capaian Tahun 2021 -2025	100
Tabel III.32	Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran Mewujudkan Meningkatkan akses pendidikan berkualitas	105
Tabel III.33	Capaian Tujuan " Mewujudkan derajat kesehatan Masyarakat" ..	106
Tabel III.34	Capain tujuan " Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat" ..	107
Tabel III.35	Perbandingan Realisasi Dan Capaian Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	109
Tabel III.36	Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat	116
Tabel III.37	Capain tujuan " Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga"	118
Tabel III.38	Perbandingan Realisasi Dan Capaian Meningkatnya Prestasi Pemuda Dan Olahraga	118
Tabel III.39	Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat	120
Tabel III.40	Capaian Tujuan " Meningkatkan kesetaraan dan Keadilan Gender"	121
Tabel III.41	Capaian Sasaran Meningkatnya pembangunan gender dan perlindungan anak	122
Tabel III.42	perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021-2025	123
Tabel III.43	Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya	124
Tabel III.44	Capaian Tujuan " Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas"	125
Tabel III.45	Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas	126
Tabel III.46	Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021-2025	128
Tabel III.47	Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya	131
Tabel III.48	Capaian Kinerja Sasaran 6.2 Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	132
Tabel III.49	Capaian Sasaran Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana Tahun 2021- 2025	133
Tabel III.50	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	134
Tabel III.51	Capaian Kinerja Sasaran 6.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	135
Tabel III.52	Capaian Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup	136

	Tahun 2021- 2025	
Tabel III.53	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	138
Tabel III.54	Capaian Kinerja Sasaran 6.4 Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	139
Tabel III.55	Capaian Sasaran Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021- 2025	140
Tabel III.56	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	141
Tabel III.57	Capaian Kinerja Sasaran 6.5 Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	142
Tabel III.58	Capaian Sasaran Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW Tahun 2021- 2025	143
Tabel III.59	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	144
Tabel III.60	Capaian Tujuan " Meningkatkan investasi yang kondusif"	144
Tabel III.61	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Invesatasi	145
Tabel III.62	Capaian indikator kinerja jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) selama periode 2021–2025	146
Tabel III.63	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya investasi	148
Tabel III.64	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja ..	149
Tabel III.65	Capaian indikator kinerja Tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama periode 2021–2025	149
Tabel III.66	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	152
Tabel III.67	capaian kinerja sasaran Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	153
Tabel III.68	Capaian angka kriminalitas dan IPOLEKSOSBUD 5 tahun terakhir dari Tahun 2021-2025	154
Tabel III.69	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	155
Tabel IV.1	Presentase Capaian Kinerja, Anggaran dan Tingkat Efisiensi Per Sasaran Strategis	157

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas tujuan dan sasaran- sasaran strategisnya. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2021 – 2026 menuju “OKU SELATAN BERSINAR”.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Tahun 2025 secara keseluruhan berhasil. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 20 Sasaran yang masuk dalam 7 Tujuan. Secara umum, kinerja pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menunjukkan hasil yang positif, karena sebagian besar sasaran strategis berada pada kategori Sangat Baik dan Baik, yaitu sebanyak 15 sasaran atau sekitar 75% dari total sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat 2 sasaran dengan kategori Cukup dan 3 sasaran dengan kategori Kurang yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2025 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 85% dengan katagori Baik.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 “Dapat Dipenuhi Sesuai Harapan”. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa guna mencapai “Terwujudnya Ogan Komering Ulu Selatan yang Berkembangnya Ekonomi Rakyat melalui Sinergita pembangunan INfrastruktur yang Aspiratif dan Responsif”.



PENDAHULUAN

BAB

I



ABUSAMA, SH
BUPATI OKU SELATAN



H. MISNADI
WAKIL BUPATI OKU SELATAN



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan. Penyusunan LKjIP dilaksanakan sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. LKjIP disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

Penyusunan LKjIP Kabupaten Tahun 2025 dilakukan untuk memberikan gambaran capaian kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah, sekaligus sebagai alat evaluasi dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun berikutnya. Melalui laporan ini, diharapkan dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis, efektivitas penggunaan anggaran, serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pencapaian target kinerja.

Selain sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, LKjIP juga menjadi instrumen manajemen kinerja yang mendorong peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan demikian, penyusunan LKjIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten.

B. GAMBARAN UMUM

1. Kondisi Geografis

Berdasarkan perda RTRW Kabupaten OKU Selatan 2021-2040 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Ibukotanya Muaradua merupakan salah satu Kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir.

Adapun secara administrasi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu; dan
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Tabel I.1
Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025

Kode	Kecamatan	Luas (ha)	%	Kelurahan	Desa
16.09.01	Muaradua	13,937	3.20	5	9
16.09.02	Pulau Beringin	21,611	4.90	-	13
16.09.03	Banding Agung	21,272	4.90	1	21
16.09.04	Muaradua Kisam	20,523	4.70	-	18
16.09.05	Simpang	10,777	2.50	-	7
16.09.06	Buay Sandang Aji	31,273	7.10	-	16
16.09.07	Buay Runjung	8,108	1.90	-	14
16.09.08	Mekakau Ilir	27,485	6.30	-	15
16.09.09	Buay Pemaca	63,874	14.60	-	22
16.09.10	Kisam Tinggi	39,097	8.90	-	19
16.09.11	Kisam Ilir	7,748	1.80	-	9
16.09.12	BPR Ranau Tengah	20,337	4.60	1	21
16.09.13	Warkuk Ranau Selatan	24,128	5.50	-	16
16.09.14	Runjung Agung	16,954	3.90	-	9
16.09.15	Sungai Are	18,339	4.20	-	9
16.09.16	Sindang Danau	24,057	5.50	-	7
16.09.17	Buana Pemaca	19,418	4.40	-	8
16.09.18	Tiga Dihaji	28,482	6.50	-	8
16.09.19	Buay Rawan	20,266	4.60	-	11
Jumlah		437,687	100.00	7	252

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terdiri dari 19 kecamatan, 7 Kelurahan dan 252 desa, dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Buay Pemaca dengan luas wilayah ± 63.874 Hektar atau 14,6 % dari total luas wilayah kabupaten dan untuk luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Kisam Ilir dengan luas ± 7.748 Hektar atau 1,8 % dari luas total wilayah Kabupaten Luas dan jumlah wilayah administrasi tiap Kecamatan dapat dilihat pada Peta dibawah ini

Gambar 1.1

Peta Administrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan



sumber: Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040

2. Kondisi Demografis

Jumlah Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025 Pada Tahun 2025, Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebanyak 408.280 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk perkecamatan adalah 74,31%. Berdasarkan data agregat Kependudukan perkecamatan sampai dengan akhir bulan Desember 2025 mencapai 408.280 jiwa, dengan komposisi laki-laki sebanyak **211.787** jiwa dan perempuan sebanyak **196.493** jiwa yang tersebar di 19 wilayah kecamatan, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel I.2
Jumlah Penduduk
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Semeter I 2025

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		JUMLAH PENDUDUK
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Muaradua	25,964	24,817	50,781
2.	Pulau Beringin	15,501	14,677	30,178
3.	Banding Agung	13,547	12,791	26,338
4.	Muaradua Kisam	10,393	9,464	19,857
5.	Simpang	9,768	9,106	18,874
6.	Buay Sandang Aji	10,927	9,950	20,877
7.	Buay Runjung	6,472	5,955	12,427
8.	Mekakau Ilir	12,536	11,511	24,047
9.	Buay Pemaca	23,124	21,218	44,342
10.	Kisam Tinggi	9,815	8,892	18,707
11.	Kisam Ilir	4,211	3,869	8,080
12.	BPR. Ranau Tengah	13,469	12,461	25,930
13.	Warkuk Ranau Selatan	12,562	11,707	24,269
14.	Runjung Agung	6,796	6,170	12,966
15.	Sungai Are	6,114	5,550	11,664
16.	Sindang Danau	6,003	5,592	11,595
17.	Buana Pemaca	8,836	8,114	16,950
18.	Tiga Dihaji	5,293	4,825	10,118
19.	Buay Rawan	10,456	9,824	20,280
Total		211,787	196,493	408,280

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Susunan perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terdiri dari :

Tabel I.3
Nama Perangkat Daerah

NO.	PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH	
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
2	Bagian Hukum
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4	Bagian Administrasi Pembangunan
5	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
6	Bagian Perencanaan dan Keuangan
7	Bagian Organisasi
8	Bagian Umum
9	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
10	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
SEKRETARIAT DPRD	
1	Sekretariat DPRD
INSPEKTORAT	
1	Inspektorat Kabupaten
DINAS	
1	Dinas Pendidikan

NO.	PERANGKAT DAERAH
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Sosial
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
6	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Dinas Ketahanan Pangan
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
12	Dinas Lingkungan Hidup
13	Dinas Perikanan
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
15	Dinas Perhubungan
16	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21	Dinas Pertanian
22	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
BADAN	

NO.	PERANGKAT DAERAH
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3	Badan Pendapatan Daerah
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KECAMATAN	
1	Kecamatan Muaradua
2	Kecamatan Simpang
3	Kecamatan Buay Sandang Aji
4	Kecamatan Buay Runjung
5	Kecamatan Buay Pemaca
6	Kecamatan Muaradua Kisam
7	Kecamatan Kisam Tinggi
8	Kecamatan Pulau Beringin
9	Kecamatan Banding Agung
10	Kecamatan Mekakau Ilir
11	Kecamatan Runjung Agung
12	Kecamatan Sungai Are
13	Kecamatan Sindang Danau
14	Kecamatan Kisam Ilir
15	Kecamatan Warkuk Ranau Selatan

NO.	PERANGKAT DAERAH
16	Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah
17	Kecamatan Tiga Dihaji
18	Kecamatan Buana Pemaca
19	Kecamatan Buay Rawan
KELURAHAN	
1	Kelurahan Pasar Muaradua
2	Kelurahan Pancur Pungah
3	Kelurahan Kisau
4	Kelurahan Bumi Agung
5	Kelurahan Batu Belang Jaya
6	Kelurahan Bandar Agung
7	Kelurahan Simpang Sender

Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2025 mencapai 5.919 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.4
DATA JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

No	OPD	PNS	PPPK	Jml
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	39	7	46
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20		20
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22	4	26
4	Badan Pendapatan Daerah	39	5	44
5	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	40		40
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	44		44
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	36		36
8	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	23		23
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	31	7	38
10	Dinas Kesehatan	547	320	867

11	Dinas Ketahanan Pangan	19		19
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	23	1	24
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	41		41
14	Dinas Lingkungan Hidup	33		33
15	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	80	14	94
16	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	29	7	36
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	26	2	28
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	31	2	33
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25	3	28
20	Dinas Pendidikan	1905	1151	3056
21	Dinas Perhubungan	57		57
22	Dinas Perikanan	32	3	35
23	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	29		29
24	Dinas Pertanian	98	29	127
25	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	41	3	44
26	Dinas Sosial	31	3	34
27	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	33	2	35
28	Inspektorat	61	6	67
29	Kecamatan Banding Agung	31		31
30	Kecamatan Buana Pemaca	20		20
31	Kecamatan Buay Pemaca	23		23
32	Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah	40		40
33	Kecamatan Buay Rawan	20		20
34	Kecamatan Buay Runjung	41		41
35	Kecamatan Buay Sandang Aji	41		41
36	Kecamatan Kisam Ilir	15		15
37	Kecamatan Kisam Tinggi	31		31
38	Kecamatan Mekakau Ilir	26		26
39	Kecamatan Muaradua	21		21
40	Kecamatan Muaradua Kisam	33		33
41	Kecamatan Pulau Beringin	15		15
42	Kecamatan Runjung Agung	21		21
43	Kecamatan Simpang	29		29
44	Kecamatan Sindang Danau	14		14
45	Kecamatan Sungai Are	13		13
46	Kecamatan Tiga Dihaji	21		21
47	Kecamatan Warkuk Ranau Selatan	34		34
48	Kelurahan Bandar Agung	13		13
49	Kelurahan Batu Belang Jaya	11		11
50	Kelurahan Bumi Agung	12		12
51	Kelurahan Kisau	11		11
52	Kelurahan Pancur Pungah	8		8
53	Kelurahan Pasar Muaradua	12		12
54	Kelurahan Simpang Sender	14		14
55	Rumah Sakit Umum Daerah	131		131
56	Satuan Polisi Pamong Praja	44		44
57	Sekretariat Daerah	109	14	123
58	Sekretariat DPRD	47		47
Total		4336	1583	5919

Sumber: BKPSDM 2025

Jika dilihat dari Tabel I.23 penyebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2025 mengalami Penurunan jumlah dari Tahun sebelumnya.

C. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2021–2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2021-2026, ditetapkan Visi sebagai berikut :

“OKU SELATAN BERSINAR”

(**B**erkembangnya **E**konomi **R**akyat melalui **S**inergitas pembangunan **I**nfrastruktur yang **A**spiratif dan **R**esponsif)

Pernyataan Visi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 memiliki makna: Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat menerangi dan memberikan cahaya serta harapan besar bagi masyarakat dalam setiap gerak pembangunan yang aspiratif dan responsif untuk masa depan cerah.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki strategi, arah kebijakan dan program pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2040, serta arahan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan. Arahan tersebut menuntun Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada prioritas pembangunan daerah sekaligus strategi terhadap penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan diuraikan sebagai beriku

Tabel I.5
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi: OKU Selatan Bersinar			
Misi 1: Mengembangkan ekonomi rakyat berbasis agro wisata, jasa dan sumber daya alam			
1. Meningkatkan perekonomian dan pengurangan kemiskinan			
	1.1. Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi	1.1.1. Meningkatkan daya saing pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif b. Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital
	1.2. Meningkatnya kesejahteraan petani	1.2.1. Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia b. Pengembangan kawasan klaster pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
	1.3. Meningkatnya peran industri dan perdagangan	1.3.1. Meningkatkan daya saing industri	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan daya saing produk industri kecil dan menengah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia industri kecil dan menengah c. Memfasilitasi standarisasi produk industri kecil dan menengah
		1.3.2. Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional b. Menciptakan iklim usaha yang berdaya saing
1.4. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	1.4.1. Mempercepat penanggulangan kemiskinan		<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin b. Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin c. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
1.5. Meningkatnya ketahanan pangan	1.5.1. Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan		<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam

Misi 2: Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan			
	2.1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas	2.1.1. Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government b. Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika
		2.1.2. Meningkatkan kerjasama Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar tingkat pemerintahan
	2.2. Meningkatnya pelayanan public	2.2.1. Menciptakan pelayanan publik yang terpadu, cepat, mudah dan inklusif	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan di fasilitas pelayanan public b. Mendorong pengutamakan kepentingan publik oleh pelayanan publik dengan pelayanan birokrasi yang berbasis information and technology (IT) c. Revitalisasi sarana, prasarana dan infrastruktur pelayanan public d. Menempatkan petugas pelayanan yang kompeten (<i>right man in the right place</i>) dan menciptakan perilaku pelaksana/petugas dengan memberikan pelayanan secara sopan, ramah serta saling menghargai dan menghormati

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2.2.2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan b. Peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) c. Peningkatan pengelolaan satu data pembangunan
		2.2.3. Peningkatan publikasi hasil litbang dan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Riset berbasis kebutuhan b. Meningkatkan kualitas SDM peneliti c. Melakukan koordinasi dengan pembuat kebijakan dan pelaku bisnis d. Meningkatkan fungsi intermedator teknologi e. Inventarisasi permasalahan yang membutuhkan litbang dan inovasi
2.3. Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah	2.3.1. Meningkatkan integritas ASN		<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas Aparatur Pemerintah di semua bidang b. Mengoptimalkan pengawasan melekat c. Mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan menuju pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) d. Meningkatkan tunjangan ASN berbasis kinerja e.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas	3.1. Meningkatnya akses pendidikan berkualitas	3.1.1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah b. Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan c. Meningkatkan minat baca masyarakat
	4. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat	4.1. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	4.1.1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat/masyarakat miskin
4.1.2. Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan terutama tenaga medis dan para medis			<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan program beasiswa dokter spesialis dan sertifikasi tenaga medis lainnya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4.1.3. Menjamin kecukupan ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan hingga pelosok daerah	a. Melakukan seleksi penerimaan CPNS tenaga kesehatan Daerah sesuai dengan kebutuhan b. Distribusi tenaga kesehatan secara proporsional pada wilayah ibu kota kabupaten/kecamatan/kelurahan/desa dan kontrak kerja bersedia untuk ditempatkan di seluruh pelosok daerah
	4.2. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	4.2.1. Meningkatkan peran stakeholder dalam pembangunan kepemudaan dan olahraga	c. Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif d. Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat e. Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga
5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	5.1. Meningkatnya pembangunan gender dan perlindungan anak	5.1.1. Menguatkan peran keluarga dan kesetaraan gender 5.1.2. Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan hak anak (PUHA)	a. Meningkatkan ketahanan keluarga serta peran dan perlindungan perempuan dan anak a. Penguatan kelembagaan KLA b. Pelaksanaan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator KLA

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> c. Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan d. Peningkatan Ketersediaan, dan Pemanfaatan data anak pada sistem informasi gender dan anak (SIGA)
Misi 3: Meningkatkan kondisi infrastruktur yang baik			
6. Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas			
	6.1. Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas	6.1.1. Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik b. Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat
		6.1.2. Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan lingkungan permukiman sehat b. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
		6.1.3. Meningkatkan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kelestarian dan perlindungan terhadap Sumber Daya Air

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> b. Meningkatkan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian c. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi secara partisipatif
		6.1.4. Meningkatkan akses layanan listrik yang memenuhi standar	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan jangkauan pelayanan listrik untuk kepentingan aktivitas ekonomi, pelayanan publik dan rumah tangga hingga ke pelosok
6.2. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	6.2.1. Mengurangi risiko bencana		<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana
6.3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	6.3.1. Menjaga kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas air dan kualitas udara		<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas air dan udara b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
	6.3.2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman		<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pengelolaan limbah domestik b. Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman c. Meningkatkan tertib tata kelola pertanahan
6.4. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	6.4.1. Mempercepat pembangunan Desa		<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat infrastruktur dasar Desa dan kawasan perdesaan b. Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan c. Memperkuat Pemerintahan Desa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	6.5. Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	6.5.1. Melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah secara konsisten	a. Mengkoordinasikan kebijakan pengendalian dan pemanfaatan ruang
Misi 4: Menciptakan kondisi investasi yang kondusif			
7. Meningkatkan investasi yang kondusif			
	7.1. Meningkatnya investasi	7.1.1. Meningkatkan investasi daerah	a. Meningkatkan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar
	7.2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja	7.2.1. Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha	a. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar b. Mengembangkan inkubator bisnis
	7.3. Meningkatnya keamanan dan ketertiban	7.3.1. Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat	a. Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda

Berdasarkan hasil perumusan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau tema tahunan pada periode tahun 2022-2026, antara lain sebagai berikut:

Tabel I.6
Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022-2026

Arah Kebijakan				
2022	2023	2024	2025	2026
Optimalisasi pertumbuhan ekonomi regional	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi kerakyatan, kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik yang prima, bersih, bebas KKN	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	OKU Selatan Bersinar

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah, sebagai berikut :

Tabel I.7
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026
Visi: OKU Selatan Bersinar

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran					Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Terkait	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Misi 1: Mengembangkan ekonomi rakyat berbasis agro wisata, jasa dan sumber daya alam	1. Meningkatkan perekonomian dan pengurangan kemiskinan		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	0.37	4.42	4.45	5.00	5.33	5.67	6.04	6.04			
			Pendapatan per kapita	Juta Rp	24.59	30.93	32.26	33.65	35.09	36.60	38.18	38.18			
		1.1.	Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi	PAD sektor pariwisata	Persen	0.27	0.46	0.78	1.34	2.28	3.88	6.61	6.61	Dinas Parbud	
		1.2.	Meningkatnya kesejahteraan petani	Kontribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	Persen	31.09	31.32	31.56	31.79	32.03	32.27	32.52	32.52	Dinas Pertanian/ Diskanak	
			Nilai tukar petani (NTP)	Persen	104	105	106	107	108	109	110	110	Dinas Pertanian		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian indikator Tujuan dan Sasaran							Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Terkait
					Kondisi Awal		Sasaran							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
			Produksi perikanan	Persen	29.50	32.59	36.01	39.79	43.97	48.58	53.67	53.67	Diskanak	
	1.3. Meningkatkan peran industri dan perdagangan		Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda terhadap PDRB	Persen	22.50	22.81	23.12	23.44	23.77	24.09	24.42	24.42	Dinas, Koperasi, UKM, Perindag	
			Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	7.94	8.14	8.34	8.55	8.76	8.98	9.21	9.21	Dinas, Koperasi, UKM, Perindag	
			Persentase koperasi aktif	Persen	18.33	22.45	25.95	27.91	30.00	32.26	34.69	34.69	Dinas, Koperasi, UKM, Perindag	
	1.4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Persentase Penduduk Miskin	Persen	10.85	9.02	9.00	8.97	8.74	8.51	8.29	8.29	Seluruh PD	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian indikator Tujuan dan Sasaran					Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Terkait
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		1.5. Meningkatkan ketahanan pangan	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	Skor	83.60	85.50	86.50	87.00	87.75	88.50	89.50	89.50	Dinas Ketahanan Pangan	- Dinkes, - Dinas PUPR - Dinas Perkim - DLH - Dinas PPKBP3 A - Dinas Pertanian
Misi 2: Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan		Indeks reformasi birokrasi	Indeks	N.A	B	B	B	BB	BB	A	A		
		2.1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	Nilai SAKIP	Skor	B	B	B	BB	BB	BB	A	A	Bagian Organisasi Setda	Seluruh PD
			Indeks kualitas perencanaan		N.A	B	B	B	B	B	A	A	Bappeda Litbang	Seluruh PD
			Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD	Seluruh PD
		2.2. Meningkatkan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	N.A	N.A	70.20	70.30	70.40	7.50	70.60	70.60	Bagian Organisasi Setda	Seluruh PD

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian indikator Tujuan dan Sasaran							Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Terkait
					Kondisi Awal		Sasaran							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
			Skor indeks inovasi daerah	Skor	358	550	700	1000	1200	1350	1550	1550	Bappeda Litbang	Seluruh PD
	2.3. Meningkatkan Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah		Skor maturitas SPIP	Skor	2.45	3.00	3.10	3.10	3.20	3.30	3.30	3.30	Inspektorat Kabupaten	Seluruh PD
3.	Meningkatkan akses pendidikan berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	65.30	67.01	67.23	67.67	68.30	68.94	69.58	69.58		
			Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7.84	8.02	8.21	8.40	8.59	8.79	9.00	9.00		
			Angka harapan lama sekolah	Tahun	11.75	11.79	11.84	11.88	11.92	11.97	12.01	12.01		
	3.1. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas		APM SD/MI	Persen	99.00	99.04	99.08	99.12	99.16	99.20	99.24	99.24	Dinas Pendidikan	DPK
			APM SMP/MTs	Persen	78.68	78.70	78.72	78.74	78.76	78.78	78.80	78.80	Dinas Pendidikan	DPK
			APM SMA/SMK/MA	Persen	61.83	62.00	62.50	62.80	63.00	63.20	63.50	63.50	Dinas Pendidikan	DPK
			Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	47.62	51.10	54.83	58.83	63.12	67.73	72.68	72.68	Dinas Pendidikan	DPK

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian indikator Tujuan dan Sasaran					Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Terkait
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
			Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat	Nilai	N.A	N.A	47.50	49.50	51.50	53.50	56.50	56.50	DPK	Dinas Pendidikan
	4. Mewujudkan derajat kesehatan Masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	65.30	67.01	67.23	67.67	68.30	68.94	69.58	69.58		
			Angka usia harapan hidup	Tahun	67.04	67.48	67.93	68.38	68.83	69.29	69.75	69.75		
	4.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Angka Kesakitan	Persen	17.46	16.39	15.39	14.46	13.57	12.75	11.97	11.97	Dinas Kesehatan	RSUD Muaradua
			Angka kematian bayi		46	40	35	30	25	20	15	15	Dinas Kesehatan	RSUD Muaradua
			Angka kematian ibu		5	4	3	2	1	1	0	0	Dinas Kesehatan	RSUD Muaradua
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Persen	24	22	20	18	14	12	10	10	Dinas Kesehatan	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian indikator Tujuan dan Sasaran							Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Terkait
					Kondisi Awal		Sasaran							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
			Kategori kabupaten/kota sehat (KKS)		-	-	-	Padapa	-	Wistara	-	Wistara	Dinas Kesehatan	
			Cakupan peserta KB aktif	Persen	69.03	69.41	69.79	70.18	70.56	70.95	71.34	71.34	Dinas PPKBP3A	Dinas Kesehatan
	4.2.	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Peringkat pada porprov	Peringkat	-	3	-	3	-	3	-	3	Diskepora	Seluruh PD
5.	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender		Indeks pembangunan gender (IPG)	Indeks	92.62	93.10	93.34	93.59	93.83	94.08	94.33	94.33		
			Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Indeks	55.33	55.87	55.96	56.06	56.14	56.15	56.35	56.35		
	5.1.	Meningkatnya pembangunan gender dan perlindungan anak	Kategori kabupaten layak anak (KLA)		-	Pratama	Madya	Nindya	Nindya	Utama	KLA	KLA	Dinas PPKBP3A	Seluruh PD

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian indikator Tujuan dan Sasaran					Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Terkait
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Misi 3: Meningkatkan kondisi infrastruktur yang baik	6. Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas		Rata-rata waktu lempuh jalan Kabupaten	Km/jam	N.A	28	30	35	40	40	45	45		
			Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak	Persen	54.82	59.08	63.67	68.62	73.95	79.69	85.88	85.88		
			Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	67.25	68.22	69.47	70.72	71.97	73.22	74.47	74.47		
			6.1. Meningkatkan akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	53.37	57.59	62.14	67.04	72.34	78.06	84.22	84.22	Dinas PUPR
	Persentase rumah layak huni	Persen	77.13	77.32	77.52	77.71	77.91	78.10	78.30	78.30	Dinas Perkim			
	Persentase penduduk	Persen	83.26	85.13	87.04	88.99	90.98	93.02	95.11	95.11	Dinas PUPR			

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian indikator Tujuan dan Sasaran					Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Terkait
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
			berakses air minum											
			Rasio Elektrifikasi	Persen	67.62	70.98	74.52	78.22	82.11	86.20	90.49	90.49	Dinas Perkim	
			Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	49.80	52.65	55.66	58.84	62.21	65.77	69.53	69.53	Diskominfo	
6.2.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Respon Cepat Darurat Bencana	Persen	36.11	42.38	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	BPBD	
6.3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Indeks	N.A	52.60	52.70	52.80	52.90	53.00	53.10	53.10	53.10	DLH	
		Indeks kualitas udara	Indeks	N.A	92.62	92.72	92.82	92.92	93.02	93.12	93.12	93.12	DLH	
		Indeks kualitas lahan	Indeks	N.A	41.85	43.94	46.03	48.12	50.21	52.30	52.30	52.30	DLH	
6.4.	Meningkatnya pembangunan	Persentase desa tertinggal dan	Persen	61.11	60.35	59.59	58.85	58.11	57.38	56.67	56.67	56.67	Dinas PMPD	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian indikator Tujuan dan Sasaran					Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Terkait
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		an dan pemberdayaan masyarakat Desa	desa sangat tertinggal											
		6.5. Meningkatkan ketepatan terhadap RTRW	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Rasio	50.72	50.72	54.00	58.00	62.00	66.00	70.00	70.00	Dinas PUPR	
Misi 4: Menciptakan kondisi investasi yang kondusif	7. Meningkatkan investasi yang kondusif		Nilai investasi	Rupiah	906.9 milyar	1.0 triliun	1.5 triliun	2.5 triliun	3.5 triliun	4.5 triliun	5.5 triliun	5.5 triliun		
		7.1. Meningkatkan investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	11	11	14	16	18	22	26	26	Dinas PMPTSP	Seluruh PD
		7.2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	3.28	2.29	2.24	2.19	2.14	2.09	2.04	2.04	Dinas Nakertrans	- Dinas Koperasi UKM, Perindag - Diskepora - Diskanak - Disparbud

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian indikator Tujuan dan Sasaran					Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Terkait
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		7.3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban	Angka kriminalitas		0.48	0.37	0.29	0.22	0.17	0.13	0.10	0.10	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Seluruh PD - Dinas Pertanian
			Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD	Konflik	5	5	4	0	0	0	0	0	Badan Kesbangpol	Seluruh PD

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025 didasarkan atas :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025 Nomor 16);
21. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 Nomor 42);



PERENCANAAN KINERJA

BAB II



ABUSAMA, SH
BUPATI OKU SELATAN



H. MISNADI
WAKIL BUPATI OKU SELATAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026

Guna memberikan arah dan fokus pembangunan secara berkelanjutan, dibutuhkan suatu proses perumusan kebijakan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya seefektif dan seefisien mungkin melalui sebuah perencanaan pembangunan. Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan. Implementasi pasal tersebut, tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Lebih lanjut, dalam pasal 3 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Tujuan ini selaras dengan tujuan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yakni untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarfungsi Pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, serta pengoptimalan partisipasi masyarakat dalam rangka menjamin tercapainya

penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Pada tanggal 9 Desember 2020 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021- 2025.

Berdasarkan hasil pilkada, maka ditetapkan pasangan Popo Ali Martopo, B. Commerce sebagai Bupati dan Sholehien Abuasir, S.P.,M.Si sebagai Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Periode 2021-2025 serta telah dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. Sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana disebutkan dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

- a. Pendekatan politik, dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- b. Pendekatan teknokratik, di mana proses penyusunan RPJMD melalui metode dan kerangka berpikir ilmiah guna memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pendekatan partisipatif, di mana penyusunan RPJMD telah melibatkan semua pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan tingkat relevansi, kesetaraan dan keterbukaan. Sehingga tercipta konsensus pada semua tahapan pengambilan keputusan, seperti perumusan isu strategis dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.
- d. Pendekatan *bottom up dan top down*, di mana perencanaan dilakukan sesuai jenjang pemerintahan yang selanjutnya diselaraskan melalui musyawarah baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering

Ulu Selatan tahun 2021-2026 merupakan RPJMD Keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Okan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025.

1. Visi dan Misi

Dalam RPJMD Kabupaten Okan Komering Ulu Selatan tahun 2021–2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Okan Komering Ulu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Okan Komering Ulu Selatan 2021–2026, ditetapkan Visi sebagai berikut :

“OKU SELATAN BERSINAR”

(Berkembangnya Ekonomi Rakyat melalui Sinergitas pembangunan Infrastruktur yang Aspiratif dan Responsif)

Pernyataan Visi Kabupaten Okan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 memiliki makna: Pemerintah Kabupaten Okan Komering Ulu Selatan dapat menerangi dan memberikan cahaya serta harapan besar bagi masyarakat dalam setiap gerak. pembangunan yang aspiratif dan responsif untuk masa depan cerah. Penjelasan visi pembangunan Okan Komering Ulu Selatan tahun 2021-2026 adalah, sebagai berikut:

Gambar 2.1

Visi



Sumber : RPJMD 2025

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, Misi Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026, yaitu:

Gambar 2.2
Misi Pembangunan

Misi 1

- Mengembangkan ekonomi rakyat berbasis agro wisata, jasa dan sumber daya alam:

Misi 2

- Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat;

Misi 3

- Meningkatkan kondisi infrastruktur yang baik;

Misi 4

- Menciptakan kondisi investasi yang kondusif.

Sumber : RPJMD 2025

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah, sebagai berikut :

- Misi Kesatu** : **“Mengembangkan ekonomi rakyat berbasis agro wisata, jasa dan sumber daya alam”**
- Tujuan Kesatu : Meningkatkan perekonomian dan pengurangan kemiskinan Sasaran
- Sasaran : 1.1. Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi
1.2. Meningkatnya kesejahteraan petani
1.3. Meningkatnya peran industri dan perdagangan
1.4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

1.5. Meningkatnya ketahanan pangan

Misi Kedua : “Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat”

Tujuan Kedua : Meningkatkan tata kelola pemerintahan

Sasaran : 2.1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas
2.2. Meningkatnya pelayanan public
2.3. Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur Pemerintah Daerah

Tujuan Ketiga : Meningkatkan akses pendidikan berkualitas

Sasaran : 3.1. Meningkatnya akses pendidikan berkualitas

Tujuan Keempat : Mewujudkan derajat kesehatan Masyarakat

Sasaran : 4.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
4.2. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga

Tujuan Kelima : Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender

Sasaran : 5.1. Meningkatnya pembangunan gender dan perlindungan anak

Misi Ketiga : “Meningkatkan kondisi infrastruktur yang baik”

Tujuan Keenam : Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas

Sasaran : 6.1. Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas
6.2. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
6.3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
6.4. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
6.5. Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW

Misi Keempat : “Menciptakan kondisi investasi yang kondusif”

Tujuan Keenam : 7.1. Meningkatnya investasi

Sasaran : 7.2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja

7.3. Meningkatnya keamanan dan ketertiban

2. Arah Kebijakan

Perumusan arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang ditetapkan agar fokus untuk mencapai apa yang diinginkan pada akhir tahun

perencanaan. Berdasarkan hubungan antara tujuan, sasaran dan strategi yang telah diuraikan di atas, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 yang disajikan pada Tabel II. berikut :

Tabel II.1
Arah Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Misi	Arah Kebijakan	Ket.
1.	Membangun perekonomian yang tangguh melalui peningkatan sektor pertanian, perkebunan, penguatan industri dan UMKM kreatif dan inovatif untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pengembangan energi terbarukan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. • Mengembangkan ekosistem digital untuk UMKM dan meningkatkan keamanan siber, serta inovasi digital untuk layanan publik. • Meningkatkan kapasitas adaptasi sektor pertanian dan perikanan. • Penguatan kebijakan ekonomi hijau, serta meningkatkan investasi swasta. • Pemantapan ekonomi hijau yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta meningkatkan kontribusi sektor ekonomi hijau terhadap pertumbuhan ekonomi. • Mengembangkan program perlindungan sosial yang responsif terhadap bencana dan krisis, serta meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan. • Memperkuat sistem jaminan sosial dan memperluas cakupan program, dengan sistem identifikasi penerima bantuan yang terintegrasi • Pemantapan sistem perlindungan Sosial Adaptif: • Pemantapan sistem perlindungan sosial nasional yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 	
2.	Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam mewujudkan SDM yang sehat, berpendidikan, profesional, serta	<ul style="list-style-type: none"> • Memperluas akses layanan kesehatan dasar, terutama di daerah terpencil, dengan integrasi data kesehatan untuk efisiensi. • Memberikan layanan jaminan Kesehatan Masyarakat. • Meningkatkan jaminan ketenagakerjaan. 	

	<p>menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses pendidikan anak usia dini dan memperkuat kurikulum berbasis kompetensi, didukung integrasi data Pendidikan. • Memfokuskan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular. • Meningkatkan akses layanan kesehatan dan mengembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. • Meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tertinggal dan mengembangkan program beasiswa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. • Mengembangkan platform digital untuk perdagangan dan investasi, serta meningkatkan kapasitas SDM di bidang teknologi digital. • Penguatan sistem kesehatan nasional, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan Kesehatan. • Pemantapan sistem kesehatan nasional yang tangguh dan adaptif, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kesehatan yang optimal. • Pemantapan pendidikan Berkualitas Merata: sistem pendidikan nasional yang berdaya saing global, serta meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan yang unggul • Pemantapan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang sehat • Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam lingkup pemerintahan 	
<p>3.</p>	<p>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) bebas KKN melalui transparansi dan akuntabilitas berbasis teknologi, didukung aparatur yang berintegritas, profesional, responsif,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan infrastruktur digital dan meningkatkan literasi digital, serta membangun layanan publik digital. • Memperkuat pengawasan dan transparansi, serta menyederhanakan regulasi untuk mendukung investasi, dengan layanan digital • Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital dan memperkuat sistem pencegahan korupsi 	

	serta meningkatkan keamanan dari segala tindak kejahatan dan perampasan hak	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan program perlindungan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan akses terhadap layanan keuangan inklusif. • Penguatan sistem regulasi dan tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum • Pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik 	
4.	Membangun dan meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar untuk mempercepat pembangunan Wilayah Desa, Kecamatan, dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah yang merata, berbasis potensi, dan seimbang	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan infrastruktur dasar untuk konektivitas antar wilayah kecamatan dan desa serta dengan wilayah berbatasan antar daerah • Mengendalikan pencemaran lingkungan dan mengelola limbah secara berkelanjutan, serta merehabilitasi lahan kritis. • Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana, serta mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif • Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan mengembangkan sistem asuransi bencana. • Mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan meningkatkan investasi dalam sektor energi terbarukan. • Mengembangkan kawasan konservasi dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, serta pengelolaan risiko lingkungan • Penguatan kebijakan lingkungan hidup, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. • Penguatan sistem penanggulangan bencana dan perubahan iklim, serta meningkatkan kapasitas penelitian. • Pemantapan resiliensi nasional terhadap bencana dan perubahan iklim, serta meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. 	
5.	Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membentuk karakter sosial yang agamis, berbudaya, dan berprestasi, didukung	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman nilai-nilai spiritual dan moral melalui pendidikan dan pembinaan keagamaan yang inklusif, serta pelestarian, pengembangan, dan apresiasi seni dan budaya. • Mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan penyediaan dukungan 	

	<p>kesehatan fisik melalui olahraga, serta mengembangkan pariwisata berbasis alam dan budaya</p>	<p>yang memadai untuk mendorong lahirnya masyarakat yang berprestasi dan mampu bersaing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga dan penyediaan akses fasilitas olahraga yang memadai • Optimalisasi potensi destinasi wisata alam dan budaya sebagai penggerak ekonomi lokal, dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya melalui peningkatan infrastruktur, promosi efektif, dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata untuk menciptakan pengalaman yang otentik • dan bertanggung jawab menciptakan ekosistem yang mendukung pembentukan karakter sosial yang agamis, berbudaya, berprestasi, dan sehat secara fisik, memastikan semua komponen bekerja selaras demi kemajuan bersama. 	
--	--	--	--

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penting karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 merupakan perencanaan kinerja yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Rencana Kinerja Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target–target yang telah ditetapkan.

Selain itu, dengan rencana kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja Bupati pada akhir tahun 2025 karena dapat segera dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan sedapat mungkin 5 (lima) indikator kinerja yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2025 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), APBD Tahun 2025, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagaimana terlampir pada Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Tabel II. 2
Perjanjian Kinerja
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SATUAN	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan perekonomian dan pengurangan kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,67
		Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,51
		Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	2,09
2	Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan	PAD sektor pariwisata	Persen	3,88

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SATUAN	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ekonomi PAD sektor pariwisata Porsen			
3	Meningkatnya kesejahteraan petani	Kontribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	Porsen	32,27
		Nilai tukar petani (NTP)	Porsen	109
		Produksi perikanan	Porsen	48,58
4	Meningkatnya peran industri dan perdagangan	Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda terhadap PDRB	Porsen	24,09
		Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Porsen	8,98
		Persentase koperasi akti	Porsen	32,26
5	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pendapatan per kapita	Juta	36,60
6	Meningkatnya ketahanan pangan	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	Skor	88.50
7	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	BB
		Nilai SAKIP	Skor	BB
		Indeks kualitas perencanaan		B
		Opini BPK	Predikat	WTP
8	Meningkatnya pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	70.50
		Skor indeks inovasi daerah	Skor	BAIK
9	Meningkatnya Profesionalisme dan	Skor maturitas SPIP	Skor	3.30

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SATUAN	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Integritas Aparatur Pemerintah Daerah			
10	Meningkatkan akses pendidikan berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68,94
		Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8.79
		Angka harapan lama sekolah	Tahun	11.97
		APM SD/MI	Persen	99.24
		APM SMP/MTs	Persen	78.80
		APM SMA/SMK/MA	Persen	63,20
		APK PAUD	Persen	67,73
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	53,50
11	Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,29
		Angka Kesakitan	Persen	12,75
		Kematian Bayi		20
		Kematian Ibu		1
		Persentase Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita	Persen	12
		Kategori kabupaten/kota sehat (KKS)		Wistara
		Cakupan peserta KB aktif	Persen	70,95
12	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Peringkat pada porprov		-
13		Indeks pembangunan gender (IPG)	Indeks	94,33

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SATUAN	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Indeks	56,35
14	Meningkatnya pembangunan gender dan perlindungan anak	Kategori kabupaten layak anak (KLA)		KLA
		Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		Pratama
15	Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas	Rata-rata waktu tempuh jalan Kabupaten	Km/jam	45
		Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak	Persen	85,88
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	74,47
16	Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	78,06
		Persentase rumah layak huni	Persen	78,10
		Persentase penduduk berakses air minum	Persen	93,02
		Rasio Elektrifikasi	Persen	86,20
		Cakupan layanan teleko Munikasi	Persen	65,77
17	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Respon Cepat Darurat Bencana	Persen	100
18		Indeks kualitas air	Persen	53,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SATUAN	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas udara	Persen	93,02
		Indeks kualitas lahan	Persen	50,21
19	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	Persentase desa tertinggal dan desa sangat tertinggal	Persen	57,38
20	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Persen	66,00
21	Meningkatkan investasi yang kondusif	Nilai investasi	Triliun	4,5 triliun
22	Meningkatnya investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	22
23	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Persen	74.29
24	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Angka kriminalitas		019
		Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD		0



AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III



ABUSAMA, SH
BUPATI OKU SELATAN



H. MISNADI
WAKIL BUPATI OKU SELATAN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

A. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja, sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sebagai dasar dalam melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka setiap indikator kinerja sasaran akan dinilai dengan pengukuran skala ordinal, sebagai berikut :

Tabel III.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA ORDINAL	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74%	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2021-2026, setidaknya terdapat 7 Tujuan dan 19 Sasaran yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

Tabel. III.2

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program															
			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1. Meningkatkan perekonomian dan pengurangan kemiskinan																		
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,42	4,42	4,38	99,1	4,45	4,84	108,76	5	4,18	83,6	84,09	4,58	5,45	5,67	5,28	93%	
2.	Persentase Penduduk Miskin	9,02	9,02	8,93	99	9	10,56	85,23	8,97	10,36	86,6	8,74	9,86	87,19	8,51	9,17	93%	
1.1 Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi																		
3.	PAD sektor pariwisata	0,46	0,46	0,3	65,22	0,78	0,93	119,23	1,34	1,72	128,1	2,28	1,11	48,68	3,68	0,62	16%	
1.2 Meningkatnya kesejahteraan petani																		
4.	Kontribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	31,32	31,32	31,64	101,02	31,56	30,68	97,12	32,79	29,56	90,1	32,03	29,77	92,94	32,27	29,95	93%	
5.	Nilai tukar petani (NTP)	105	105	114,45	109	106	106,8	100,75	107	108,12	101	106	121,7	112,69	109	127,16	117%	

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program														
			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	14	15
6.	Produksi perikanan	32,59	32,59	48,18	59,13	36,01	48,75	135,38	39,79	55,43	161,6	43,97	89,75	204,12	48,58	47,03	97%
1.3 Meningkatnya Peran Industri dan Perdagangan																	
7.	Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda terhadap PDRB	22,81	22,81	22,47	98,51	23,12	23,36	97,19	23,44	24,11	102,9	23,77	24,43	102,76	24,06	24,53	102%
8.	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	8,14	8,14	8	98,28	8,34	8,04	96,4	8,55	8,4	98,2	8,76	8,19	93,49	8,98	8,22	92%
9.	Persentase koperasi aktif	22,45	22,45	21,51	95,81	25,95	22,63	87,21	27,91	23,83	85,4	30	54,18	180,53	32,26	84,09	261%
1.4 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat																	
10	Pendapatan per kapita	30,93	30,93	23,06	74,56	32,26	24,66	76,44	33,65	26,14	77,7	35,09	29,26	83,39	36,6	27,42	75%
1.5 Meningkatnya Ketahanan Pangan																	
11.	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	85,5	85,5	85,2	99,65	86,5	86,5	100	87	87,1	100,1	87,75	88	100,28	88,5	93,12	105%
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan																	

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program															
			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	14	15	
12.	Indeks reformasi birokrasi	B	B	N/A	-	B	C	75	B	CC	95	BB	B	83,33	BB	B	83%	
2.1 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas																		
13.	Nilai SAKIP	B	B	B	100	B	B	100	BB	B	88	BB	B	83,33	BB	B	83%	
14.	Indeks kualitas perencanaan	B	B	B	100	B	B	100	B	B	100	B	B	100,00	B	B	100%	
15.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	wtp	100%	
2.2 Meningkatnya Pelayanan Publik																		
16.	Indeks Kepuasan Masyarakat	N.A	N.A	84,19	100	70,2	81,29	115,8	70,3	83,15	118,3	70,4	84,78	120,43	70,5	83,74	119%	
17.	Skor indeks inovasi daerah	550	550	550	100	700	32,44	4,83	1000/Inovatif /40	42,04	105,1	1200/ inovatif	46,41	103,13	Inovatif	38,33 (Kurang Inovatif)	33%	
2.3 Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah																		
18.	Skor malurtas SPIP	3	3	2	66,67	3,1	2,88	92,13	3,1	3,003	96,9	3,2	3,04	95,00	3,3	3,04	92%	
3. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas																		

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program														
			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	14	15
19.	Indeks Pembangunan Manusia	67,01	67,01	65,34	97,51	67,23	65,87	97,98	67,67	66,67	98,52	68,3	70	102,49	68,94	70,98	103%
20.	Angka rata-rata lama sekolah	8,02	8,02	7,85	97,88	8,21	7,86	95,74	8,4	8,05	95,83	8,59	8,25	96,04	8,79	8,48	96%
21.	Angka harapan lama sekolah	11,79	11,79	11,76	99,75	11,84	11,78	99,49	11,88	11,79	99,24	11,92	11,82	99,16	11,97	12,02	100%
3.1 Meningkatkan akses pendidikan berkualitas																	
22.	APM SDMI	99,04	99,04	89,27	90,14	99,08	99,94	100,87	99,12	99,6	100,48	99,16	95,25	96,06	99,24	99,57	100%
23.	APM SMP/MTs	78,7	78,7	61,8	78,53	78,72	80,2	101,88	78,74	80,14	101,78	78,76	80,42	102,11	78,8	72,35	92%
24.	APM SMA/SMK/ MA	62	62	54	87,1	62,5	61,8	98,56	62,8	56,94	90,67	63	59,48	94,41	63,2	56,66	90%
25.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	51,1	51,1	44,71	87,5	54,83	44,24	80,89	58,83	44,78	76,12	63,12	67,65	107,18	67,73	40,76	60%
26.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	N.A	N.A	75	100	47,5	48,69	102,51	49,5	65	131,31	51,5	73,95	143,59	53,5	61,25	114%
4. Mewujudkan derajat kesehatan Masyarakat																	

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program														
			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	14	15
27.	Indeks Pembangunan Manusia	67,01	67,01	66,67	99,49	67,23	65,87	97,98	67,67	66,67	98,52	68,3	70	102,49	68,94	70,98	103%
28.	Angka usia harapan hidup	67,48	67,48	67,07	99,39	67,93	67,36	99,16	68,38	67,88	99,27	68,83	68,25	99,16	69,29	68,25	98%
4.1 Meningkatnya serajat kesehatan masyarakat																	
29.	Angka Kesakitan	16,39	16,39	16,95	103,42	15,39	21,47	71,68	14,46	20,17	71,69	13,57	7,26	100,00	12,75	23,55	54%
30.	Angka kematian bayi	40	40	18	45	35	9	388,8	30	19	136,67	25	15	100,00	20	19	105%
31.	Angka kematian ibu	4	4	5	125	3	3	100	2	2	100	1	0	100,00	1	5	20%
32.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	22	22	1,33	6,05	2,49	0,34	732,35	2,39	1,21	149,37	2,29	1,89	100,00	2,09	0,78	163%
33.	Kategori kabupaten/kota sehat (KKS)	-	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	Padapa	N/A	N/A	-	-	n/a	Wistara	-	0%
34.	Cakupan peserta KB aktif	69,41	69,41	69,79	100,55	69,79	68,54	98,21	70,18	73,08	105,56	70,56	73,01	103,47	70,95	66,12	93%
4.2 Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga																	

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program														
			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	14	15
35.	Peringkat pada porprov	3	3	3	100	-	N/A	N/A	3	5	60	-	-	n/a	3	17	10%
5. Meningkatkan kesetaraan dan Keadilan Gender																	
36.	Indeks pembangunan Gender (IPG)	93,1	93,1	88,96	95,55	93,34	92,4	90,99	93,59	92,6	90,94	93,83	92,6	98,69	94,33	92,43	98%
37.	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	55,87	55,87	53,4	95,58	55,96	54,56	97,5	56,06	57,81	103,12	56,14	57,81	102,97	56,35	58,28	103%
5.1 Meningkatnya pembangunan gender dan perlindungan anak																	
38.	Kategori kabupaten layak anak (KLA)	-	-	N/A	N/A	MADYA	PRATAMA	50	NINDYA	MADYA	66,67	Nindya	Madya	66,67	KLA	pertama	20%
6. Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas																	
39.	Rata-rata waktu tempuh jalan Kabupaten	28	28	28	100	30	70	233,33	35	70	200	40	40	100,00	45	30	67%
40.	Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak	59,08	59,08	57,98	98,14	63,67	85,01	133,52	68,62	86,92	126,7	73,95	87,15	117,85	85,88	88,04	103%
41.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	68,22	68,22	58,95	86,41	69,47	58,25	83,85	70,72	58,49	82,7	71,97	61,93	86,05	74,47	61,93	83%
6.1 Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas																	

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program														
			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	14	15
42.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	57,59	57,59	57,58	99,98	82,14	61,89	120,16	67,04	64,32	95,9	72,34	58,73	81,19	78,06	38,01	49%
43.	Persentase rumah layak huni	77,32	77,32	77	99,59	77,52	77	100,67	77,71	77,1	99,2	77,91	77,06	98,91	76,1	77,46	99%
44.	Persentase penduduk berakses air minum	85,13	85,13	83,4	97,97	87,04	85,01	73,15	88,99	86,92	97,7	90,98	87,15	95,79	93,02	88,04	95%
45.	Rasio Elektrifikasi	70,98	70,98	95	133,84	74,52	99,9	134,06	78,22	99,5	127,2	82,11	99,5	121,18	86,2	99,5	115%
46.	Cakupan layanan telekomunikasi	52,65	52,65	52,65	100	55,66	52,11	93,62	58,54	54,31	92,8	62,21	63,32	101,76	65,77	75,36	115%
6.2 Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana																	
47.	Respon Cepat Darurat Bencana	42,38	42,38	84,69	199,83	100	100	38,5	100	100	100	100	100	100,00	100	100	100%
6.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup																	
48.	Indeks kualitas air	52,6	52,6	65,56	124,84	52,7	61,85	117,36	52,8	55,44	105	52,9	60,56	114,48	53	94	177%
50.	Indeks kualitas udara	92,62	92,62	89	96,09	92,72	90,89	98,83	92,82	91,25	98,3	92,92	92,19	99,21	93,82	128	138%
51.	Indeks kualitas tanah	41,85	41,85	40,27	96,22	43,94	40,27	91,65	46,03	41,01	89,1	48,12	42,15	87,59	50,21	100	199%
6.4 Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa																	
52.	Persentase desa tertinggal dan desa sangat tertinggal	60,35	60,35	60,35	100	59,59	32,49	163,41	58,58	13,09	447,5	58,11	9,53	119,07	57,36	0,02	100%

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program														
			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	14	15
6.5 Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW																	
53.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	50,72	50,72	36,3	71,57	54	36,33	67,26	50	36,3	62,6	62	36,3	58,55	66	36,3	55%
7. Meningkatkan investasi yang kondusif																	
54.	Nilai investasi	1,0 triliun	1,0 triliun	919,6 M	91,96	1,5 triliun	976,1 Milyar	65,07	2,5	1,51	60,4	3,5 triliun	1,71	48,86	4,5 triliun	1,276 T	28%
7.1 Meningkatnya Investasi																	
55.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	11	11	30	272,7	14	29	207,14	16	39	243,75	18	42	233,33	22	25	114%
7.2 Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja																	
56.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	2,29	2,29	2,29	100	2,24	1,82	123,06	2,19	1,61	62,65	2,14	1,6	115,16	2,09	1,92	1,09
7.3 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban																	
57.	Angka kriminalitas	0,37	0,37	0,036	9,7	0,29	0,041	14,13793103	0,22	0,038	>100%	0,17	0,038	>100%	0,19	0,038	>100%
58.	Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD	5	5	3	60	4	3	133,33	0	1	80	0	0	100,00	0	0	100%

1. Tujuan 1 : Meningkatkan perekonomian dan pengurangan kemiskinan

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka pencapaian kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel III.3
Capain tujuan 1 "Meningkatkan perekonomian dan pengurangan kemiskinan"

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Presentase	5,67	5,28	93%	4,58	93%
2.	Persentase Penduduk Miskin	Presentase	8,51	9,17	93%	29,26	93%

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah.

Pada sasaran meningkatkan perekonomian dan pengurangan kemiskinan terdapat 2 indikator tujuan yaitu pertumbuhan ekonomi dan presentase penduduk miskin. Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan Ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi Tahun 2025 ditetapkan sebesar 5,67%, dengan realisasi sebesar 5,28%, sehingga capaian kinerja mencapai 93% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 4,58%, terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi daerah, meskipun belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Capaian terhadap target akhir RPJMD (2025) juga berada pada angka 93%, yang masuk dalam katagori capaian baik.
- b. Pada Tahun 2025, target persentase penduduk miskin ditetapkan sebesar 8,51%, dengan realisasi sebesar 9,17%. Berdasarkan perhitungan indikator yang bersifat negatif (semakin kecil semakin baik), capaian kinerja mencapai 93% dari target yang telah ditetapkan dan masuk dalam katagori capaian baik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penurunan angka kemiskinan belum sepenuhnya mencapai sasaran yang direncanakan dalam tahun berjalan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 29,26%, terjadi penurunan yang sangat signifikan pada Tahun 2025. Kondisi ini menggambarkan adanya perbaikan dalam penanganan kemiskinan melalui berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses layanan dasar.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 3 sasaran strategis, yaitu:

1) Sasaran 1.1 Meningkatnya Pariwisata Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Pada sasaran Meningkatnya Pariwisata Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi. Terdapat indikator PAD pariwisata. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator Pencapaian PAD pariwisata belum memenuhi target karena memiliki capaian hanya 16% dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 0,62 dan target sebesar 3,88 sehingga capaian tersebut dapat dikategorikan **KURANG**.

Tabel III.4
Capain sasaran 1.1

“Meningkatnya Pariwisata Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi”

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	PAD sektor pariwisata	Persen	3,88	0,62	16%	1,11	16%

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2025

Capaian indikator Meningkatnya Pariwisata Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi memiliki capaian 16% dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 0,62 dari target 3,88 persen. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,11. Realisasi PAD Pariwisata tahun 2025 sebesar Rp. 457.486.303,00 dari PAD Kabupaten sebesar Rp. 72.795.473.983,00. Selanjutnya dianalisis juga perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.5

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja											
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			
			realisasi	%	Realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	target	realisasi	%	
1.	PAD sektor pariwisata	0,45	0,3	65,22	0,50	119,23	1,72	128,1	1,11	48,68	3,88	0,62	16%	

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 pada indikator PAD Sektor Pariwisata menunjukkan dinamika capaian yang cukup fluktuatif dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD. Pada kondisi awal RPJMD, realisasi PAD sektor pariwisata tercatat sebesar 0,46. Pada Tahun 2021, realisasi mencapai 0,3 dengan persentase capaian sebesar 65,2%, yang menunjukkan bahwa kinerja masih berada di bawah target yang ditetapkan. Memasuki Tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan dengan realisasi sebesar 0,93 dan capaian 119,23%, yang berarti melampaui target. Peningkatan ini berlanjut pada Tahun 2023, dengan realisasi sebesar 1,72 dan persentase capaian 128,1%, menunjukkan kinerja yang sangat baik dan pertumbuhan sektor pariwisata yang cukup pesat pada periode tersebut. Namun demikian, pada Tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup tajam. Realisasi tercatat sebesar 1,11 dengan capaian hanya 48,68%, sehingga tidak memenuhi target yang ditetapkan. Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 3,88, namun realisasi baru mencapai 0,62 atau sekitar 16% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja PAD sektor pariwisata masih jauh dari yang diharapkan dan memerlukan strategi percepatan serta langkah korektif yang lebih terarah.

Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata belum dapat diperbandingkan dengan data nasional dan provinsi akibat keterbatasan data yang tersedia. Ke depan, diperlukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi sistem pendataan antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mendukung analisis kinerja yang lebih terukur dan akuntabel.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan bagian dari upaya optimalisasi potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan. Mengingat karakteristik daerah yang memiliki potensi wisata alam, budaya, dan kearifan lokal yang cukup besar, maka strategi peningkatan PAD harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berbasis data.

Secara analitis, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi rendah atau belum optimalnya kontribusi PAD sektor pariwisata, antara lain: (1) belum optimalnya pengelolaan destinasi unggulan, (2) keterbatasan

infrastruktur pendukung, (3) sistem pemungutan retribusi yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, (4) rendahnya promosi dan branding daerah, serta (5) belum maksimalnya keterlibatan sektor swasta dan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, strategi peningkatan PAD sektor pariwisata diarahkan pada beberapa pendekatan berikut:

a) Optimalisasi Pengelolaan Destinasi Berbasis Potensi Unggulan

Penguatan pengelolaan destinasi prioritas perlu difokuskan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana, standarisasi pelayanan, serta pengelolaan berbasis manajemen destinasi terpadu. Penataan kawasan wisata secara profesional akan meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan dan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan retribusi.

b) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber PAD

Intensifikasi dilakukan melalui Penyempurnaan regulasi retribusi dan pajak sektor pariwisata. Penertiban dan validasi data objek serta subjek pajak/retribusi. Penerapan sistem pembayaran non-tunai (cashless) guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan melalui Pengembangan destinasi baru berbasis desa wisata, Penguatan sektor pendukung seperti kuliner, ekonomi kreatif, dan homestay. Pengembangan event daerah yang bersifat periodik untuk meningkatkan okupansi dan lama tinggal wisatawan.

c) Digitalisasi dan Integrasi Sistem Pelaporan

Penguatan sistem informasi pariwisata yang terintegrasi antar-OPD menjadi langkah strategis dalam menyediakan data real time terkait jumlah kunjungan, potensi penerimaan, dan kontribusi terhadap PAD. Digitalisasi ini tidak hanya mendukung transparansi, tetapi juga memudahkan perencanaan berbasis evidence-based policy.

d) Peningkatan Promosi dan Branding Daerah

Strategi promosi perlu diarahkan pada segmentasi pasar yang jelas, pemanfaatan media digital, serta kolaborasi dengan travel agent dan komunitas wisata. Branding destinasi harus menonjolkan keunikan dan

diferensiasi daerah agar memiliki daya saing dibandingkan kabupaten/kota lain di tingkat provinsi maupun nasional.

e) Penguatan Kemitraan dan Investasi

Kemitraan dengan sektor swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan amenities wisata. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) akan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.6
Capaian Kinerja Sasaran Sektor Pariwisata

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi	Keterangan
			Jumlah	Realisasi Anggaran		
1	PAD sektor pariwisata	16,2	634.750.850	634.750.250	0,162	Tidak Efisien

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja pada sasaran **PAD sektor pariwisata** menunjukkan rata-rata capaian indikator sebesar **16,2%**. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp634.750.850**, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp634.750.250** atau hampir seluruh pagu anggaran yang tersedia terserap.

Meskipun tingkat penyerapan anggaran tergolong sangat tinggi (mendekati 100%), capaian kinerja yang dihasilkan relatif rendah, yaitu hanya 16,2%. Hal ini menghasilkan tingkat efisiensi sebesar **0,162**, yang dikategorikan **tidak efisien**. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum sebanding dengan output atau hasil yang dicapai.

Secara analitis, rendahnya tingkat efisiensi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sektor pariwisata belum optimal dalam menghasilkan peningkatan PAD yang signifikan. Tingginya realisasi anggaran tanpa diikuti capaian indikator yang

memadai dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perencanaan kegiatan yang kurang tepat sasaran, strategi peningkatan PAD yang belum efektif, keterbatasan daya tarik destinasi, atau lemahnya sistem pengelolaan dan pengawasan penerimaan.

2) Sasaran 1.2 Meningkatnya kesejahteraan petani

Pada sasaran Meningkatnya kesejahteraan petani terdapat 3 indikator sasaran, secara terperinci sebagai berikut :

Tabel III.7

Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	Kontribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	Persen	32,27	29,95	93%	29,95	93%
2.	Nilai tukar petani (NTP)	Persen	109	127,18	117%	127,18	117%
3.	Produksi perikanan	Persen	48,58	47,03	97%	47,03	97%
Rata-rata Capaian					102,3%		102,3%

Sumber : Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, dapat disampaikan bahwa secara umum indikator pada sasaran sektor pertanian dan perikanan menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata capaian sebesar 102,3% terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025.

- a. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB ditargetkan sebesar 32,27%, dengan realisasi sebesar 29,95% atau mencapai 93% dari target dan menunjukan capaian kinerja baik. Capaian ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah agar peranannya terhadap struktur PDRB semakin meningkat.
- b. Nilai Tukar Petani (NTP) ditargetkan sebesar 109, dan berhasil direalisasikan sebesar 127,18 atau 117% dari target dan menunjukan

capaian kinerja sangat baik. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani relatif baik. Kenaikan NTP mencerminkan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani, sehingga daya beli petani mengalami peningkatan.

- c. Produksi perikanan ditargetkan sebesar 48,58%, dengan realisasi sebesar 47,03% atau mencapai 97% dari target dan menunjukkan capaian kinerja baik. Capaian ini tergolong cukup baik meskipun belum sepenuhnya memenuhi target.

Selanjutnya dilakukan juga analisis capaian sasaran meningkatnya kesejahteraan petani per indikator dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel III.8
Capaian Sasaran Kesejahteraan Petani Tahun 2021 – 2025

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Indikator										
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
			realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	target	realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14%
1.	Kontribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	31,32	31,64	101,02	30,59	97,12	29,56	94,1	29,77	92,54	32,27	29,95	93%
2.	Nilai tukar petani (NTP)	100	114,45	109	106,8	100,75	105,12	101	121,7	112,69	109	127,18	117%
3.	Produksi perikanan	32,59	40,10	59,12	40,75	93,38	55,43	101,5	89,75	204,12	48,58	47,03	97%

Sumber : Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian

- a. Kontribusi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB. Pada Tahun 2021 realisasi mencapai 31,64%, namun mengalami tren penurunan pada Tahun 2022 menjadi 30,59% dan Tahun 2023 menjadi 29,56%. Tahun 2024 menunjukkan sedikit perbaikan menjadi 29,77%. Pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 32,27%, dengan realisasi sebesar 29,95% atau capaian 93%. Capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi salah satu sektor basis daerah, kontribusinya terhadap PDRB relatif tertekan, antara lain akibat fluktuasi produksi, faktor cuaca, serta dinamika harga komoditas dan pertumbuhan sektor lain yang lebih cepat.

- b. Nilai Tukar Petani pada kondisi awal RPJMD sebesar 105. Pada Tahun 2021 realisasi meningkat menjadi 114,45, kemudian sedikit menurun pada Tahun 2022 menjadi 106,8 , dan kembali meningkat pada Tahun 2023 menjadi 108,12. Peningkatan signifikan terjadi pada Tahun 2024 dengan realisasi 121,7 . Pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 109 dan realisasi mencapai 127,18 atau 117%. Upaya peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten OKU Selatan didukung melalui berbagai kegiatan strategis yang berorientasi pada peningkatan harga yang diterima petani serta penekanan biaya produksi yang dibayar petani. Kegiatan tersebut meliputi pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, padi, dan hortikultura melalui bantuan benih unggul dan sarana produksi, fasilitasi alat dan mesin pertanian (alsintan), penguatan kelembagaan kelompok tani dan koperasi, serta pelatihan pengolahan hasil untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Selain itu, dilakukan pula upaya stabilisasi harga dan pengendalian inflasi daerah melalui koordinasi TPID, pengembangan infrastruktur pendukung seperti jalan usaha tani dan jaringan irigasi, serta fasilitasi akses permodalan melalui KUR dan lembaga keuangan mikro. Secara terintegrasi, kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pendapatan petani, memperbaiki efisiensi usaha tani, dan menjaga tren positif NTP secara berkelanjutan.
- c. Produksi Perikanan Adapun indikator produksi perikanan pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 48,58 dan terealisasi 47,03 atau 97%. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian ini relatif mendekati sasaran yang ditetapkan. Fluktuasi produksi dipengaruhi oleh faktor cuaca, ketersediaan sarana budidaya, serta dinamika usaha perikanan tangkap dan budidaya. Tingkat produksi perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang memadai, baik perairan umum darat seperti sungai, danau, maupun kolam dan lahan potensial untuk budidaya. Kondisi geografis yang memiliki banyak sumber air menjadi modal utama dalam pengembangan perikanan budidaya air tawar. Selain itu, dukungan program pemerintah daerah melalui penyediaan bantuan benih unggul, pakan, sarana dan prasarana budidaya, serta alat

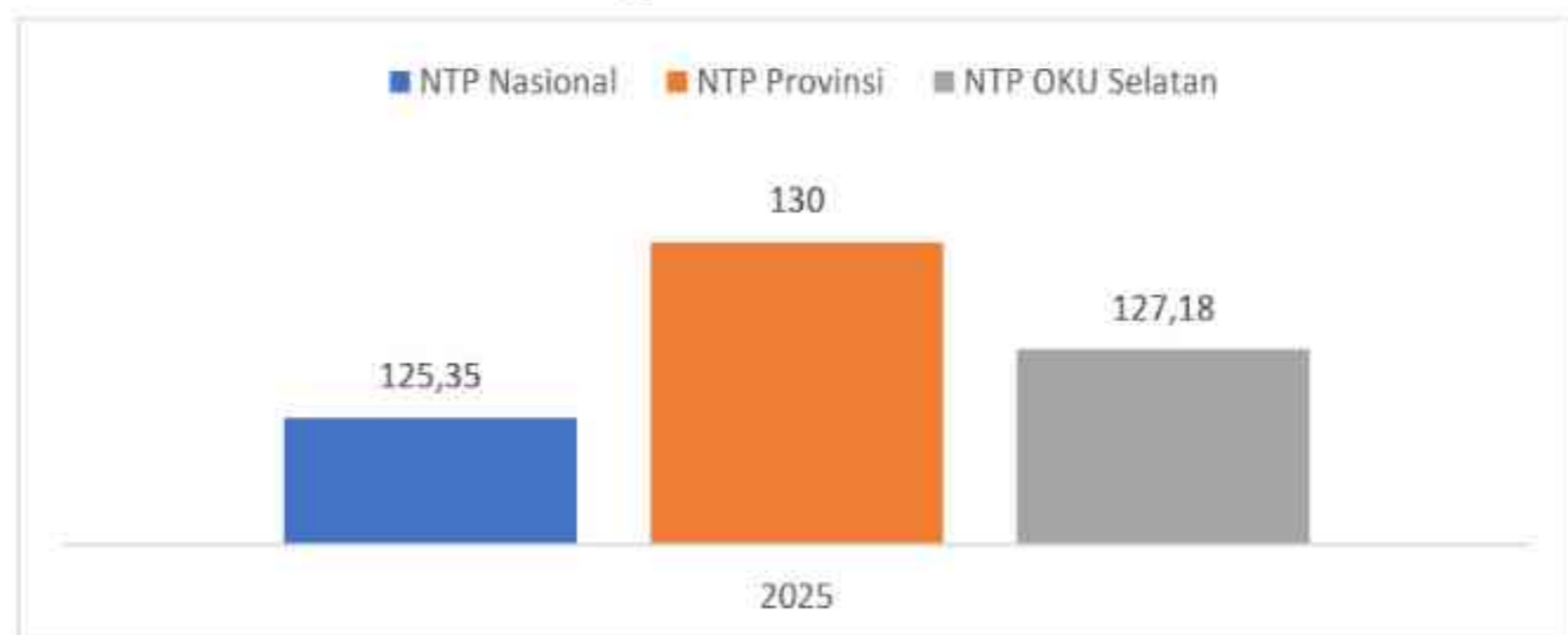
tangkap turut mendorong peningkatan kapasitas produksi. Peran penyuluh perikanan dalam pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas pembudidaya juga menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas. Kelembagaan kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) yang semakin aktif serta akses terhadap pasar lokal turut memperkuat keberlanjutan usaha perikanan.

Perbandingan realisasi capaian kinerja per indikator pada sasaran meningkatkan kesejahteraan petani adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Tukar Petani Apabila diperbandingkan dengan capaian tingkat nasional Nilai Tukar Petani Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih di bawah Nilai Tukar Petani baik Provinsi Sumatera Selatan namun sudah diatas nilai Nasional. NTP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 tercatat 130,0 dan NTP Nasional sebesar 125,35. Sementara itu, di tingkat lokal Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) mencatat NTP sebesar 127,18 pada Tahun 2025, yang tidak hanya melampaui target kinerja daerah tetapi juga berada di atas angka nasional, serta mendekati atau setara bahkan sering kali melampaui capaian NTP Provinsi Sumatera Selatan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa petani di OKU Selatan secara umum menikmati kondisi daya beli yang cukup baik, dengan kemampuan mempertahankan harga jual hasil pertanian lebih tinggi dibanding biaya produksi.

Gambar III.1

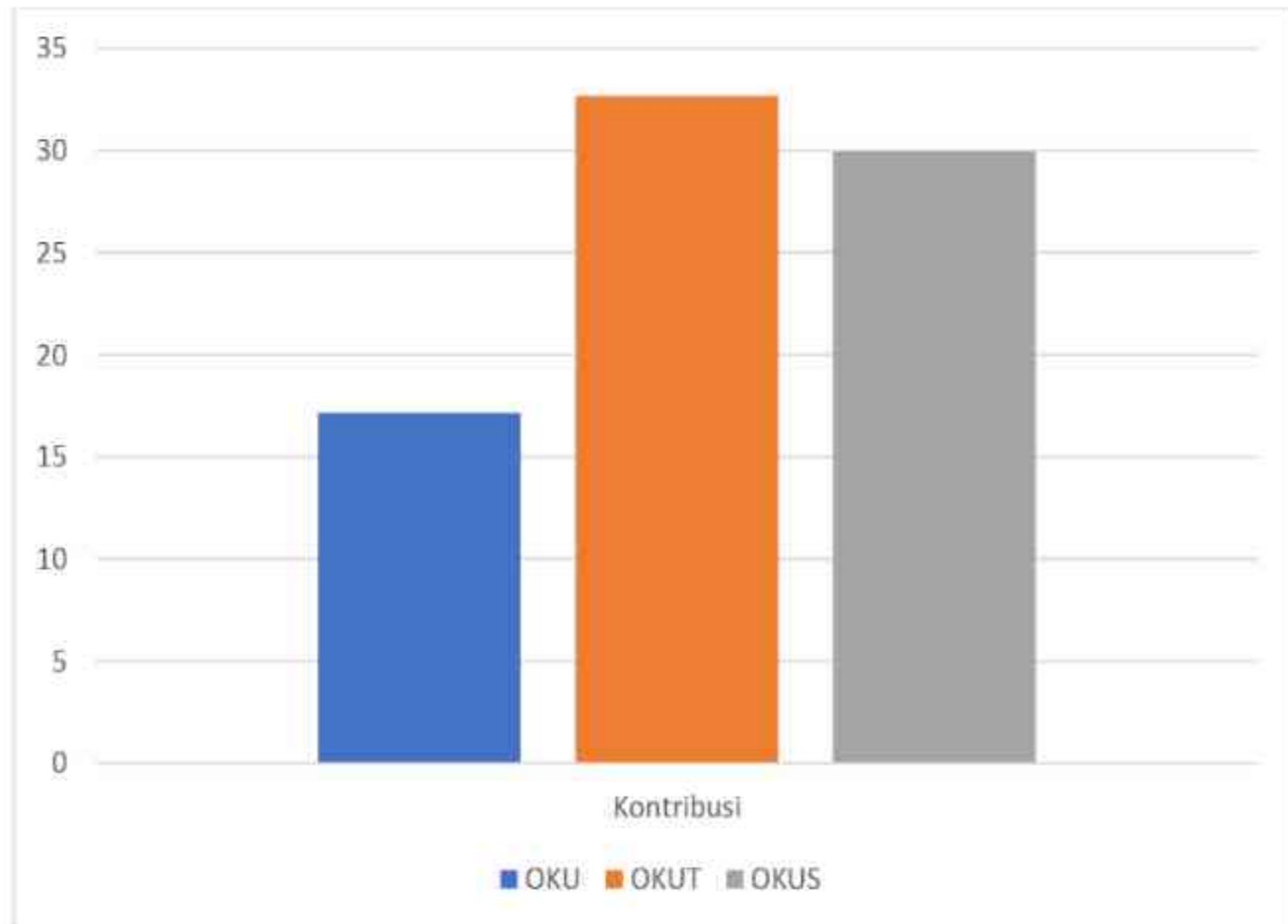
Perbandingan Nilai NTP Tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

- b. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 29,95%. Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, posisi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berada di antara kedua daerah tersebut. Kontribusi sektor yang sama di Kabupaten Ogan Komering Ulu tercatat sebesar 17,16 persen, sedangkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mencapai 32,69 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih cukup bertumpu pada sektor primer, meskipun tidak setinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang memiliki basis pertanian lebih dominan. Dibandingkan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang lebih bertumpu pada sektor non-pertanian, peran sektor pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan relatif lebih besar dan tetap menjadi sektor strategis dalam menopang perekonomian daerah.

Gambar III.2
Perbandingan Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan petani dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.9
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Petani

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi	Keterangan
			Jumlah	Realisasi Anggaran		
1	Meningkatnya kesejahteraan petani	102%	Rp1.910.421.927,19	Rp813.134.474,19	2,40	Efisien

Sumber : Dinas Perikanan & Dinas Pertanian, 2026

Pada sasaran **meningkatnya kesejahteraan petani** menunjukkan rata-rata capaian indikator sebesar 102%, yang berarti target kinerja telah terlampaui. Untuk mendukung pencapaian tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp1.910.421.927,19 dengan realisasi anggaran sebesar Rp813.134.474,19. Dengan tingkat efisiensi sebesar 2,40 dan kategori **efisien**, hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang melebihi target dapat diraih dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia. Kondisi ini mencerminkan pelaksanaan program yang efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kesejahteraan petani, sekaligus menunjukkan optimalisasi penggunaan sumber daya anggaran. Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Petani bersumber dari :

- a. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB dan Nilai Tukar Petani memiliki anggaran Rp1.673.646.927,00 dengan realisasi Rp578.966.550,00 dan capaian sebesar 35%.
- b. Produksi Perikanan memiliki anggaran Rp236.775.000,19 dengan realisasi Rp234.167.924,19 dan capaian 99%.

3) Sasaran 1.3 Meningkatnya Peran Industri dan Perdagangan

Pada sasaran Meningkatnya Peran Industri dan Perdagangan terdapat 3 indikator sasaran, secara terperinci sebagai berikut:

Tabel III.10
Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda terhadap PDRB	Persen	24,09	24,53	102%	24,43	102%
2.	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	8,98	8,22	92%	8,19	92%
3.	Persentase koperasi aktif	Persen	32,26	84,09	261%	54,16	261%
Rata-rata Capaian					151,6%		151,6%

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2025

Berdasarkan capaian indikator Tahun 2025, sektor perdagangan dan industri menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB ditargetkan sebesar 24,09 persen dan terealisasi sebesar 24,53 persen atau mencapai 102% dari target. Capaian ini juga meningkat dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar 24,43 persen, yang menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas perdagangan dan jasa reparasi yang berkontribusi positif terhadap struktur perekonomian daerah.

Sementara itu, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ditargetkan sebesar 8,98 persen dengan realisasi sebesar 8,22 persen atau 92% dari target. Meskipun belum mencapai target, realisasi ini sedikit meningkat dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 8,19 persen. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan, namun masih diperlukan penguatan pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk daerah.

Adapun persentase koperasi aktif menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari target sebesar 32,26 persen, realisasi mencapai 84,09 persen atau dari target, secara jumlah mengalami kenaikan dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar 54,16 persen. Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator pada tahun 2025 mencapai 151%, yang menunjukkan bahwa sasaran kinerja sektor ini secara umum telah tercapai dengan sangat baik, meskipun masih terdapat indikator yang perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya.

Selanjutnya dilakukan juga analisis capaian sasaran meningkatnya kesejahteraan petani per indikator dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.11
Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani
Tahun 2021- 2025

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian indikator										
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
			realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	target	realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14%
1	Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda terhadap PDRB	22,81	22,47	98,51	23,36	97,12	24,11	102,2	24,43	102,78	24,09	24,53	102%
2	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	8,14	8	98,29	8,04	96,4	8,4	98,2	8,19	93,49	8,98	8,22	92%
3	Peningkatan kecerdasan skill	22,45	21,51	95,81	22,63	97,21	23,85	95,4	54,16	100,53	32,26	64,09	261%

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2025

Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja program sektor perdagangan, industri, dan koperasi periode Tahun 2021–2025, terlihat dinamika yang cenderung fluktuatif namun menunjukkan perbaikan pada tahun terakhir.

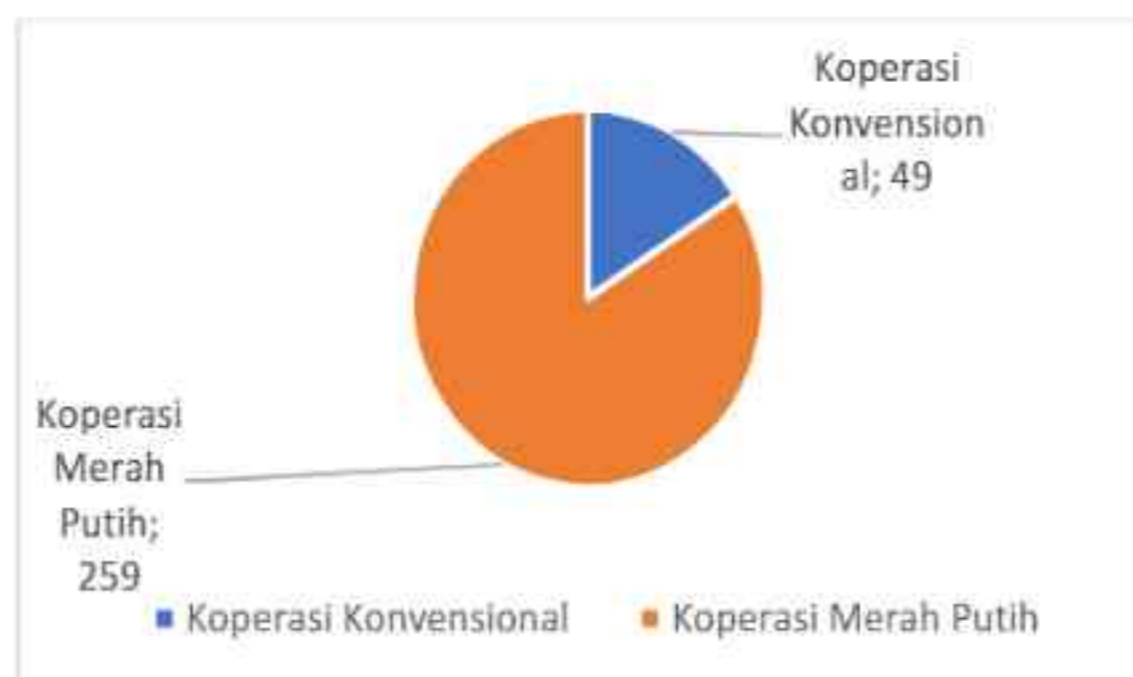
- a. Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB pada kondisi awal RPJMD sebesar 22,81 persen. Pada Tahun 2021 realisasi sebesar 22,47 persen (98,51%), meningkat pada Tahun 2022 menjadi 23,36 persen, dan kembali meningkat pada Tahun 2023 menjadi 24,11 persen. Tren positif berlanjut pada Tahun 2024 sebesar 24,43 persen (102,78%). Pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 24,09 persen dan terealisasi sebesar 24,53 persen atau 102%, yang menunjukkan kinerja sektor

perdagangan tetap stabil dan mampu melampaui target yang ditetapkan.

- b. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada kondisi awal RPJMD sebesar 8,14 persen. Realisasi Tahun 2021 sebesar 8 persen, Tahun 2022 sebesar 8,04 persen, dan Tahun 2023 meningkat menjadi 8,4 persen. Pada Tahun 2024 realisasi sebesar 8,19 persen. Tahun 2025 ditargetkan sebesar 8,98 persen dengan realisasi sebesar 8,22 persen atau 92%, sehingga belum mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sektor industri pengolahan masih memerlukan penguatan, khususnya dalam peningkatan nilai tambah dan kapasitas produksi.
- c. Sementara itu, persentase koperasi aktif pada kondisi awal RPJMD sebesar 22,45 persen. Tahun 2021 realisasi sebesar 21,51 persen, Tahun 2022 sebesar 22,63 persen, dan Tahun 2023 sebesar 23,83 persen. Pada Tahun 2025 terjadi lonjakan signifikan mditargetkan sebesar 32,26 persen dan terealisasi sebesar 84,09 persen atau 216%, yang menunjukkan kinerja sangat baik dan melampaui target. Capaian ini disebabkan karena adanya Peningkatan jumlah koperasi aktif pada tahun berjalan dipengaruhi oleh tumbuh dan berkembangnya Koperasi Merah Putih di berbagai desa dan kelurahan. Kehadiran koperasi ini mendorong terbentuknya unit-unit usaha baru berbasis komunitas yang secara administratif terdaftar dan menjalankan kegiatan usaha secara aktif. Koperasi Merah Putih Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berjumlah 259 dan Koperasi konvensional sebesar 49 Koperasi.

Gambar III. 3

Perbandingan Jumlah Koperasi Aktif

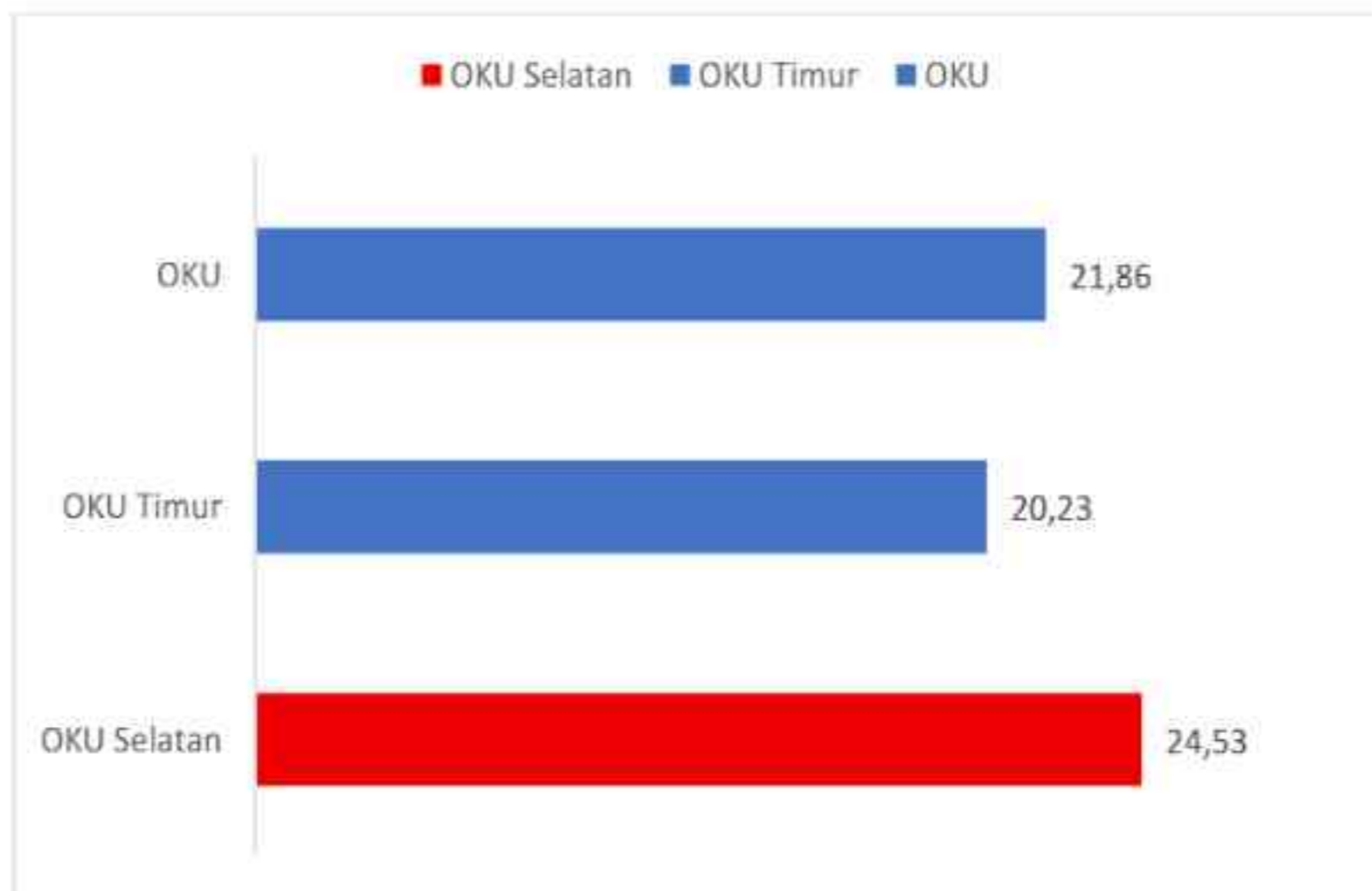


Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2025

Perbandingan realisasi capaian kinerja per indikator pada sasaran meningkatkan kesejahteraan petani adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki kontribusi terbesar yaitu 24,53%, lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang sebesar 21,86% dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 20,23%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki peranan yang cukup dominan dalam mendorong perekonomian daerah. Tingginya kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengindikasikan bahwa kegiatan distribusi barang, perdagangan ritel maupun grosir, serta jasa reparasi kendaraan bermotor berkembang cukup baik dan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah.

Gambar III.4
Perbandingan Realisasi PDRB Perdagangan



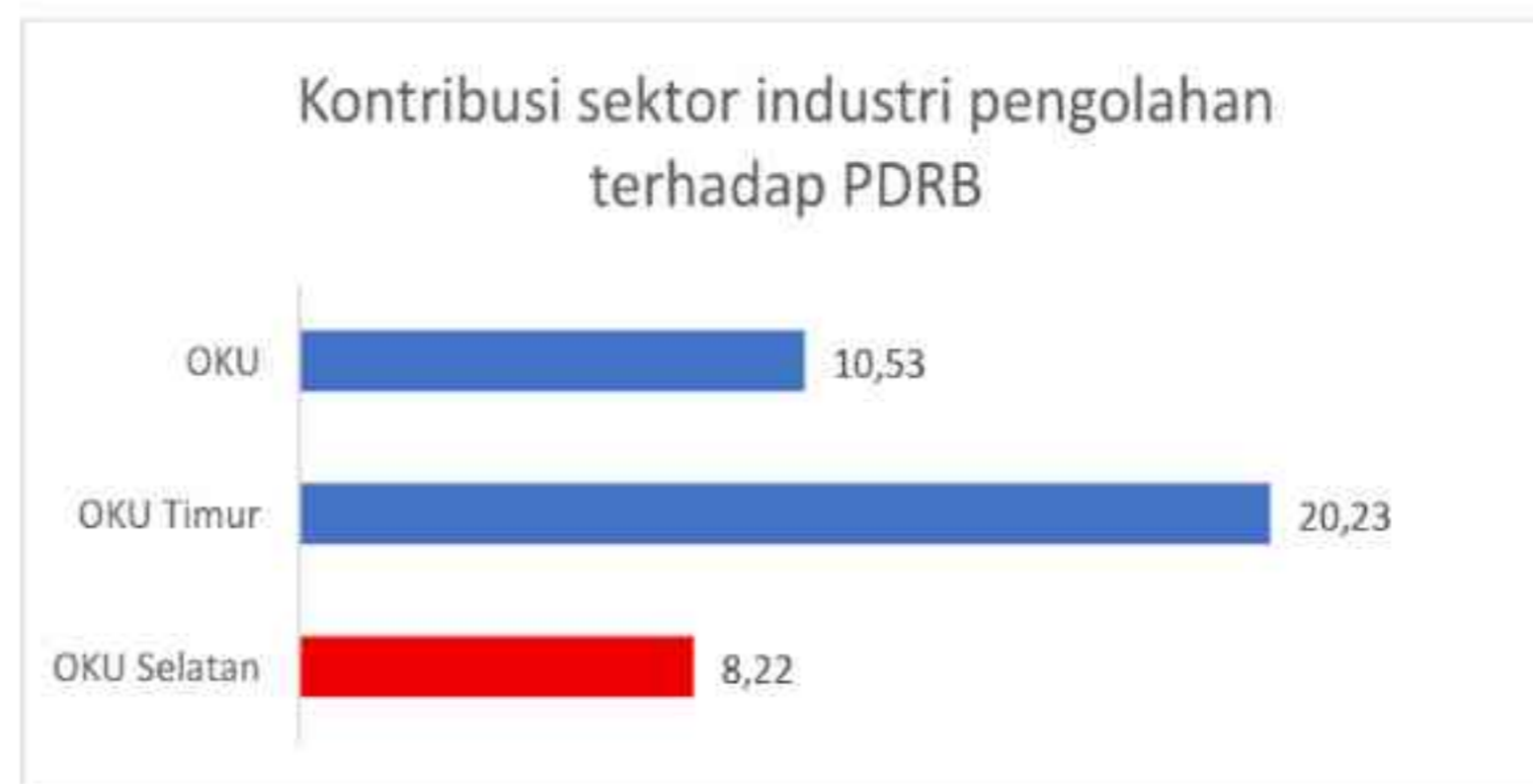
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

- b. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB adapun Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki kontribusi sebesar 8,22%, yang merupakan nilai terendah di antara ketiga kabupaten tersebut. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada

tiga kabupaten menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki kontribusi tertinggi yaitu sebesar 20,23%, yang menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan berperan cukup dominan dalam struktur perekonomian daerah tersebut. Sementara itu, Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki kontribusi sebesar 10,53%, yang menandakan sektor ini juga berkontribusi terhadap perekonomian daerah meskipun nilainya masih berada di bawah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih lebih didominasi oleh sektor lainnya, sehingga pengembangan sektor industri pengolahan masih memiliki peluang untuk terus ditingkatkan melalui penguatan industri berbasis potensi lokal guna meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

Gambar. III.5

Perbandingan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

- c. Presentase Koperasi Aktif Grafik perbandingan jumlah koperasi aktif menunjukkan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki jumlah koperasi aktif paling banyak yaitu 575 unit. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang memiliki 392 koperasi aktif. Sementara itu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki 308 koperasi aktif, yang merupakan jumlah terendah di antara ketiga kabupaten tersebut. Perbandingan ini menggambarkan

bahwa perkembangan kelembagaan koperasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur relatif lebih pesat, dibandingkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Gambar III.6
Perbandingan Jumlah Koperasi Aktif



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan petani dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.12
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Industri dan Perdagangan

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi	Keterangan
			Jumlah	Realisasi Anggaran		
1	Meningkatnya Peran Industri dan Perdagangan	115%	Rp813.863.000,00	Rp807.246.600,00	1,16	Efisien

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, sasaran meningkatnya peran industri dan perdagangan menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata capaian indikator sebesar 115%, yang berarti realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp813.863.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp807.246.600,00. Dari sisi pemanfaatan anggaran, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,16 yang termasuk dalam kategori efisien, karena target kinerja dapat tercapai bahkan melampaui target dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari yang

direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan peran sektor industri dan perdagangan telah berjalan secara optimal serta mampu menghasilkan kinerja yang baik dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Petani bersumber dari :

- a. Pada Indikator Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda terhadap PDRB memiliki anggaran Rp. 42.489.500,00 dan terealisasi Rp 42.406.500,00 dengan capaian 99%.
- b. Pada Indikator Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB memiliki anggaran Rp. Rp 8.990.100,00 dan terealisasi Rp 8.946.700,00 dengan capaian 99%.
- c. Pada Indikator Presentas Koperasi Aktif memiliki anggaran Rp 762.383.400,00 dan terealisasi Rp. 755.893.400,00 dengan capaian 99%.

4) Sasaran 1.4 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pada sasaran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat terdapat 1 indikator sasaran, secara terperinci sebagai berikut:

Tabel III.13
Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	Pendapatan Perkapita	Juta	36,6	27,42	75%	29,26	75%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, indikator pendapatan per kapita pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 36,6 juta rupiah, dengan realisasi sebesar 27,42 juta rupiah sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 75% dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 29,26 juta rupiah, nilai pendapatan per kapita pada tahun 2025 mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata

pendapatan yang diterima masyarakat masih berada di bawah target yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Secara keseluruhan, capaian tersebut juga menunjukkan bahwa realisasi pendapatan per kapita baru mencapai 75% terhadap target akhir RPJMD tahun 2025, sehingga masih diperlukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Selanjutnya dilakukan juga analisis capaian sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat per indikator dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.14
Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani
Tahun 2021- 2025

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Indikator										
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
			realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	target	realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14%
1.	Pendapatan per kapita	30,93	23,06	74,56	24,66	76,44	26,14	77,7	29,26	83,39	36,6	27,42	75%

Berdasarkan tabel capaian indikator pendapatan per kapita, terlihat bahwa sejak kondisi awal RPJMD sebesar 30,93 juta rupiah, realisasi pada tahun 2021 mencapai 23,06 juta rupiah atau 74,56%. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 24,66 juta rupiah dengan capaian 76,44%, kemudian kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 26,14 juta rupiah dengan capaian 77,7%. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan realisasi 29,26 juta rupiah atau 83,39% dari target. Namun pada tahun 2025, dengan target sebesar 36,6 juta rupiah, realisasi pendapatan per kapita tercatat sebesar 27,42 juta rupiah sehingga capaian kinerja berada pada 75%. Secara umum, tren pendapatan per kapita menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024, namun pada tahun 2025 realisasi masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Karena keterbatasan data maka indikator ini tidak dapat diperbandingkan, baik dengan tingkat kabupaten/kota sekitar, data provinsi

maupun data nasional. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan petani dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.15

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi	Keterangan
			Jumlah	Realisasi Anggaran		
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	75%	Rp 2.223.099.557,00	Rp 2.184.866.449,00	0,76	Tidak Efisien

Sumber: BAPPERIDA, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat menunjukkan rata-rata capaian indikator sebesar 75%. Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp2.223.099.557,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.184.866.449,00. Meskipun tingkat realisasi anggaran cukup tinggi, capaian kinerja yang diperoleh belum optimal sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 0,76 dan dikategorikan tidak efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran yang cukup besar belum sepenuhnya mampu mendorong pencapaian target kinerja secara maksimal, sehingga masih diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran agar upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal.

5) Sasaran 1.5 “Meningkatnya ketahanan pangan”

Pada sasaran meningkatnya ketahanan pangan terdapat indikator Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) memiliki capaian 105% dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 93,12 dan target sebesar 88,5 sehingga capaian tersebut dapat dikategorikan **sangat baik** .

Tabel III.16

Capaian sasaran 5 “Meningkatnya ketahanan pangan”

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	Persen	88,5	93,12	105%	88	105%

Capaian indikator Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) memiliki capaian 105% dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 93,12 dan target sebesar 88,5. Capaian realisasi pada indikator kinerja ini dapat dikatakan meningkat karena pada tahun sebelumnya Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) sebesar 88%. Tercapainya target tersebut bersumber dari Pola Konsumsi masyarakat yang sudah beragam dari konsumsi Padi-padian mengganti dengan sumber karbohidrat lainnya seperti umbi-umbian dan sumber pangan lokal lainnya. Capaian skor pola pangan harapan (PPH) pada target akhir RPJMD yaitu 105%. Selanjutnya dianalisis juga perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.17

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja										
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
			realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	target	realisasi	%
1	2	3	5	6	8	9	11	12	14	15	13	14	15
1.	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	85,5	85,2	99,65	86,5	100	87,1	100,1	88	100,28	88,5	93,12	105%

Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) pada tahun 2021 hingga tahun 2025 selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021 skor PPH sebesar 82,2 % meningkat pada tahun 2025 sebedar 93,12%. Secara

umum, baik target maupun realisasi skor PPH mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, dengan capaian kinerja yang selalu melampaui target (di atas 100%) pada periode 2022–2025. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2025, di mana target ditetapkan sebesar 88,5 dan realisasi mencapai 93,12, menghasilkan capaian sebesar 105,22%. Hal ini menunjukkan lonjakan kinerja yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Gambar III.7 Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

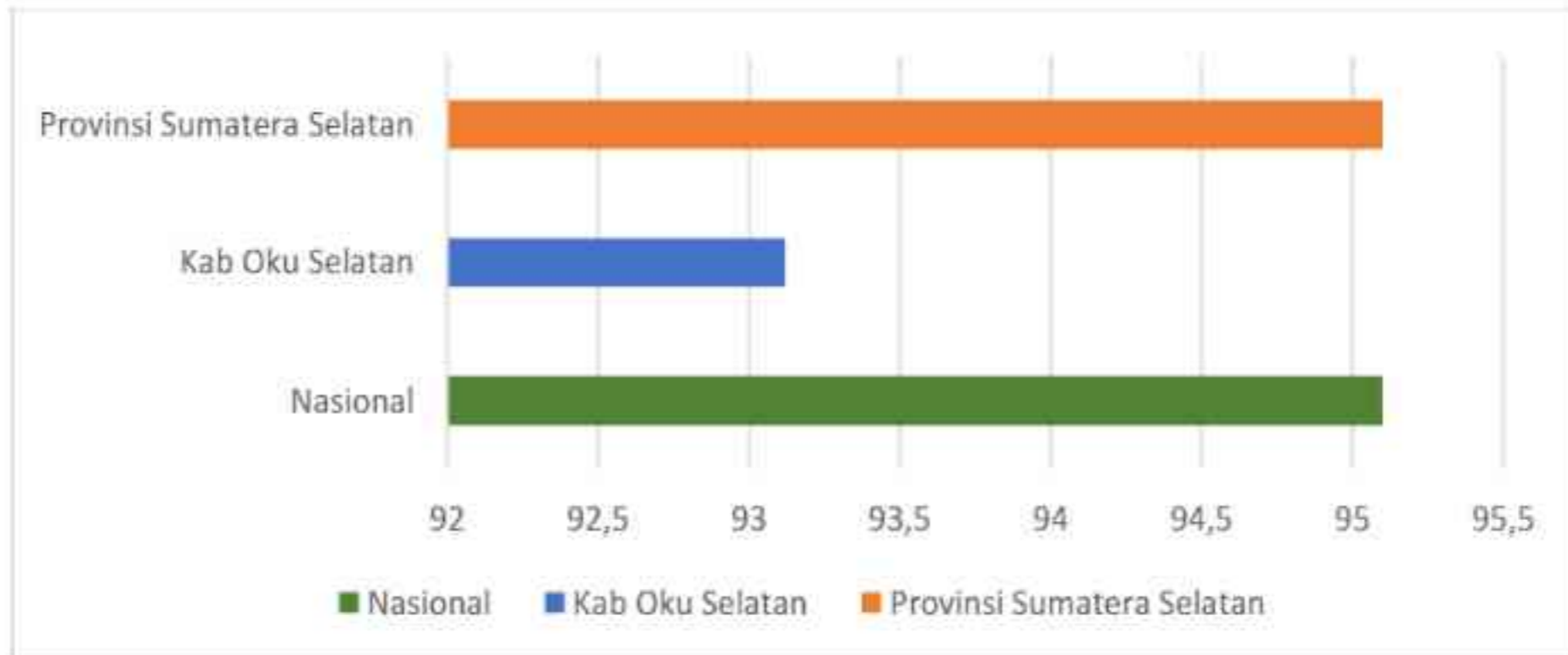
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2022-2025



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Jika dibandingkan dengan Skor PPH baik nasional maupun Provinsi Sumatera Selatan skor Kabupaten OKU Selatan masih berada di bawah capaian provinsi dan nasional. Pada tingkat Provinsi Sumatera Selatan, skor PPH tahun 2025 tercatat sebesar 95,1, sementara pada tingkat nasional juga mencapai 95,1. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Provinsi Sumatera Selatan telah sejajar dengan rata-rata nasional. Meskipun masih di bawah rata-rata nasional, trend peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2025 memperlihatkan adanya percepatan perbaikan kualitas pola konsumsi pangan di daerah.

Gambar III.8
Perbandingan Capaian Tingkat Nasional



Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam, bergizi, seimbang, dan masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan juga sangat mempengaruhi Skor PPH Kabupaten OKU Selatan dibawah skor PPH provinsi maupun nasional. Belum optimalnya pelaksanaan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten OKU Selatan terlihat dari tingkat konsumsi Umbi-umbian, Pangan Hewani (daging, ikan) , kacang-kacangan masih sangat kecil sedangkan konsumsi beras dan sayur-sayuran sudah optimal terlihat pada

Tabel III.18
Skor PPH

No.	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan Ideal	Target Skor Pola Pangan Harapan Kab.	Realisasi Skor Pola Pangan Harapan Kab.	Keterangan
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	Memenuhi
2	Umbi-Umbian	2,5	1,90	1,39	Memenuhi
3	Pangan Hewani	24,0	19,5	23,03	Memenuhi
4	Minyak dan Lemak	5,0	4,8	5,0	Memenuhi
5	Buah/Biji Berminyak	1,0	0,5	0,17	Memenuhi
6	Kacang-kacangan	10,0	4,8	6,03	Memenuhi
7	Gula	2,5	2,0	2,5	Memenuhi
8	Sayur dan Buah	30,0	30,0	30,0	Memenuhi
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	Memenuhi
	Skor PPH	100,0	67,75	93,12	Memenuhi

Untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, perlu terus didukung dengan upaya mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang melalui :

- a) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) melalui komunikasi, informasi, edukasi (penyusunan KIT dan modul penyuluhan di tingkat lapangan, Kegiatan Dapur B2SA, serta penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik
- b) Upaya penurunan konsumsi beras dilakukan dengan meningkatkan produksi serta konsumsi pangan karbohidrat berbasis sumber daya lokal
- c) Peningkatan konsumsi melalui penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani, dan kacang-kacangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga melalui pengoptimalisasian lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.19

Tingkat Ketahanan Pangan

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi	Keterangan
			Jumlah	Realisasi Anggaran		
1	Meningkatnya ketahanan pangan	105,22	269.124.900,-	262.469.750,-	7,69	Efisien

Berdasarkan tabel analisis efisiensi pada sasaran “Meningkatnya Ketahanan Pangan”, rata-rata capaian indikator kinerja tahun 2025 tercatat sebesar 105,22%, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan.

Dari sisi anggaran, pagu yang dialokasikan sebesar Rp269.124.900,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp262.469.750,- atau tidak terserap sepenuhnya. Hal ini menunjukkan adanya penghematan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan perhitungan analisis efisiensi, diperoleh nilai efisiensi sebesar 7,69, dengan kategori efisien. Capaian ini menggambarkan bahwa

target kinerja dapat direalisasikan secara optimal bahkan melampaui sasaran, dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, kondisi tersebut mencerminkan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien, serta menunjukkan bahwa pelaksanaan program ketahanan pangan telah dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat, dan memberikan hasil kinerja yang optimal.

2. Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka pencapaian kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel. III.20
Capaian Tujuan "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan"

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	BB	B	0,63	B	63%

Sumber data: Bagian Organisasi, data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2025 memiliki target kinerja sebesar BB dengan satuan nilai. Namun demikian, realisasi yang dicapai pada Tahun 2025 berada pada kategori B, dengan tingkat capaian sebesar 0,63 atau 63% dan dapat dikategorikan **Baik**. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, capaian Tahun 2025 masih berada pada kategori yang sama, yaitu B. Namun demikian, secara kuantitatif terdapat peningkatan nilai, dari 63,26 pada Tahun 2024 menjadi 67,43 pada Tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja Reformasi Birokrasi, meskipun belum cukup signifikan untuk mendorong perubahan kategori menuju target yang lebih tinggi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mendapat nilai 67,43 yang dijabarkan dari nilai RB general sebesar 61,64 dan RB tematik sebesar 5,79.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 3 sasaran strategis yaitu meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, meningkatnya pelayanan publik dan Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah yang masing-masing di jelaskan sebagai berikut:

1) Sasaran 2.1 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas

Pada sasaran "Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas" terdapat 3 indikator yang secara terperinci dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel. III.21

Capaian Sasaran " Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas"

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	Nilai SAKIP	Nilai	BB	B	63%	B	63%
2.	Indeks kualitas perencanaan	Nilai		B	100%	B	100%
3.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%	WTP	100%
Rata-rata capaian					87,63		87,63

Sumber data: Bagian Organisasi, Bapperida, BPKAD, data diolah.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, terdapat tiga indikator utama yang menjadi tolok ukur kinerja sasaran Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas, yaitu Nilai SAKIP, Indeks Kualitas Perencanaan, dan Opini BPK. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 87,63% yang dapat dikategorikan **Baik**, yang juga setara dengan capaian terhadap target akhir RPJMD Tahun 2025. Angka ini menunjukkan bahwa secara agregat kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berada pada kategori sangat baik, meskipun masih terdapat satu indikator yang memerlukan peningkatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun realisasi dan capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

- a. Pada indikator Nilai SAKIP, target yang ditetapkan adalah kategori BB, sedangkan realisasi Tahun 2025 berada pada kategori B dengan tingkat capaian sebesar 63% dapat dikategorikan Baik. Realisasi ini sama dengan capaian terhadap target akhir RPJMD Tahun 2025, yaitu sebesar

63%, serta tidak mengalami perubahan kategori dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang juga berada pada kategori B. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja masih perlu diperkuat agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

- b. Untuk indikator Indeks Kualitas Perencanaan, realisasi Tahun 2025 mencapai kategori B dengan capaian 100% dan dapat dikategorikan baik, dan sama dengan realisasi Tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah terpenuhi secara optimal, serta mencerminkan konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas dan selaras dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Sementara itu, pada indikator Opini BPK, target yang ditetapkan adalah WTP, dan realisasi Tahun 2025 berhasil mencapai serta mempertahankan opini WTP dengan capaian 100%, sama seperti Tahun 2024 dan dapat dikategorikan Baik. Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar pemeriksaan.

Perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.22
Perbandingan Realisasi Dan Capaian Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Tahun 2021 – 2025

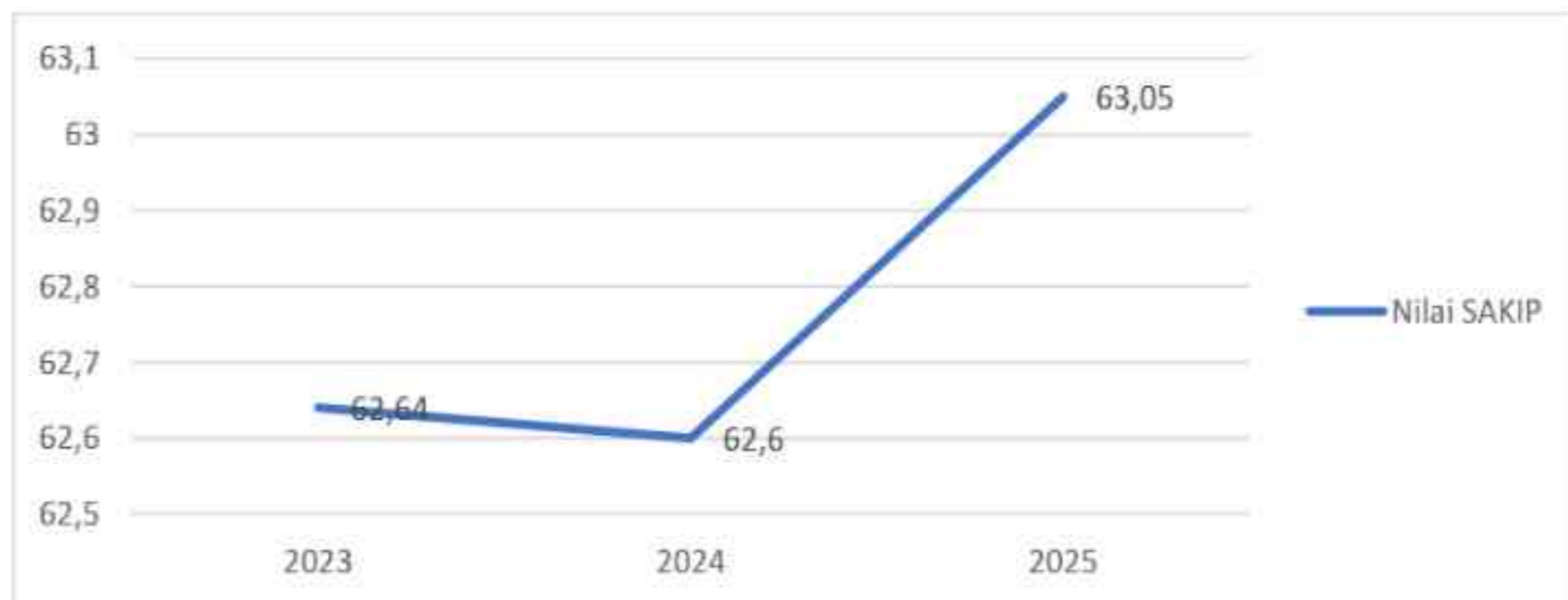
No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
			realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	Realisasi	%	target	realisasi	%
1.	Nilai SAKIP	B	B	100	B	100	B	88	B	63,33	BB	B	63%
2.	Indeks kualitas perencanaan	B	B	100	B	100	B	100	B	100,00	B	B	100%
3.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	Wtp	100%

Sumber data: Bagian Organisasi, Bapperida, BPKAD, data diolah.

(1) Nilai SAKIP

Pada Tahun 2021 dan 2022, Nilai SAKIP berada pada kategori B dengan tingkat capaian 100%, menunjukkan bahwa target tahunan pada periode tersebut dapat terpenuhi secara optimal. Namun, pada Tahun 2023 terjadi penurunan persentase capaian menjadi 88%, meskipun masih berada pada kategori B. Pada Tahun 2024, kategori tetap B dengan capaian sebesar 83,33%, yang mengindikasikan adanya penurunan kinerja dibandingkan dua tahun sebelumnya. Memasuki Tahun 2025, target ditingkatkan menjadi kategori BB, namun realisasi masih berada pada kategori B dengan capaian menurun sebesar 63%. Jika dianalisis 3 tahun terakhir nilai SAKIP disajikan pada tabel dibawah ini :

Gambar. III.9
Nilai SAKIP Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2023-2025



Sumber : Penilaian KemenpanRB

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah menyusun strategi guna meningkatkan nilai SAKIP dengan memperbaiki dokumen sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh MENPAN RB yaitu sebagai berikut :

a) Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Melakukan reviu dan penajaman IKU agar lebih berorientasi pada outcome, memenuhi prinsip SMART, serta memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

b) Penguatan Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Menyelaraskan dan memastikan konsistensi antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja, Perjanjian Kinerja, dan dokumen penganggaran,

sehingga terdapat kesinambungan logis antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

c) Perbaikan Pohon Kinerja dan Cascading

Menyusun serta memperbaiki pohon kinerja untuk memastikan hubungan sebab-akibat yang jelas antara sasaran strategis, program, kegiatan, dan indikator kinerja, serta melakukan cascading kinerja sampai pada level individu.

d) Penyempurnaan Sistem Pengukuran Kinerja

Menetapkan formula pengukuran indikator secara jelas, melengkapi data dukung yang valid dan terverifikasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala.

e) Peningkatan Kualitas LKjIP

Menyusun laporan kinerja yang lebih analitis dengan memuat perbandingan target dan realisasi, tren capaian, analisis faktor pendukung dan penghambat, serta rencana tindak lanjut perbaikan.

f) Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi

Menyusun rencana aksi (action plan) atas setiap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dan melakukan pemantauan pelaksanaannya secara periodik oleh pimpinan daerah dan APIP.

(2) Indeks Kualitas Perencanaan

Indeks Kualitas Perencanaan sejak Tahun 2021 hingga 2024 secara konsisten berada pada kategori B dengan capaian 100% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan stabilitas dan konsistensi dalam menjaga kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah agar tetap selaras dengan regulasi dan kebutuhan pembangunan. Pada Tahun 2025, dengan target kategori B, realisasi juga tetap berada pada kategori B dengan capaian 100%. Konsistensi ini mencerminkan bahwa sistem dan mekanisme perencanaan telah berjalan efektif, meskipun ke depan perlu didorong peningkatan kualitas agar dapat naik ke kategori yang lebih tinggi.

(3) Opini BPK

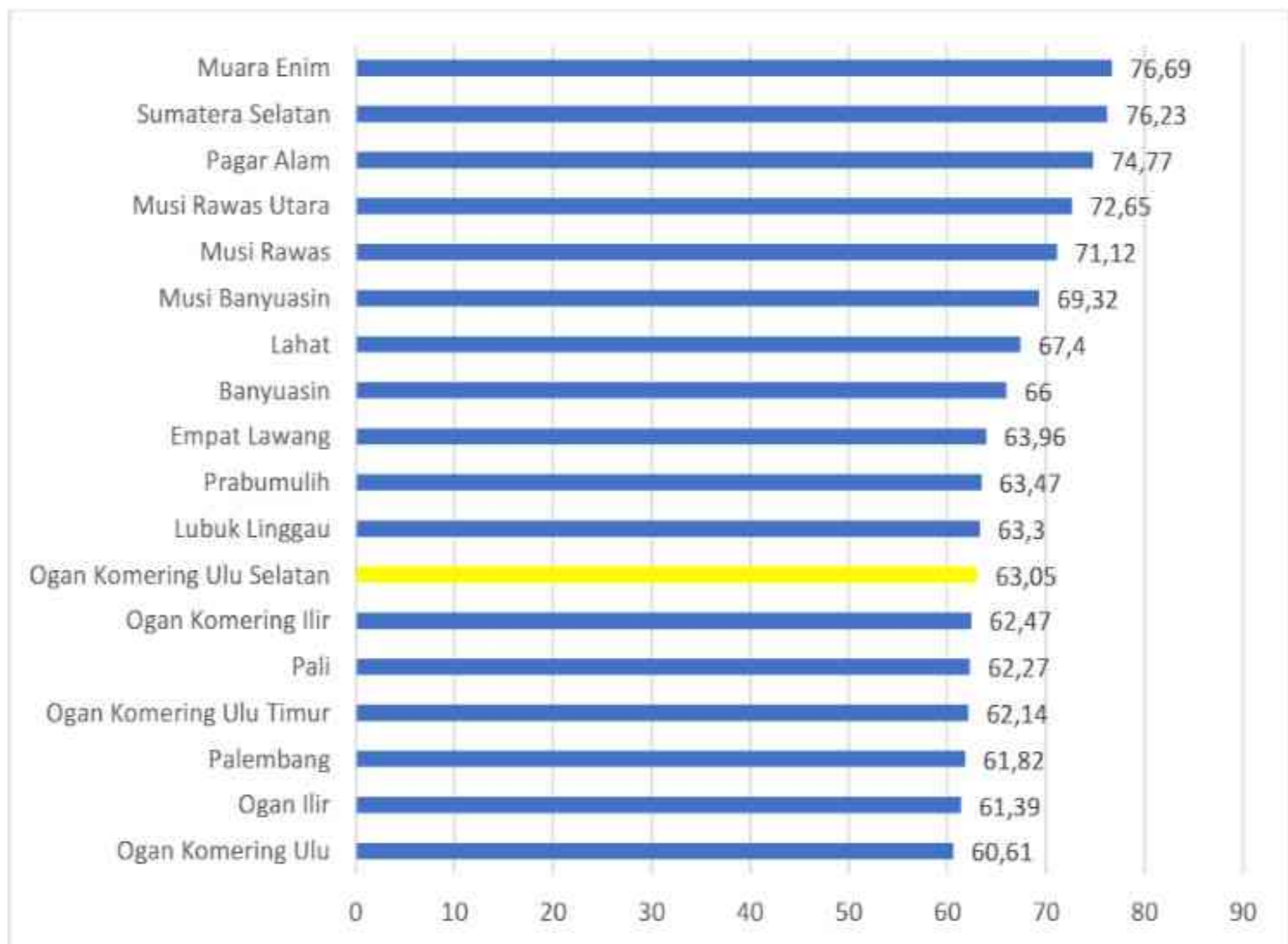
Untuk indikator Opini BPK, sejak Tahun 2021 hingga 2024 Pemerintah Daerah secara konsisten memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan capaian 100% setiap tahun. Capaian ini menunjukkan pengelolaan

keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan standar pemeriksaan. Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan tetap WTP, dan realisasi kembali berhasil mempertahankan opini WTP dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Indeks SAKIP Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar.10

Nilai SAKIP Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025



Sumber : Penilaian KemenpanRB

Berdasarkan grafik tersebut, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mencatatkan nilai sebesar 63,05, yang menempatkannya pada posisi kelompok menengah di antara kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Selatan. Capaian ini berada sedikit di bawah Kota Prabumulih (63,47) dan Lubuk Linggau (63,30), namun masih lebih tinggi dibandingkan Ogan Komering Ilir (62,47), PALI (62,27), Ogan Komering Ulu Timur (62,14), Palembang (61,82), Ogan Ilir (61,39), serta Ogan Komering Ulu (60,61). Meskipun demikian, nilai tersebut

masih terpaut cukup jauh dari rata-rata Provinsi Sumatera Selatan (76,23) dan kabupaten dengan capaian tertinggi seperti Muara Enim (76,69) dan Musi Rawas Utara (72,65), sehingga meskipun kinerja Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah berada pada tingkat yang relatif kompetitif di antara beberapa daerah setara, masih diperlukan upaya peningkatan yang lebih terarah dan sistematis pada indikator-indikator strategis agar mampu meningkatkan daya saing dan mendekati capaian rata-rata provinsi maupun daerah dengan performa terbaik pada periode selanjutnya.

Secara umum, hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terhadap Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan capaian yang sangat positif dan merata, di mana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tidak terdapat lagi perbedaan kategori opini seperti WDP, TW, maupun TMP, sehingga secara komparatif tidak ada disparitas kualitas opini antar daerah.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.23
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Transparansi Dan Akuntabilitas

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi	Keterangan
			Jumlah	Realisasi Anggaran		
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas	87,63	Rp9.776.275.940,00	Rp8.170.985.811,00	1,04	<u>Efisien</u>

Sumber data: Bagian Organisasi, Bapperida, BPKAD, data diolah.

Berdasarkan tabel tersebut, sasaran Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas memperoleh rata-rata capaian indikator sebesar 87,63 dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.776.275.940,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp8.170.985.811,00. Tingkat efisiensi tercatat sebesar 1,04 dengan keterangan efisien, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan mampu mencapai kinerja yang tinggi dengan pemanfaatan anggaran yang optimal dan terkendali. Anggaran pendukung capaian sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas melalui :

- a) Nilai SAKIP dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp145.328.500,00 dan terealisasi sebesar Rp137.406.000,00 atau tercapai 95%.
- b) Indeks Kualitas Perencanaan dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp2.994.601.729,00 dan terealisasi sebesar Rp2.877.876.114,00 atau tercapai 96%.
- c) Opini BPK dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp9.630.947.440,00 dan terealisasi sebesar Rp8.033.579.811,00 atau tercapai 83%.

2) Sasaran 2.2 Meningkatnya Pelayanan Publik

Pencapaian kinerja pada sasaran 2.2, yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik terdapat dua indikator utama yang menjadi tolok ukur pencapaian sasaran yaitu indeks kepuasan masyarakat dan indeks inovasi daerah pada tabel berikut:

Tabel III.24

Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	70,5	83,74	119%	84,78	119%
2.	Skor indeks inovasi daerah	Nilai	Inovatif	38,33 (Kurang Inovatif)	67%	46,41 (inovatif)	67%
Rata-rata capaian					93%		93 %

Sumber : Bagian Organisasi, BAPPERIDA, data diolah.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, terdapat dua indikator utama yang menjadi tolok ukur pencapaian sasaran yaitu indeks kepuasan masyarakat dan indeks novasi daerah. Rata-rata capaian kedua indikator pada Tahun 2025 adalah sebesar 93%, yang mencerminkan kinerja pada kategori sangat baik. Penjabaran setiap indikator adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan sebesar 70,5 dan berhasil direalisasikan sebesar 83,74, sehingga tingkat capaian mencapai 119% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan telah melampaui standar kinerja yang direncanakan. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 84,78, terjadi sedikit penurunan nilai, namun secara substansi masih berada pada kategori sangat baik dan tetap melampaui target akhir RPJMD Tahun 2025 dengan persentase capaian sebesar 119%. Hal ini mengindikasikan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan, meskipun tetap diperlukan upaya peningkatan berkelanjutan untuk mempertahankan tren positif tersebut.
- b. Skor Indeks Inovasi Daerah menunjukkan capaian yang belum optimal. Dari target yang telah ditetapkan (kategori inovatif), realisasi Tahun 2025 tercatat sebesar 38,33 dengan kategori kurang inovatif dan persentase capaian sebesar 67%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 46,41 (kategori inovatif), terlihat adanya penurunan yang cukup signifikan baik dari sisi skor maupun kategori. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam penguatan ekosistem inovasi daerah, baik dari aspek regulasi, dukungan anggaran, kelembagaan, maupun implementasi dan pelaporan inovasi. Penurunan ini perlu menjadi perhatian khusus karena berdampak pada daya saing dan kemampuan daerah dalam menciptakan terobosan pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.25
perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 -2025

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Indikator										
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
			realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	target	realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	84,19	100	81,29	115,8	83,15	118,3	84,78	120,43	70,5	83,74	119%
2	Skor Indeks Inovasi Daerah	550	550	100	32,44	4,63	42,04	105,1	46,41	103,13	Inovatif	38,33 (Kurang Inovatif)	33%

Sumber : Bagian Organisasi, BAPPERIDA, data diolah.

(1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang relatif stabil dan berada pada kategori sangat baik. Pada Tahun 2021 realisasi sebesar 84,19 dengan capaian 100%, kemudian pada Tahun 2022 terealisasi 81,29 dengan persentase 115,8%. Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 83,15 dengan capaian 118,3%, dan kembali meningkat pada Tahun 2024 menjadi 84,78 dengan persentase 120,43% yang merupakan capaian tertinggi selama periode tersebut. Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 70,5 dan terealisasi 83,74 sehingga capaian mencapai 119%. Meskipun secara angka sedikit lebih rendah dibanding Tahun 2024, realisasi Tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik karena melampaui target secara signifikan. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penambah Perangkat Daerah yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat. Hal ini mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui rencana aksi yang terarah dan berkelanjutan, antara lain: penguatan standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) pada seluruh perangkat daerah; optimalisasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan transparansi layanan; penguatan fungsi pengawasan internal serta tindak lanjut hasil evaluasi dan survei kepuasan masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang ramah, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat; pengembangan inovasi pelayanan publik di setiap unit kerja; serta peningkatan keterbukaan informasi publik melalui digitalisasi layanan dan penguatan kanal pengaduan masyarakat agar responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

(2) Skor Indeks Inovasi Daerah

Perkembangan Skor Indeks Inovasi Daerah menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada Tahun 2021 realisasi sebesar 550 dengan capaian 100% sesuai kondisi awal RPJMD. Namun pada Tahun 2022 terjadi penurunan signifikan dengan realisasi 32,44 dan persentase 4,63%. Tahun 2023 mengalami perbaikan menjadi 42,04 dengan capaian 105,1%, kemudian meningkat lagi pada Tahun 2024 menjadi 46,41 dengan persentase 103,13% dan masuk kategori inovatif. Pada Tahun 2025 ditargetkan berada pada kategori inovatif, namun realisasi sebesar 38,33 masih berada pada kategori kurang inovatif dengan capaian 33%. Hal ini karena beberapa inovasi pada perangkat daerah urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri dari urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan sosial, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten OKU Selatan belum memenuhi data dukung/indikator inovasi daerah yang telah ditetapkan sehingga mengurangi bobot penilaian.

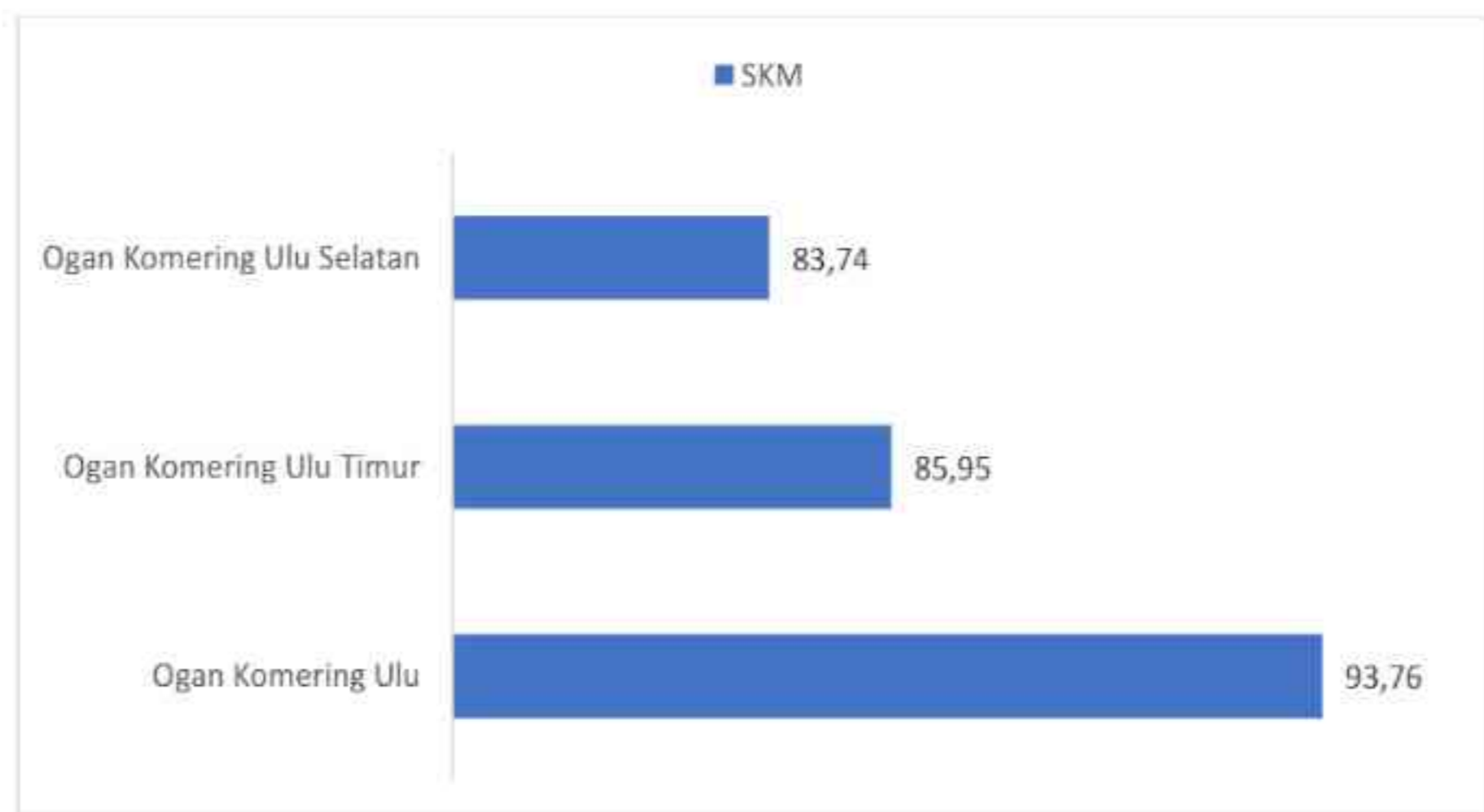
Penurunan ini menunjukkan perlunya penguatan kembali ekosistem inovasi daerah, baik dari aspek kebijakan, dukungan program, pelaporan inovasi, maupun komitmen perangkat daerah agar capaian inovasi dapat kembali meningkat dan konsisten pada kategori inovatif.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara konsisten menyelenggarakan kompetisi inovasi daerah bertajuk “KRENOVA” (Kreasi Inovasi Daerah) sebagai upaya mendorong semangat berkreasi dan budaya inovatif di lingkungan perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring dan mengembangkan berbagai inovasi, baik dalam aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, KRENOVA juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi terkait pengukuran Indeks Inovasi Daerah serta meningkatkan pemahaman teknis mengenai tata cara pelaporan inovasi agar lebih sistematis dan

terstandar. Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi, kompetisi ini memberikan penghargaan khusus kepada perangkat daerah dengan inovasi terbaik, sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas dan keberlanjutan inovasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Apabila diperbandingkan, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Kabupaten Sekitar yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Ogan Komering Ulu Selatan memiliki nilai terendah dibandingkan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Gambar III.11
Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025



Sumber : Bagian Organisasi, data diolah

Untuk Indeks Inovasi Daerah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masuk kedalam 100 Kabupaten dan satu-satunya Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapatkan nilai Kurang Inovatif.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.26

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi	Keterangan
			Jumlah	Realisasi Anggaran		
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	93,0%	Rp403.407.500,00	Rp448.419.582,00	1,04	Efisien

Sumber : Bagian Organisasi, BAPPERIDA, data diolah.

Berdasarkan tabel tersebut, sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik menunjukkan rata-rata capaian indikator sebesar 93,0%, yang mengindikasikan kinerja berada pada kategori sangat baik. Untuk mendukung pencapaian tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp463.407.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp448.419.582,00. Tingkat efisiensi tercatat sebesar 1,04 dengan keterangan efisien, yang berarti pelaksanaan program dan kegiatan mampu mencapai target kinerja secara optimal dengan pemanfaatan anggaran yang terkendali dan tidak melebihi pagu yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya dalam mendukung peningkatan pelayanan publik telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Anggaran pendukung capaian sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas melalui :

- a) Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat, Anggaran Rp 51.516.500,00 mendapat realisasi Rp38.166.500,00 sehingga capaian sebesar 74 %.
- b) Untuk Skor Indeks Inovasi Daerah, Anggaran awal Rp411.891.000,00 mendapat realisasi Rp410.253.082,00 dengan capaian 99 %.

3) Sasaran 2.3 Meningkatnya Profesionalisme Dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah.

Pada sasaran meningkatnya profesionalisma dan integritas aparatur pemerintah daerah terdapat 1 indikator yaitu nilai maturitas SPIP,

Tabel III.27

Capaian sasaran 3 “ Meningkatkan Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah”

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	Skor maturitas SPIP	Nilai	3,3	3,04	92%	3,04	92%

Sumber : Inspektorat, data diolah.

Berdasarkan tabel tersebut, indikator Skor Maturitas SPIP pada Tahun 2025 memiliki target sebesar 3,3 dengan satuan nilai. Realisasi yang dicapai sebesar 3,04, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada 92% dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, nilai yang diperoleh pada Tahun 2025 masih sama, yaitu 3,04, yang menunjukkan belum adanya peningkatan skor maturitas SPIP secara signifikan. Terhadap target akhir RPJMD Tahun 2025, capaian juga berada pada angka 92%, yang berarti masih terdapat selisih sebesar 8% untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek perencanaan pengendalian, manajemen risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.28

Perbandingan Realisasi Dan Capaian Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Indikator										
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
			realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	target	realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14%
1.	Skor maturitas SPIP	3	2	66,67	2,86	92,13	3,003	96,9	3,04	98,00	3,3	3,04	92%

Sumber : Inspektorat, data diolah.

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program, Skor Maturitas SPIP menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten sejak awal periode RPJMD. Pada kondisi awal RPJMD, skor berada pada angka 3. Tahun 2021 realisasi mencapai 2 atau 66,67%, yang masih berada di bawah kondisi awal. Namun demikian, pada Tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan menjadi 2,86 dengan capaian 92,13%. Perbaikan berlanjut pada Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 3,003 atau 96,9%, yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern semakin membaik dan mendekati target yang direncanakan. Pada Tahun 2024, skor meningkat menjadi 3,04 dengan capaian 95,00%, memperlihatkan stabilitas dan penguatan implementasi SPIP. Sementara itu, pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 3,3, dengan realisasi 3,04 atau 92% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun skor telah mengalami peningkatan dibandingkan awal periode, namun pada akhir periode RPJMD masih terdapat selisih sekitar 8% untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, tren kinerja Skor Maturitas SPIP menunjukkan arah yang positif dan progresif, meskipun peningkatan pada dua tahun terakhir relatif stagnan sehingga diperlukan penguatan lebih lanjut.

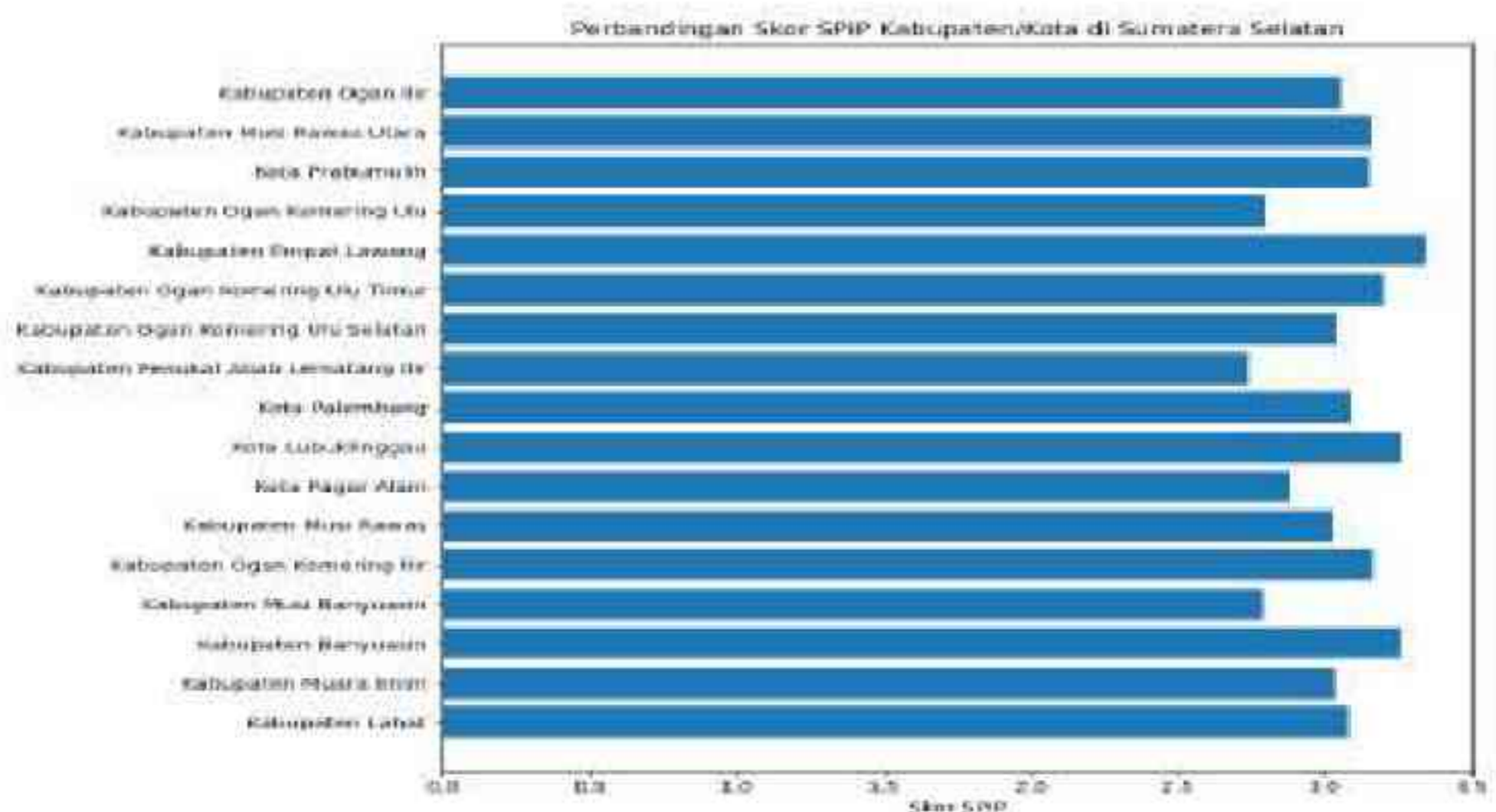
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah melakukan beberapa rekomendasi yang diberikan oleh BPKP salah satunya adalah dengan mengadakan Bimbingan Teknis Maturitas SPIP bersama BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui Inspektorat akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketidaksesuaian pada Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Berdasarkan data skor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, terlihat bahwa sebagian besar daerah telah berada pada kisaran nilai di atas 3, yang menunjukkan tingkat maturitas SPIP yang relatif baik. Kabupaten Empat Lawang memiliki skor tertinggi yaitu 3,337, diikuti oleh Kabupaten Banyuasin dengan skor 3,255 dan Kota Lubuklinggau sebesar 3,257. Sementara itu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memperoleh skor 3,198, Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 3,163, dan Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 3,161. Adapun Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memperoleh skor 3,040, yang

menempatkannya pada kelompok daerah dengan tingkat maturitas SPIP yang cukup baik. Nilai ini menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar dapat mencapai tingkat maturitas yang lebih tinggi. Di sisi lain, beberapa daerah memiliki nilai yang relatif lebih rendah, seperti Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan skor 2,740, Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 2,797, serta Kota Pagar Alam sebesar 2,881.

Gambar III.12

Perbandingan Skor SPIP Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan



Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.29

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi	Keterangan
			Jumlah	Realisasi Anggaran		
1	Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah	92,0%	Rp29.418.000,00	Rp29.000.000,00	0,93	Tidak Efisien

Sumber : Inspektorat, data diolah.

Berdasarkan tabel tersebut, sasaran “Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah” memiliki rata-rata capaian indikator sebesar 92,0%, yang menunjukkan bahwa secara kinerja program telah

terlaksana dengan kategori baik karena mendekati target yang ditetapkan. Dari sisi anggaran, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp29.418.000,00, dengan realisasi sebesar Rp29.000.000,00 atau terserap hampir seluruhnya. Nilai efisiensi tercatat sebesar 0,93, dengan keterangan Tidak Efisien. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat serapan anggaran cukup tinggi dan capaian kinerja mendekati target, perbandingan antara output yang dihasilkan dengan penggunaan anggaran belum menunjukkan tingkat efisiensi yang optimal. Dengan demikian, ke depan perlu dilakukan optimalisasi perencanaan dan pemanfaatan anggaran agar capaian kinerja yang tinggi dapat diimbangi dengan tingkat efisiensi yang lebih baik.

3. Tujuan 3 : Meningkatkan akses pendidikan berkualitas

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut terdapat 3 indikator yang harus dicapai yaitu sebagai berikut :

Tabel. III.30

Capaian Tujuan ” Meningkatkan akses pendidikan berkualitas”

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	Indeks Pembangunan Manusia	persen	68,94	70,98	103%	70	103%
2.	Angka rata-rata lama sekolah	persen	8,79	8,48	96%	8,25	96%
3.	Angka harapan lama sekolah	persen	11,97	12,02	100%	11,82	100%

Sumber data: BPS, data diolah.

Berdasarkan tabel capaian indikator tujuan tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 ditetapkan target sebesar 68,94, dengan realisasi mencapai 70,98. Realisasi tersebut menunjukkan capaian sebesar 103%, yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan atau capaian sangat baik. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 70, maka pada tahun 2025 terjadi peningkatan nilai IPM. Capaian ini juga telah memenuhi target akhir RPJMD tahun 2025 dengan persentase capaian 103%.

- b. Untuk indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 8,79 tahun, dengan realisasi sebesar 8,48 tahun atau 96% dari target dengan capaian baik. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 8,25 tahun, indikator ini tetap menunjukkan peningkatan capaian. Persentase capaian terhadap target akhir RPJMD tahun 2025 juga berada pada angka 96%.
- c. Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 11,97 tahun dan berhasil direalisasikan sebesar 12,02 tahun, sehingga mencapai 100% dari target dengan capaian baik. Realisasi tersebut juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 11,82 tahun, serta telah memenuhi target akhir RPJMD tahun 2025 dengan capaian 100%.

Secara umum, capaian indikator pembangunan manusia pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik, ditandai dengan meningkatnya nilai IPM serta membaiknya indikator pendidikan, yaitu Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah, dibandingkan tahun sebelumnya.

1) Sasaran 3.1 strategis Meningkatkan akses pendidikan berkualitas

Pada sasaran " Meningkatkan akses pendidikan berkualitas" terdapat 5 indikator yaitu sebagai berikut :

**Tabel III.31
Perbandingan Realisasi Dan Capaian Tahun 2021 -2025**

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Indikator										
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
			realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	target	realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14%
1.	APM SD/MI	99,04	89,27	90,14	99,94	100,87	99,6	100,48	95,25	95,05	99,24	99,57	100%
2.	APM SMP/MTs	78,7	61,8	78,53	80,2	101,88	80,14	101,78	80,42	102,11	78,8	72,35	92%
3.	APM SMA/SMK/MA	62	54	87,1	61,5	98,56	56,94	90,67	59,43	94,41	63,2	56,05	90%
4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	51,1	44,71	87,5	44,24	80,69	44,76	76,12	67,65	107,18	67,73	40,76	60%
5.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	N/A	75	100	48,69	102,51	65	131,31	143,59223	143,59	53,5	61,25	114%

Sumber : dinas pkbppa & Dinas Pendidikan, 2025

Berdasarkan capaian indikator kinerja program bidang pendidikan Tahun 2021–2025, dapat disampaikan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 99,24% dengan realisasi 99,57%, sehingga capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 95,25%, indikator ini menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Tingginya capaian APM SD/MI didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar serta berbagai program pemerintah yang menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah, seperti bantuan operasional sekolah, dukungan sarana prasarana pendidikan, serta penyediaan layanan pendidikan dasar yang relatif merata hingga ke wilayah kecamatan dan desa. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dapat mempengaruhi capaian indikator ini, antara lain kondisi geografis wilayah yang cukup luas sehingga menyulitkan akses bagi sebagian masyarakat, serta adanya perpindahan domisili penduduk yang menyebabkan anak usia sekolah tercatat bersekolah di luar wilayah.

Pada indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 78,8% dengan realisasi sebesar 72,35%, sehingga capaian mencapai 92% dari target. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 80,42%, terjadi penurunan tingkat partisipasi pada jenjang pendidikan menengah pertama. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya masih adanya lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs karena keterbatasan kondisi ekonomi keluarga maupun pilihan untuk membantu pekerjaan orang tua. Selain itu, persebaran fasilitas pendidikan menengah pertama yang belum merata di beberapa wilayah juga menjadi salah satu kendala. Meskipun demikian, upaya pemerintah daerah melalui program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu serta peningkatan sarana prasarana pendidikan terus dilakukan untuk mendorong peningkatan partisipasi pendidikan pada jenjang ini.

Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 63,2% dengan realisasi sebesar 56,86%, sehingga capaian indikator ini mencapai 90% dari target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 59,48%, terjadi penurunan tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang menengah atas. Penurunan ini

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya kecenderungan sebagian lulusan SMP yang memilih untuk langsung bekerja atau tidak melanjutkan pendidikan karena alasan ekonomi. Selain itu, jarak tempuh menuju sekolah menengah atas yang relatif jauh di beberapa wilayah juga menjadi faktor yang mempengaruhi minat melanjutkan pendidikan. Meskipun demikian, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan akses pendidikan menengah melalui dukungan program beasiswa, peningkatan fasilitas pendidikan, serta pengembangan pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan lulusan.

Pada indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 67,73%, namun realisasi yang dicapai sebesar 40,76% sehingga capaian hanya 60% dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 67,65%, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada indikator ini. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain belum meratanya ketersediaan lembaga PAUD di seluruh wilayah, keterbatasan tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi, serta masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini. Di samping itu, sebagian orang tua masih memilih untuk langsung memasukkan anak ke jenjang pendidikan dasar tanpa melalui layanan PAUD. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi serta penguatan kelembagaan PAUD agar partisipasi pendidikan usia dini dapat meningkat.

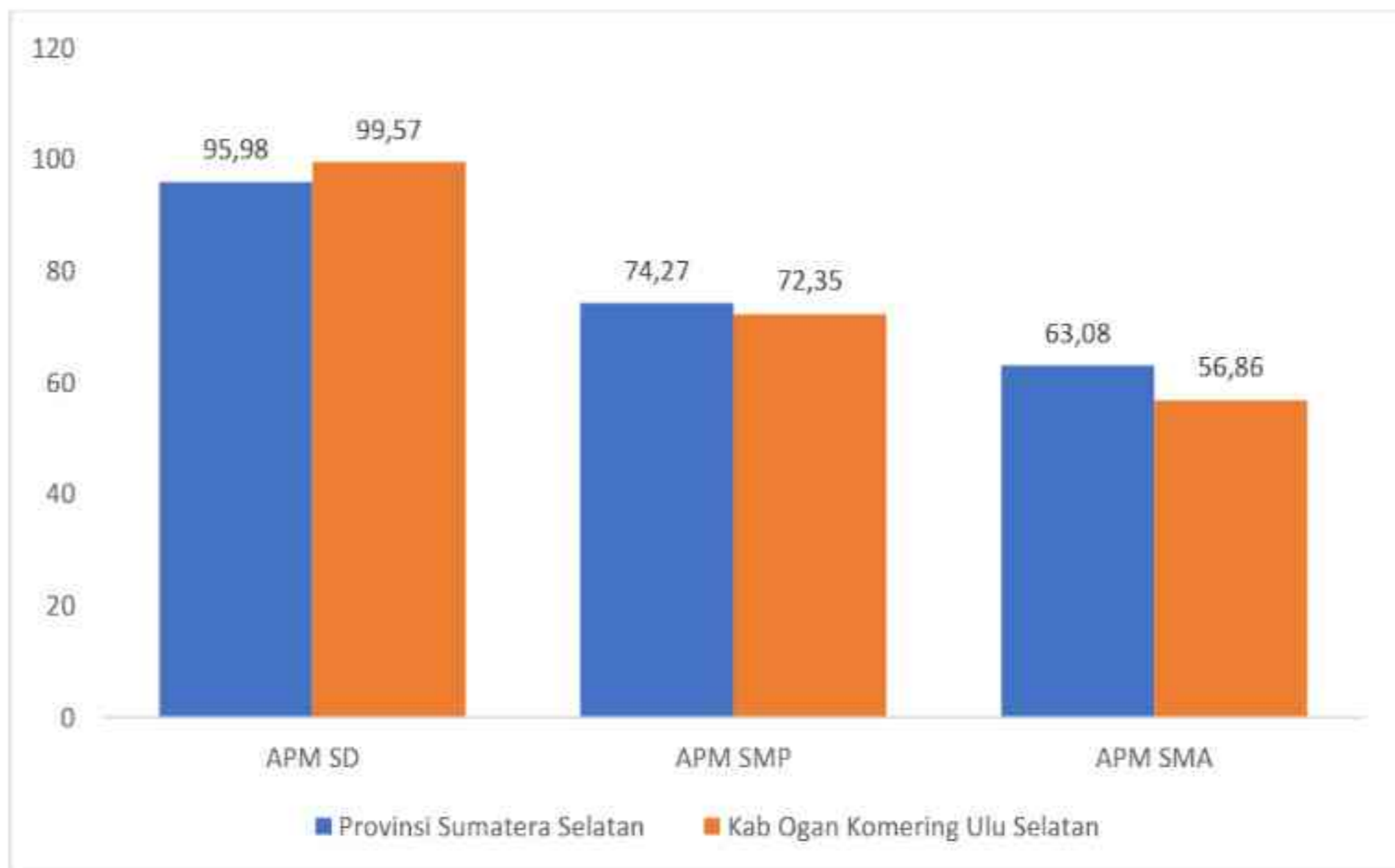
Adapun pada indikator nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 53,5 dengan realisasi sebesar 61,25, sehingga capaian mencapai 114% dan melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian sangat baik. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat cukup baik, yang didukung oleh berbagai program literasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, peningkatan akses terhadap bahan bacaan melalui perpustakaan daerah maupun perpustakaan sekolah, serta pemanfaatan teknologi digital yang semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan bahan bacaan. Meskipun demikian, upaya peningkatan budaya literasi tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan, mengingat masih terdapat keterbatasan fasilitas perpustakaan dan koleksi bahan bacaan di beberapa wilayah serta adanya pengaruh

penggunaan media hiburan digital yang dapat mengurangi minat membaca masyarakat.

Untuk dapat melihat perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP dan SMA antara Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

Gambar III.13

Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP dan SMA antara Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan grafik perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA antara Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan, terlihat bahwa capaian partisipasi pendidikan pada setiap jenjang menunjukkan kondisi yang relatif bervariasi. Pada jenjang APM SD, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mencatatkan angka sebesar 99,57%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Selatan yang sebesar 95,98%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sudah sangat baik dan bahkan melampaui capaian tingkat provinsi. Tingginya angka partisipasi ini

mencerminkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah dasar telah mengakses layanan pendidikan dasar secara optimal.

Pada jenjang APM SMP, capaian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 72,35%, sedikit lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Sumatera Selatan sebesar 74,27%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan pada jenjang menengah pertama di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih berada di bawah rata-rata provinsi. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan akses pendidikan di beberapa wilayah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta adanya kecenderungan sebagian anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.

Sementara itu, pada jenjang APM SMA, capaian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 56,86%, juga berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Selatan yang sebesar 63,08%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang menengah atas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih perlu ditingkatkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini antara lain faktor ekonomi keluarga, jarak tempuh menuju sekolah menengah atas yang relatif jauh di beberapa wilayah, serta adanya pilihan sebagian lulusan SMP untuk langsung bekerja atau tidak melanjutkan pendidikan.

Secara umum, perbandingan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah memiliki capaian yang sangat baik pada jenjang pendidikan dasar, namun masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang menengah pertama dan menengah atas. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.32
Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran Mewujudkan
Meningkatnya akses pendidikan berkualitas

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi	Keterangan
			Jumlah	Realisasi Anggaran		
1	Meningkatnya akses pendidikan berkualitas	0,91	Rp19.796.082.040,00	Rp12.053.484.444,00	1,50	Efisien

Sumber : Dinas Pendidikan & Dinas Perpustakaan , 2025

Berdasarkan tabel tersebut, sasaran meningkatnya akses pendidikan berkualitas menunjukkan rata-rata capaian indikator sebesar 0,91, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar indikator yang mendukung sasaran tersebut telah mencapai target yang ditetapkan. Dari sisi penganggaran, pada tahun berjalan dialokasikan anggaran sebesar Rp19.796.082.040,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp12.053.484.444,00. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh anggaran yang dialokasikan terserap, namun program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap mampu menghasilkan capaian kinerja yang cukup baik. Nilai efisiensi tercatat sebesar 1,50 dengan keterangan efisien, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan relatif optimal dibandingkan dengan jumlah anggaran yang direalisasikan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan akses pendidikan berkualitas telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pada Sasaran Meningkatnya akses pendidikan berkualitas, terdapat beberapa indikator kinerja yang didukung oleh alokasi dan realisasi anggaran tahun 2025

- a. Indikator APM SD/MI dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.438.113.270,00 dengan realisaasi sebesar Rp. 8.496.820.852,00 dengan capaian 81,4%.
- b. Indikator SMP/Mts dialokasikan anggaran sebesar Rp3.663.260.270,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.210.875.391,00 dengan capaian 60,35%.
- c. Indikator APM PAUD dialokasikan sebesar Rp5.609.320.500,00 dan realisasi Rp1.260.642.201,00 dengan capaian 22%.

4. Tujuan 4 : Mewujudkan derajat kesehatan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel. III.33

Capaian Tujuan ” Mewujudkan derajat kesehatan Masyarakat”

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,94	70,98	1,03	70	103%
2.	Angka usia harapan hidup	Persen	69,29	68,25	0,98	68,25	98%

Sumber data: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel capaian tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2025, terdapat dua indikator utama yang diukur, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angka Usia Harapan Hidup (UHH). Pada indikator Indeks Pembangunan Manusia, target Tahun 2025 ditetapkan sebesar 68,94 dengan realisasi mencapai 70,98 masuk dalam katagori Cukup. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja sebesar 1,03 atau 103% terhadap target akhir RPJMD Tahun 2025. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 70, terjadi peningkatan sebesar 0,98 poin. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, sehingga indikator ini tidak hanya melampaui target tahunan tetapi juga telah melampaui target akhir RPJMD.

Sementara itu, indikator Angka Usia Harapan Hidup ditargetkan sebesar 69,29 persen pada Tahun 2025, dengan realisasi sebesar 68,25 persen dan dapat dikatagorikan Cukup. Tingkat capaian kinerja sebesar 0,98 atau 98% terhadap target akhir RPJMD 2025. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang juga sebesar 68,25 persen, tidak terdapat peningkatan pada tahun berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih perlu diperkuat, khususnya dalam aspek pelayanan kesehatan preventif, promotif, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 2 sasaran strategis yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga yang masing-masing di jelaskan sebagai berikut:

1) Sasaran 4.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Pada sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat terdapat 6 indikator yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

Tabel III.34
Capain tujuan ” Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	Angka Kesakitan	Persen	12,75	23,55	54%	7,26	54%
2.	Angka kematian bayi	Orang	20	19	105%	15	105%
3.	Angka kematian ibu	Orang	1	5	20%	0	20%
4.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/belita	Persen	2,09	0,78	163%	1,89	163%
5.	Kategori kabupaten/kota sehat (KKS)		Wistara	-	0%	-	0%
6.	Cakupan peserta KB aktif	Jumlah Orang	70,95	66,12	93%	73,01	93%
Rata-rata Capaian					73%		73%

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA, 2025..

Berdasarkan tabel capaian indikator Tahun 2025, terdapat enam indikator yang menggambarkan kinerja pada bidang kesehatan dan pengendalian penduduk. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 73% dengan katagori Cukup. Penjelasan perindikator dalam sasaran ini adalah sebagai berikut :

- a. Angka Kesakitan ditargetkan sebesar 12,75 persen, dengan realisasi mencapai 23,55 persen. Tingkat capaian sebesar 54% atau masuk dalam katagori kurang. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ini belum memenuhi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 7,26 persen, terjadi peningkatan angka kesakitan yang cukup

signifikan, sehingga memerlukan perhatian serius dalam upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan.

- b. Angka Kematian Bayi (AKB) ditargetkan sebanyak 20 orang, dengan realisasi 19 orang. Capaian kinerja mencapai 105% masuk dalam katagori sangat baik, yang berarti target berhasil dilampaui. Dibandingkan Tahun 2024 yang mencatat 15 kasus, terjadi peningkatan jumlah kematian bayi, namun masih berada dalam batas target yang ditetapkan pada Tahun 2025.
- c. Angka Kematian Ibu (AKI) ditargetkan 1 orang, namun realisasi mencapai 5 orang. Tingkat capaian hanya sebesar 20% atau capaian sangat kurang, menunjukkan bahwa indikator ini jauh dari target dan memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan ibu, terutama pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Pada Tahun 2024 tidak terdapat kasus (0), sehingga terjadi kenaikan signifikan pada tahun berjalan.
- d. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita ditargetkan sebesar 2,09 persen, dengan realisasi 0,78 persen. Tingkat capaian mencapai 163%, yang menunjukkan kinerja sangat baik karena prevalensi berhasil ditekan jauh di bawah target. Dibandingkan Tahun 2024 sebesar 1,89 persen, terjadi penurunan yang signifikan.
- e. Kategori Kabupaten/Kota Sehat (KKS) belum menunjukkan capaian (0%), karena belum terdapat penilaian atau hasil yang dapat dilaporkan pada Tahun 2025.
- f. Cakupan Peserta KB Aktif ditargetkan sebesar 70,95 persen, dengan realisasi 66,12 persen. Tingkat capaian sebesar 93% menunjukkan capaian baik. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 73,01 persen, terjadi penurunan cakupan peserta KB aktif.

Perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.35
Perbandingan Realisasi Dan Capaian Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Indikator										
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
			realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	target	realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Angka Kesakitan	16,39	16,95	103,4	21,47	71,88	20,17	71,69	7,26	100	12,75	23,6	54
2.	Angka kematian bayi	40	18	45	9	388,8	10	138,7	15	100	20	19	106
3.	Angka kematian ibu	4	5	125	3	100	2	100	0	100	1	5	20
4.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	22	1,33	6,05	0,34	732,4	1,21	148,4	1,85	100	2,08	0,78	163
5.	Kategori kabupaten/kota sehat (OKS)	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	0,00
6.	Cakupan peserta PK aktif	69,41	69,79	100,6	69,54	98,21	73,08	105,6	73,01	109,47	70,95	66,1	93

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA, data diolah.

a) Angka Kesakitan

Kondisi awal RPJMD sebesar 16,39. Pada Tahun 2021 realisasi sebesar 16,95 kemudian meningkat pada Tahun 2022 menjadi 21,47 dan relatif stabil pada Tahun 2023 sebesar 20,17. Tahun 2024 menunjukkan perbaikan signifikan dengan realisasi 7,26 (100%). Namun pada Tahun 2025, dengan target 12,75, realisasi meningkat menjadi 23,6 sehingga capaian hanya 54%. Peningkatan angka kesakitan tidak selalu semata-mata mencerminkan penurunan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh membaiknya sistem pelaporan dan deteksi kasus. Namun demikian, kondisi ini tetap memerlukan langkah strategis berupa penguatan upaya promotif dan preventif, peningkatan kualitas layanan kesehatan primer, serta intervensi berbasis data untuk mengendalikan faktor risiko penyakit. Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan untuk menurunkan persentase Angka Kesakitan diantaranya:

- 1) Pembangunan fisik mulai dari menambah jumlah poskesdes, polindes dan pustu berdasarkan prioritas;
- 2) Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan di puskesmas, pokesdes, polindes dan pustu.

- 3) Menambah transportasi rujukan berupa mobil ambulans demi menjangkau pelayanan masyarakat di pelosok pedesaan di wilayah Kabupaten OKU Selatan.
- 4) Menambah jumlah tenaga medis teknis seperti tenaga Dokter, ATLM, Sanitarian, Nutrisionis, perawat gigi, apoteker agar pelayanan kesehatan dapat dipertahankan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan.

b) Angka Kematian Bayi (AKB)

Pada Tahun 2025 ditargetkan 20 kasus dengan realisasi 19 kasus dan capaian 105%. Secara keseluruhan, indikator ini menunjukkan tren membaik dibanding dari tahun sebelumnya. Meskipun tetap perlu konsistensi dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tercapainya indikator ini dikarenakan semakin mudahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan adanya program dan program JKN/KIS bersumber dari APBN maupun bersumber APBD melalui program JAMKESDA, Jampersal dan rumah tunggu kelahiran di kab/kota, sudah terbentuknya

Puskesmas PONED, semakin meningkatnya cakupan pemeriksaan bayi baru lahir, cakupan imunisasi yang semakin baik, semakin baiknya cakupan gizi anak bayi dan balita serta semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan diharapkan dapat menurunkan angka kematian bayi. Beberapa faktor penghambat dalam menurunkan angka kematian bayi antara lain kurangnya sarana dan prasarana kegawatdaruratan di Puskesmas, akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan di beberapa daerah masih sulit dijangkau, sistem rujukan maternal dan neonatal yang belum berjalan optimal dan belum meratanya SDM kesehatan yang berkompeten.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi ini karena kematian bayi telah menjadi program prioritas nasional dan merupakan komitmen global yang dicantumkan dalam SDG's (Sustainable Development Goals).

Peranan dan keterlibatan sektor lain untuk ikut serta berperan dalam penurunan angka kematian bayi juga terus ditingkatkan. Beberapa program dan kegiatan yang masih menjadi prioritas untuk masa yang akan datang diantaranya sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelaksanaan pemantauan PWS KIA dan surveilans kematian bayi dan balita di tingkat kabupaten/kota;
- 2) Berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat desa dan kelurahan untuk menyusun strategi perencanaan percepatan penurunan kasus kematian ibu dan bayi;
- 3) Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan sampai dengan tingkat desa dan kelurahan melalui penempatan bidan di setiap desa dan pembangunan Poskesdes;
- 4) Meningkatkan kompetensi/kapasitas teknis tenaga kesehatan dalam hal pelayanan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan dan penanganan bayi baru lahir melalui pelatihan dan pertemuan teknis program;
- 5) Penerapan Program Desa Siaga juga diharapkan akan dapat menekan angka kematian bayi;
- 6) Integrasi BKB (Bina Keluarga Balita), Pendidikan Anak Usia Dina (PAUD) dan Posyandu;

c) Angka Kematian Ibu (AKI)

Pada periode Tahun 2021–2023 masih terdapat kasus kematian ibu. Pada Tahun 2024 capaian menunjukkan perbaikan signifikan karena berhasil ditekan hingga 0 kasus. Namun demikian, pada Tahun 2025 dengan target maksimal 1 kasus, realisasi meningkat menjadi 5 kasus sehingga tingkat capaian hanya sebesar 20%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor medis dan non-medis, antara lain masih ditemukannya kasus perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, serta komplikasi penyakit penyerta yang belum terdeteksi secara dini. Di samping itu, faktor sistem seperti keterlambatan dalam pengambilan keputusan rujukan (three delays), kepatuhan kunjungan Antenatal Care (ANC) yang belum optimal, serta kondisi geografis dengan akses terbatas menuju fasilitas rujukan turut meningkatkan risiko keterlambatan penanganan kegawatdaruratan maternal. Faktor sosial dan budaya dalam proses pengambilan keputusan persalinan juga menjadi salah satu penyebab keterlambatan pelayanan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan deteksi dini kehamilan risiko tinggi, optimalisasi sistem rujukan maternal dan neonatal, serta peningkatan koordinasi lintas sektor guna menekan kembali angka

kematian ibu pada tahun berikutnya. Beberapa program yang masih menjadi prioritas untuk masa yang akan datang adalah :

- 1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya untuk ibu hamil terutama melalui pembangunan Pos Kesehatan Desa dan Pos Kesehatan Kelurahan serta penempatan bidan yang tinggal di desa;
- 2) Pelaksanaan program P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi);
- 3) Kunjungan antenatal pertama (K1) sedapat mungkin dilakukan pada trimester pertama, guna mendorong peningkatan cakupan kunjungan antenatal empat kali (K4);
- 4) Pelayanan KB harus ditingkatkan guna mengurangi faktor risiko 4 terlalu (terlalu muda, terlalu sering, terlalu rapat dan terlalu tua);
- 5) Pelaksanaan Ante Natal Care (ANC) yang terintegrasi untuk ibu hamil, termasuk pemeriksaan HIV/AIDS, Malaria, Cacingan dan penyakit infeksi menular lainnya secara terintegrasi dan pelaksanaan kelas ibu hamil dengan melibatkan keluarga dan masyarakat;
- 6) Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di tingkat kabupaten/kota;
- 7) Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam kesehatan reproduksi responsive gender harus ditingkatkan untuk meningkatkan Health Care Seeking Behaviour.

d) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)

Pada balita Kondisi awal RPJMD sebesar 22%. Sejak Tahun 2021 realisasi berhasil ditekan menjadi 1,33%, Tahun 2022 sebesar 0,34%, Tahun 2023 sebesar 1,21%, dan Tahun 2024 sebesar 1,89%. Pada Tahun 2025 ditargetkan 2,09% dengan realisasi 0,78% dan capaian 163%. Indikator ini menunjukkan kinerja sangat baik dan konsisten berada jauh di mencerminkan keberhasilan intervensi percepatan penurunan stunting. Keberhasilan ini bersumber dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan antara lain adalah :

Gambar III.14

Program Penunjang Penurunan Stunting

No	Nama Program	Keterangan
1.	Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting;	
2.	Dashat: Dapur Sehat Atasi Stunting;	
3.	Borgibor Patin : Berantas Gizi Buruk melalui Calon Pasangan Pengantin	
4.	Pendampingan Calon Pengantin dg mengisi Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap nikah Siap Hamil)	

e) Kategori Kabupaten/Kota Sehat (KKS)

Selama periode 2021–2024 belum terdapat capaian yang dapat dilaporkan. Pada Tahun 2025 ditargetkan meraih kategori Wistara, namun belum terealisasi (0%). Hal ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dan pemenuhan indikator penilaian KKS. Pemerintah Kabupaten OKU Selatan berupaya keras memperbaiki hasil dalam ajang Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) beberapa program kerja dilakukan diantaranya, Rapat Koordinasi penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) bersama Perangkat Daerah terkait membahas mengenai Sembilan tatanan Kabupaten Kota Sehat (KKS) kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, Permukiman dan fasilitas umum, Pendidikan, Pasar, Pariwisata, Transportasi dan tertib lalu lintas, Perkantoran dan industri, Perlindungan sosial serta Penjagaan dan penanganan bencana. Meskipun hasil penilaian dari pemerintah pusat belum optimal, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan berkomitmen untuk meningkatkan tatanan lingkungan dan kesehatan Masyarakat agar kedepan lebih baik lagi.

f) Cakupan Peserta KB Aktif

Kondisi awal RPJMD sebesar 69,41%. Tahun 2021 realisasi sebesar 69,79% (100,6%), Tahun 2022 sebesar 68,54% (98,21%), Tahun 2023 meningkat menjadi 73,08% (105,6%), dan Tahun 2024 sebesar 73,01% (103,47%). Namun pada Tahun 2025, dengan target 70,95%, realisasi menurun menjadi 66,1% sehingga capaian 93%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan partisipasi peserta KB aktif pada tahun berjalan.

Terjadi penurunan jumlah peserta KB aktif pada tahun berjalan. Kondisi ini disebabkan antara lain karena sebagian akseptor telah menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dengan masa perlindungan yang masih berlaku, sehingga tidak tercatat sebagai peserta baru atau tidak melakukan kunjungan ulang dalam periode pelaporan. Selain itu, adanya peserta yang telah menyelesaikan masa subur atau memilih menghentikan penggunaan kontrasepsi juga turut memengaruhi tingkat partisipasi KB aktif pada tahun ini.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara konsisten melaksanakan kegiatan rutin sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan capaian peserta KB aktif, salah satunya melalui penyelenggaraan pelayanan

KB gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keluarga berencana, terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu, serta mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi pasangan usia subur dalam program KB. Melalui pelayanan gratis tersebut, diharapkan jumlah peserta KB aktif dapat terjaga dan meningkat secara berkelanjutan.

Gambar III.15
Kegiatan Pelayanan KB Gratis



Sumber : Dinas PPKBPPPA

Perbandingan antar indikator dengan data nasional dan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut

- a. Angka Kesakitan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tercatat sebesar 23,55%. Jika dibandingkan dengan angka kesakitan nasional yang sebesar 12,5%, capaian tersebut masih relatif lebih tinggi sehingga menunjukkan bahwa beban kesakitan di daerah masih perlu mendapat perhatian dan penguatan intervensi kesehatan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan angka kesakitan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 27,16%, kondisi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih berada pada tingkat yang lebih baik karena berada di bawah rata-rata provinsi. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa meskipun posisi kabupaten lebih baik dibandingkan capaian provinsi, upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, promotif, dan preventif tetap perlu dioptimalkan agar kesenjangan dengan capaian nasional dapat diperkecil.
- b. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tercatat sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup. Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada pada kisaran $\pm 16-17$ per 1.000 kelahiran hidup, angka tersebut masih relatif lebih tinggi. Namun, jika

dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Selatan yang berada pada kisaran $\pm 20-22$ per 1.000 kelahiran hidup, capaian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih relatif lebih baik karena berada di bawah rata-rata provinsi.

- c. Apabila dibandingkan dengan prevalensi stunting nasional sebesar 19,8% (hasil SSGI 2024 yang dirilis tahun 2025), capaian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berada jauh di bawah rata-rata nasional, sehingga menunjukkan kondisi yang sangat baik serta efektivitas intervensi percepatan penurunan stunting di daerah. Demikian pula jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 15,9%, angka 0,7% juga berada jauh lebih rendah dari rata-rata provinsi. Hal ini menempatkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada posisi yang sangat unggul dalam pengendalian dan pencegahan stunting.
- d. Angka kematian ibu serta cakupan layanan KB tidak dapat diperbandingkan karena keterbatasan data yang tersedia.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.36
Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi	Keterangan
			Jumlah	Realisasi Anggaran		
1	Mewujudkan derajat kesehatan Masyarakat	73,00	Rp8.119.702.950,00	Rp7.572.215.798,00	0,78	Tidak Efisien

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA, 2025

Pada sasaran “Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat”, rata-rata capaian indikator kinerja mencapai 73,00. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp8.119.702.950,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.572.215.798,00 atau sekitar 93,25% dari pagu yang tersedia. Adapun nilai efisiensi tercatat sebesar 0,78, yang dalam tabel dikategorikan sebagai tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi anggaran cukup tinggi dan capaian indikator telah mencapai 73,00, tingkat optimalisasi penggunaan anggaran terhadap hasil

yang diperoleh masih belum maksimal. Pada Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, terdapat beberapa indikator kinerja yang didukung oleh alokasi dan realisasi anggaran tahun 2025.

- a. Angka Kesakitan dialokasikan anggaran sebesar Rp3.220.470.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.153.245.500,00, atau mencapai 98%. Hal ini menunjukkan penyerapan anggaran yang sangat optimal dalam mendukung upaya penurunan angka kesakitan.
- b. Angka Kematian Bayi memperoleh anggaran sebesar Rp109.488.100,00 dengan realisasi Rp90.885.498,00, atau sebesar 83%. Realisasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap.
- c. Angka Kematian Ibu dialokasikan sebesar Rp372.720.450,00 dengan realisasi Rp216.406.300,00, atau sebesar 58%. Persentase ini tergolong lebih rendah dibanding indikator lainnya, sehingga perlu evaluasi lebih lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan yang mendukung penurunan kematian ibu.
- d. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita didukung anggaran sebesar Rp3.020.210.000,00 dengan realisasi Rp2.718.688.000,00, atau sebesar 90%, yang menunjukkan tingkat serapan anggaran yang cukup baik.
- e. Kategori Kabupaten/Kota Sehat (KKS) memiliki alokasi sebesar Rp34.224.400,00 dengan realisasi Rp30.400.500,00, atau sebesar 89%, yang mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang relatif optimal.
- f. Cakupan Peserta KB Aktif dialokasikan anggaran sebesar Rp1.362.590.000,00 dan terealisasi seluruhnya sebesar Rp1.362.590.000,00, atau mencapai 100%, yang menunjukkan pengelolaan anggaran yang sangat optimal pada indikator ini.

2) Sasaran 4.2 Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga

Pada sasaran Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga terdapat 1 indikator yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

Tabel III.37

Capain tujuan ” Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga”

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	Peringkat pada porprov	Peringkat	3	17	17%	5	17%

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pada tahun 2025, indikator peringkat pada Porprov ditetapkan dengan target peringkat 3. Namun, realisasi yang dicapai adalah peringkat 17, sehingga tingkat capaian kinerja baru mencapai 17% atau masuk dalam katagori sangat kurang. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang berada pada peringkat 5, capaian tahun 2025 menunjukkan penurunan peringkat yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga daerah belum berjalan optimal sesuai dengan target RPJMD Tahun 2025. Secara keseluruhan, capaian terhadap target akhir RPJMD (2025) juga tercatat sebesar 17%, yang berarti tujuan peningkatan prestasi pemuda dan olahraga masih memerlukan perhatian dan strategi perbaikan yang lebih terarah.

Perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.38

Perbandingan Realisasi Dan Capaian Meningkatnya Prestasi Pemuda Dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
			realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	Realisasi	%	target	realisasi	%
1.	Peringkat pada porprov	3	3	100	N/A	N/A	5	60	-	n/a	3	17	18%

Indikator kinerja program Peringkat pada Porprov pada awal periode RPJMD berada pada posisi peringkat 3 sebagai kondisi kinerja awal. Pada Tahun 2021, realisasi berhasil mempertahankan peringkat 3 dengan tingkat

capaian 100%, yang menunjukkan kesesuaian antara target dan hasil yang dicapai. Pada Tahun 2022, data realisasi tidak tersedia (N/A), sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian pada tahun tersebut karena Porprov merupakan even 2 tahun sekali. Selanjutnya pada Tahun 2023, realisasi berada pada peringkat 5 dengan capaian sebesar 60%, yang menunjukkan adanya penurunan prestasi dibandingkan kondisi sebelumnya. Memasuki Tahun 2025 sebagai target akhir RPJMD, ditetapkan target kembali pada peringkat 3, namun realisasi yang dicapai berada pada peringkat 17, sehingga tingkat capaian hanya sebesar 18%.

Penurunan peringkat tersebut diakibatkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hanya mengirimkan atlet pada 7 cabang olah raga. Pada cabang olahraga angkat besi, kontingen berhasil menyumbangkan sejumlah medali, termasuk 3 medali emas. Pada cabang olahraga gulat, prestasi diraih melalui perolehan 1 medali perak serta 1 medali perunggu. Sementara itu, cabang olahraga panjat tebing juga berhasil menyumbangkan medali emas, yang turut memperkuat perolehan medali kontingen. Adapun cabang olahraga lainnya seperti renang, judo, bridge, dan pencak silat turut berpartisipasi dalam kompetisi, meskipun belum berhasil meraih medali pada ajang tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator *Peringkat pada Porprov* Tahun 2025 yang belum mencapai target RPJMD, diperlukan langkah strategis yang sistematis dan berkelanjutan guna meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada ajang Porprov berikutnya. Beberapa strategi yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Penguatan Sistem Pembinaan Atlet Secara Berjenjang Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait bersama KONI akan memperkuat sistem pembinaan atlet mulai dari tingkat pelajar, kecamatan, hingga kabupaten. Proses penjangkaran bakat (*talent scouting*) akan dioptimalkan melalui kejuaraan tingkat sekolah dan kecamatan untuk memastikan regenerasi atlet berjalan berkelanjutan.
- b. Penetapan Cabang Olahraga Prioritas Berbasis Potensi Medali Pembinaan akan difokuskan pada cabang olahraga yang memiliki rekam jejak perolehan medali dan potensi emas, seperti angkat besi, panjat tebing, dan gulat. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas

penggunaan anggaran serta memaksimalkan peluang peningkatan peringkat.

- c. **Optimalisasi Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana**
Dilakukan penataan alokasi anggaran yang lebih proporsional terhadap cabang olahraga unggulan, disertai peningkatan kualitas sarana dan prasarana latihan sesuai standar kompetisi. Selain itu, akan diupayakan kemitraan dengan pihak swasta melalui program CSR untuk mendukung pembinaan atlet.
- d. **Penguatan Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Sinergi** antara perangkat daerah, KONI, cabang olahraga, serta pelatih akan diperkuat melalui monitoring dan evaluasi rutin terhadap capaian program pembinaan.

Dengan penerapan strategi tersebut, diharapkan pada periode perencanaan berikutnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat meningkatkan peringkat secara bertahap, dengan target jangka menengah masuk 10 besar Porprov serta jangka panjang mencapai target 3 besar sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.39

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi	Keberangan
			Jumlah	Realisasi Anggaran		
1	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	17%	Rp430.080.000,00	Rp428.164.560,00	0,17	Tidak Efisien

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan tabel tersebut, sasaran meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator hanya sebesar 17%, yang mengindikasikan bahwa pencapaian kinerja pada sasaran ini masih sangat rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Dari sisi penganggaran, pada tahun berjalan dialokasikan anggaran sebesar Rp430.080.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp428.164.560,00, atau

hampir seluruh anggaran yang tersedia telah terserap. Tingkat efisiensi tercatat sebesar 0,17 dengan keterangan tidak efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi anggaran telah terserap cukup tinggi, namun capaian kinerja yang dihasilkan masih belum optimal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran pada program peningkatan prestasi pemuda dan olahraga belum sepenuhnya mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan.

5. Tujuan 5 : Meningkatkan kesetaraan dan Keadilan Gender

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut terdapat 2 indikator pada capaian tujuan yaitu sebagai berikut :

Tabel. III.40

Capaian Tujuan ” Meningkatkan kesetaraan dan Keadilan Gender”

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	Indeks pembangunan Gender (IPG)	persen	94,33	92,43	98%	92,6	98%
2.	Indeks pemberdayaan gendar (IDG)	persen	56,35	58,28	103%	57,81	103%

Sumber data: BPS, 2025

Pada Tahun 2025, capaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dengan target sebesar 94,33 persen, realisasi yang dicapai adalah 92,43 persen, atau sebesar 98% dari target dan dapat dikategorikan kinerja Baik. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 92,6 persen, capaian Tahun 2025 relatif stabil meskipun mengalami sedikit penurunan. Secara keseluruhan, capaian terhadap target akhir RPJMD Tahun 2025 juga tercatat sebesar 98%, yang menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan telah berjalan cukup optimal, meskipun masih diperlukan penguatan program untuk mencapai target secara penuh.

Sementara itu, indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari target sebesar 56,35 persen, realisasi Tahun 2025 mencapai 58,28 persen, atau sebesar 103% dari target yang ditetapkan dan dapat dikategorikan kinerja Sangat Baik. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 57,81 persen, terjadi peningkatan pada Tahun 2025. Capaian ini juga telah melampaui target akhir RPJMD Tahun 2025 dengan persentase 103%, yang mencerminkan semakin meningkatnya peran aktif perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan di daerah.

Secara umum, kinerja pembangunan gender di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif, terutama pada aspek pemberdayaan gender. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 1 sasaran strategis yaitu Meningkatkan pembangunan gender dan perlindungan anak.

1) Sasaran 5.1 strategis Meningkatkan pembangunan gender dan perlindungan anak

Pada sasaran **"Meningkatnya pembangunan gender dan perlindungan anak"** terdapat 1 indikator yaitu sebagai berikut :

Tabel. III.41
Capaian Sasaran Meningkatkan pembangunan gender dan perlindungan anak

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	Kategori Kabupaten Layak Anak	Predikat	KLA	Pertama	20%	Madya	20%

Sumber : Dinas PPKBPPA, 2025

Pada Tahun 2025, indikator Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) ditetapkan dengan target predikat KLA. Namun, realisasi yang dicapai adalah pada kategori Pratama (Pertama) dengan tingkat capaian sebesar 20% terhadap target akhir RPJMD Tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang berada pada kategori Madya, capaian Tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan tingkat predikat. Hal ini mengindikasikan

bahwa pemenuhan indikator dan evaluasi komponen Kabupaten Layak Anak belum sepenuhnya optimal pada tahun berjalan.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.42
perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
			realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	Realisasi	%	target	realisasi	%
1.	Kategori kabupaten layak anak (KLA)	-	N/A	N/A	PRATAMA	50	MADYA	66,67	Madya	66,67	KLA	pertama	20%

Sumber : Dinas PPKBPPA, 2025

Indikator kinerja program Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) menunjukkan perkembangan yang fluktuatif selama periode RPJMD. Pada Tahun 2021, belum terdapat data capaian (N/A) sehingga belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada tahun tersebut. Memasuki Tahun 2022, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berhasil memperoleh predikat Pratama dengan tingkat capaian sebesar 50%. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan awal dalam pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak. Pada Tahun 2023, capaian meningkat menjadi kategori Madya dengan persentase capaian sebesar 66,67%, yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam pemenuhan komponen evaluasi KLA, baik dari aspek kelembagaan, klaster hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan khusus anak. Capaian tersebut dapat dipertahankan pada Tahun 2024 dengan tetap berada pada kategori Madya (66,67%). Namun pada Tahun 2025, dengan target akhir RPJMD berada pada kategori KLA, realisasi yang dicapai kembali berada pada kategori Pratama (pertama) dengan tingkat capaian sebesar 20%. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan capaian dibandingkan dua tahun sebelumnya, sehingga target akhir RPJMD belum dapat tercapai secara optimal. Secara keseluruhan, perkembangan indikator ini menunjukkan bahwa meskipun pernah mengalami peningkatan hingga kategori Madya, keberlanjutan dan konsistensi pemenuhan indikator KLA masih perlu diperkuat.

Apabila diperbandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PPPA No 85 Tahun 2025 tentang Penetapan Peringkat dan Penerima Penghargaan KLA maka Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berada di Tingkat Pratama bersama 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang. Dan dibawah Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ulu serta Kota Lubuk Linggau karena sudah berperingkat Madya.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.43
Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi	Keterangan
			Jumlah	Realisasi Anggaran		
1	Meningkatnya pembangunan gender dan perlindungan anak	20%	Rp577.364.950,00	Rp558.057.751,00	0,21	Tidak Efisien

Sumber : Dinas PPKBPPPA, 2025

Pada sasaran “Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak”, rata-rata capaian indikator kinerja Tahun 2025 tercatat sebesar 20%. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp577.364.950,00, dengan realisasi anggaran mencapai Rp558.057.751,00 atau sekitar 96,65% dari total pagu yang tersedia.

Meskipun tingkat serapan anggaran tergolong tinggi, nilai efisiensi tercatat sebesar 0,21 dan dikategorikan tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya realisasi anggaran belum berbanding lurus dengan capaian kinerja yang dihasilkan, mengingat persentase capaian indikator masih relatif rendah.

6. Tujuan 6 : Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut terdapat 3 indikator pada capaian tujuan yaitu sebagai berikut :

Tabel III.44

Capaian Tujuan ” Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas”

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	Rata-rata waktu tempuh jalan Kabupaten	KM/Jam	45	30	67%	40	67%
2.	Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak	Persen	85,88	88,04	103%	87,15	103%
3.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	74,47	61,93	83%	61,93	83%

Sumber data: Dinas Perhubungan & Dinas PUPR,2025

Berdasarkan tabel capaian indikator tahun 2025, kinerja pada tiga indikator menunjukkan hasil yang bervariasi jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta realisasi pada tahun sebelumnya.

Indikator rata-rata waktu tempuh jalan kabupaten memiliki target sebesar 45 km/jam, namun realisasi pada tahun 2025 mencapai 30 km/jam sehingga tingkat capaian hanya 67% masuk dalam katagori capaian cukup. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar 40 km/jam, terjadi penurunan kinerja pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kelancaran dan kualitas jalan kabupaten masih menghadapi berbagai kendala, seperti kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya optimal, keterbatasan anggaran pemeliharaan, serta peningkatan volume kendaraan pada beberapa ruas jalan utama.

Pada indikator persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak, target tahun 2025 sebesar 85,88% berhasil dilampaui dengan realisasi 88,04%, sehingga capaian kinerja mencapai 103% masuk dalam katagori capaian sangat baik. Realisasi ini juga meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 87,15%. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan akses masyarakat terhadap sumber air minum yang layak, yang didukung oleh pembangunan sarana air bersih, peningkatan layanan air minum, serta program pemerintah daerah dalam memperluas akses sanitasi dan air bersih bagi masyarakat.

Sementara itu, indikator persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik memiliki target sebesar 74,47%, namun realisasi pada tahun 2025 hanya mencapai 61,93%, dengan tingkat capaian 83% masuk dalam katagori capaian cukup. Realisasi ini sama dengan capaian pada tahun 2024, sehingga

menunjukkan bahwa belum terdapat peningkatan signifikan pada kondisi jaringan irigasi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran rehabilitasi jaringan irigasi, kerusakan pada beberapa saluran irigasi, serta faktor alam yang mempengaruhi kondisi infrastruktur irigasi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 6 sasaran strategis, yaitu:

1) 6.1 Sasaran strategis Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas

Pada sasaran " **Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas**" terdapat 5 indikator yaitu sebagai berikut :

Tabel III.45

Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	78,06	38,01	49%	58,73	49%
2.	Persentase rumah layak huni	Persen	78,1	77,46	99%	77,06	99%
3.	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	93,02	88,04	95%	87,15	95%
4.	Rasio Elektrifikasi	Persen	86,2	99,5	115%	99,5	115%
5.	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	65,77	75,36	115%	63,32	115%
Rata-rata Capaian						94,6%	94,6%

Sumber : Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas Kominfo, PLN, 2025

Berdasarkan Tabel Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Tahun 2025, secara umum kinerja menunjukkan hasil yang cukup baik dengan rata-rata capaian sebesar 94,6% terhadap target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada indikator ini masuk dalam katagori baik. sebagian besar indikator dalam sasaran ini telah mencapai bahkan melampaui target, meskipun masih terdapat indikator yang memerlukan perhatian lebih.

Indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik memiliki target sebesar 78,06%, namun realisasi pada tahun 2025 hanya mencapai 38,01%, sehingga tingkat capaian terhadap target sebesar 49%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar 58,73%, terjadi penurunan yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas jaringan jalan kabupaten masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran pemeliharaan dan peningkatan jalan, tingkat kerusakan jalan yang cukup tinggi, serta kondisi geografis wilayah yang mempengaruhi percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan.

Pada indikator persentase rumah layak huni, target yang ditetapkan sebesar 78,1% dengan realisasi 77,46%, sehingga capaian kinerja mencapai 99% atau sangat baik. Realisasi ini sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 77,06%, yang menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas permukiman masyarakat melalui program perbaikan rumah tidak layak huni serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Indikator persentase penduduk berakses air minum memiliki target 93,02%, dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 88,04%, sehingga capaian mencapai 95% masuk kategori capaian baik. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 87,15%, terdapat peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana air bersih serta perluasan layanan air minum kepada masyarakat.

Sementara itu, indikator rasio elektrifikasi menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dengan target 86,2%, realisasi pada tahun 2025 mencapai 99,5%, sehingga capaian kinerja sebesar 115%. Capaian ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan listrik sudah sangat luas dan sebagian besar wilayah telah terjangkau jaringan listrik.

Indikator cakupan layanan telekomunikasi juga menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari target 65,77%, realisasi pada tahun 2025 mencapai 75,36%, sehingga capaian mencapai 115% atau masuk dalam kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 63,32%, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan semakin luasnya akses

masyarakat terhadap layanan telekomunikasi yang didukung oleh pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi dan teknologi informasi.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.46
perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Indikator										
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
			realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	target	realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14%
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	57,59	57,58	99,98	61,89	120,16	64,32	95,9	58,73	81,19	78,06	38,01	49%
2.	Persentase rumah layak huni	77,32	77	99,59	77	100,67	77,1	99,2	77,06	98,91	78,1	77,48	98%
3.	Persentase penduduk berakses air minum	85,13	83,4	97,97	85,01	73,15	86,52	97,7	87,15	96,79	93,02	83,04	95%
4.	Rasio Elektrifikasi	70,98	95	133,84	99,9	134,05	99,5	127,2	99,5	121,18	86,2	99,5	115%
5.	Cakupan layanan telekomunikasi	52,65	52,65	100	52,11	93,62	54,31	92,8	63,32	101,78	65,77	75,36	115%

Sumber : Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas Kominfo, PLN, 2025

Indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada awal periode RPJMD berada pada angka 57,59%. Pada tahun 2021 realisasi mencapai 57,58% atau 99,98% dari target, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 61,89% dengan capaian 120,16%. Pada tahun 2023 realisasi kembali meningkat menjadi 64,32% dengan capaian 95,9%. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi menjadi 58,73% dengan capaian 81,19%, dan pada tahun 2025 realisasi kembali menurun menjadi 38,01% dari target 78,06%, sehingga capaian hanya 49%. Penurunan ini menunjukkan bahwa kondisi jaringan jalan masih menghadapi tantangan yang cukup besar, seperti meningkatnya tingkat kerusakan jalan, keterbatasan anggaran pemeliharaan dan pembangunan jalan, serta kondisi geografis wilayah yang mempengaruhi efektivitas penanganan infrastruktur jalan.

Indikator persentase rumah layak huni pada awal RPJMD tercatat sebesar 77,32%. Pada tahun 2021 realisasi mencapai 77% dengan capaian 99,59%, kemudian pada tahun 2022 tetap berada pada angka 77% dengan

capaian 100,67%. Pada tahun 2023 realisasi meningkat menjadi 77,1% dengan capaian 99,2%, dan pada tahun 2024 mencapai 77,06% dengan capaian 98,91%. Pada tahun 2025 realisasi kembali meningkat menjadi 77,46% dari target 78,1%, dengan capaian 99%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hunian masyarakat berjalan relatif stabil dari tahun ke tahun melalui berbagai program peningkatan kualitas permukiman dan perbaikan rumah tidak layak huni.

Peningkatan persentase rumah layak huni merupakan hasil dari pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh, khususnya pada wilayah permukiman yang berada di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektare. Melalui program tersebut, dilakukan berbagai upaya perbaikan terhadap kondisi fisik rumah masyarakat yang sebelumnya tidak memenuhi standar kelayakan hunian, seperti perbaikan struktur bangunan, atap, lantai, serta fasilitas dasar rumah. Dengan adanya intervensi ini, kualitas hunian masyarakat secara bertahap mengalami peningkatan sehingga dapat menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat, aman, dan layak untuk dihuni.

Gambar III.16

Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)



Sumber : Dinas Perkimtan 2025

Indikator persentase penduduk berakses air minum pada awal periode RPJMD sebesar 85,13%. Pada tahun 2021 realisasi mencapai 83,4% dengan capaian 97,97%, kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 85,01% dengan capaian 73,15%. Pada tahun 2023 realisasi kembali meningkat menjadi 86,92% dengan capaian 97,7%, dan pada tahun 2024 mencapai 87,15% dengan capaian 95,79%. Pada tahun 2025 realisasi meningkat menjadi 88,04% dari target 93,02%, sehingga capaian mencapai 95%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak yang didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana air bersih serta peningkatan layanan air minum.

Indikator rasio elektrifikasi menunjukkan kinerja yang sangat baik selama periode RPJMD. Pada awal RPJMD nilainya sebesar 70,98%, kemudian pada tahun 2021 realisasi mencapai 95% dengan capaian 133,84%. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 99,9% dengan capaian 134,06%, dan pada tahun 2023 serta 2024 stabil pada angka 99,5% dengan capaian masing-masing 127,2% dan 121,18%. Pada tahun 2025 realisasi tetap berada pada angka 99,5% dari target 86,2%, sehingga capaian mencapai 115%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah telah terjangkau layanan listrik.

Sementara itu, indikator cakupan layanan telekomunikasi pada awal RPJMD sebesar 52,65%. Pada tahun 2021 realisasi berada pada angka 52,65% dengan capaian 100%, kemudian pada tahun 2022 sedikit menurun menjadi 52,11% dengan capaian 93,62%. Pada tahun 2023 meningkat menjadi 54,31% dengan capaian 92,8%, dan pada tahun 2024 meningkat cukup signifikan menjadi 63,32% dengan capaian 101,78%. Pada tahun 2025 realisasi kembali meningkat menjadi 75,36% dari target 65,77%, sehingga capaian mencapai 115%.

Luasan cakupan layanan telekomunikasi atau wilayah yang tidak mengalami blankspot pada tahun 2025 tercatat sebesar 1.353,46 km² dari total luas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 5.493,39 km². Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian wilayah kabupaten telah terjangkau layanan jaringan telekomunikasi, meskipun masih terdapat beberapa area yang belum sepenuhnya mendapatkan akses jaringan secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh topologi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang didominasi oleh kawasan perbukitan dan hutan, sehingga menjadi

tantangan dalam pembangunan dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi, terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki akses geografis yang sulit. Meskipun demikian, terdapat satu kecamatan yang telah sepenuhnya terbebas dari blankspot, yaitu Kecamatan Simpang, di mana seluruh wilayahnya telah terjangkau oleh layanan jaringan telekomunikasi. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pengembangan infrastruktur komunikasi di wilayah tersebut, serta menjadi indikator bahwa pemerataan layanan telekomunikasi secara bertahap terus mengalami peningkatan.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.47
Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi	Keberadaan
			Jumlah	Realisasi Anggaran		
1	Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas	95%	Rp57.532.768.109,00	Rp56.082.582.652,00	0,99	Efisien

Sumber : Sumber : Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas Kominfo, PLN, 2025

Berdasarkan tabel efisiensi anggaran pada sasaran meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas, rata-rata capaian indikator kinerja mencapai 95%. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp57.532.768.109,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp56.082.582.652,00. Perbandingan antara anggaran yang dialokasikan dengan realisasi menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 0,99, yang mengindikasikan bahwa pemanfaatan anggaran telah dilakukan secara efisien. Hal ini berarti sebagian besar program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan penggunaan anggaran yang optimal tanpa melebihi pagu yang telah ditetapkan. Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kesejahteraan Petani bersumber dari :

1. Pada Indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik memiliki anggaran Rp53.640.844.619,00 dan terealisasi Rp52.377.743.952,00 dengan capaian 98%.

2. Pada Indikator Persentase rumah layak huni memiliki anggaran Rp538.624.650,00 dan terealisasi Rp538.233.850,00 dengan capaian 99%.
3. Pada Indikator Persentase penduduk berakses air minum memiliki anggaran Rp2.032.965.890,00 dan terealisasi Rp1.912.181.955,00 dengan capaian 99%.
4. Pada Indikator Cakupan layanan telekomunikasi memiliki anggaran Rp1.320.332.950,00 dan terealisasi Rp1.254.422.895,00 dengan capaian 95%.

2) Sasaran 6.2 Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

Pada sasaran " **Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana**" terdapat 1 indikator yaitu sebagai berikut :

Tabel III.48
Capaian Kinerja Sasaran 6.2 Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	Respon Cepat Darurat Bencana	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : BPBD, 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator tahun 2025, indikator Respon Cepat Darurat Bencana memiliki target sebesar 100 persen. Pada tahun 2025 realisasi yang dicapai juga sebesar 100 persen, sehingga tingkat capaian terhadap target mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kejadian bencana yang terjadi dapat ditangani dengan respon cepat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang juga mencapai 100 persen, kinerja pada tahun 2025 menunjukkan konsistensi dalam penanganan darurat bencana. Hal ini mencerminkan bahwa kesiapsiagaan dan kemampuan respons dari perangkat daerah terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), telah berjalan dengan baik melalui koordinasi yang efektif, kesiapan personel, serta dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Dengan capaian tersebut, indikator Respon Cepat Darurat Bencana juga telah memenuhi target akhir RPJMD tahun 2025 sebesar 100 persen,

sehingga menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kecepatan dan ketepatan penanganan kondisi darurat bencana telah terlaksana secara optimal.

Selanjutnya dilakukan juga analisis capaian sasaran Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana per indikator dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.49
Capaian Sasaran Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
Tahun 2021- 2025

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Indikator											
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			
			realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14%	
1.	Respon Cepat Darurat Bencana	42,38	84,69	199,83	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPBD, 2025

Pada kondisi awal RPJMD, indikator respon cepat darurat bencana berada pada angka 42,38 persen. Pada tahun 2021, realisasi meningkat tajam menjadi 84,69 persen dengan tingkat capaian 199,83 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam penanganan kejadian bencana.

Selanjutnya pada tahun 2022, realisasi mencapai 100 persen dengan capaian 100 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh kejadian bencana dapat ditangani dengan respon cepat sesuai standar yang telah ditetapkan. Kinerja tersebut dapat dipertahankan secara konsisten pada tahun 2023 dan tahun 2024, di mana realisasi tetap berada pada angka 100 persen dengan capaian 100 persen.

Pada tahun 2025, indikator ini juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan target 100 persen dan realisasi 100 persen, sehingga capaian tetap 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penanganan darurat bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, khususnya melalui

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), telah berjalan secara optimal dan konsisten.

Secara keseluruhan, perkembangan indikator ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan respon cepat terhadap kejadian bencana terus meningkat dan stabil hingga akhir periode RPJMD. Kondisi ini mencerminkan semakin baiknya koordinasi penanganan bencana, kesiapsiagaan personel, serta dukungan sarana dan prasarana dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Karena keterbatasan data maka indikator ini tidak dapat diperbandingkan, baik dengan tingkat kabupaten/kota sekitar, data provinsi maupun data nasional. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya ketangguhan bencana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.50

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi	Keterangan
			Jumlah	Realisasi Anggaran		
1	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	100%	Rp112.600.000,00	Rp109.359.695,00	1,03	Efisien

Sumber : BPBD, 2025

Berdasarkan tabel efisiensi anggaran pada sasaran meningkatnya ketangguhan terhadap bencana, rata-rata capaian indikator kinerja pada tahun 2025 mencapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp112.600.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp109.359.695,00. Perbandingan antara anggaran yang dialokasikan dengan realisasinya menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 1,03, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan ketangguhan terhadap bencana telah dilaksanakan secara efisien. Capaian ini menunjukkan bahwa dengan penggunaan anggaran yang relatif optimal, pemerintah daerah mampu

melaksanakan berbagai kegiatan penanggulangan bencana secara efektif, termasuk peningkatan kesiapsiagaan, respon cepat terhadap kejadian bencana, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah terkait. Dengan demikian, pengelolaan anggaran pada sasaran ini dapat dikategorikan efisien dan mampu mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.

3) Sasaran 6.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Pada sasaran " **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**" terdapat 3 indikator yaitu sebagai berikut :

Tabel III.51

Capaian Kinerja Sasaran 6.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	Indeks kualitas air	Indeks	53	94	177%	60,56	177%
2.	Indeks kualitas udara	Indeks	93,02	128	138%	92,19	138%
3.	Indeks kualitas lahan	Indeks	50,21	100	199%	42,15	199%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Secara keseluruhan, capaian indikator kualitas lingkungan pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik karena seluruh indikator tidak hanya mencapai target yang ditetapkan, tetapi juga melampauinya. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berjalan dengan baik serta didukung oleh berbagai program pelestarian lingkungan dan pengendalian pencemaran yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Indikator Indeks Kualitas Air memiliki target sebesar 53, dengan realisasi pada tahun 2025 mencapai 94, sehingga tingkat capaian mencapai 177 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar 60,58, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada kualitas air. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian pencemaran air serta pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mulai memberikan hasil yang positif.

Pada indikator Indeks Kualitas Udara, target yang ditetapkan sebesar 93,02, dengan realisasi tahun 2025 mencapai 128, sehingga capaian kinerja

mencapai 138 persen. Realisasi ini juga meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 92,19. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas udara di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berada pada kondisi yang baik, yang dipengaruhi oleh masih terjaganya tutupan vegetasi, rendahnya tingkat polusi industri, serta terbatasnya aktivitas yang menghasilkan emisi pencemar udara.

Sementara itu, indikator Indeks Kualitas Lahan memiliki target sebesar 50,21, dengan realisasi tahun 2025 mencapai 100, sehingga capaian mencapai 199 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar 42,15, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan lahan dan lingkungan, termasuk melalui kegiatan rehabilitasi lahan, konservasi sumber daya alam, serta pengendalian kerusakan lingkungan.

Apabila diperbandingkan dari tahun ke tahun capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

Tabel III.52
Capaian Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Tahun 2021- 2025

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Indikator										
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
			realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	target	realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14%
1.	Indeks kualitas air	52,6	65,56	124,54	61,85	117,36	55,44	105	50,55	94,00	53	94	177%
2.	Indeks kualitas udara	92,02	89	96,09	90,99	96,03	91,29	96,3	92,19	120,09	93,02	120	130%
3.	Indeks kualitas lahan	41,85	40,27	96,22	40,27	91,65	41,01	89,1	42,15	100,00	50,21	100	199%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada sektor kualitas lingkungan hidup selama periode 2021–2025, terlihat bahwa kinerja pengelolaan lingkungan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan kecenderungan peningkatan pada beberapa indikator.

Indikator Indeks Kualitas Air pada kondisi awal RPJMD tercatat sebesar 52,6. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 65,56 dengan capaian 124,64 persen. Pada tahun 2022, realisasi sedikit menurun menjadi 61,85,

namun capaian masih cukup baik yaitu 117,36 persen. Pada tahun 2023, realisasi tercatat 55,44 dengan capaian 105 persen, dan pada tahun 2024 sebesar 60,56 dengan capaian 94 persen. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 53, dengan realisasi mencapai 94, sehingga capaian meningkat signifikan menjadi 177 persen. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan kualitas air serta upaya pengendalian pencemaran yang semakin efektif.

Indikator Indeks Kualitas Udara pada kondisi awal RPJMD sebesar 92,62. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 89 dengan capaian 96,09 persen, kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 90,89 dengan capaian 98,03 persen. Pada tahun 2023, realisasi kembali meningkat menjadi 91,25 dengan capaian 98,3 persen, dan pada tahun 2024 mencapai 92,19 dengan capaian 128 persen. Pada tahun 2025, dengan target 93,02, realisasi meningkat menjadi 128 sehingga capaian mencapai 138 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berada dalam kondisi baik yang didukung oleh masih luasnya kawasan hutan dan relatif rendahnya tingkat pencemaran udara.

Sementara itu, indikator Indeks Kualitas Lahan pada kondisi awal RPJMD tercatat sebesar 41,85. Pada tahun 2021, realisasi sebesar 40,27 dengan capaian 96,22 persen. Pada tahun 2022, realisasi masih berada pada angka 40,27 dengan capaian 91,65 persen, kemudian pada tahun 2023 sedikit meningkat menjadi 41,01 dengan capaian 89,1 persen. Pada tahun 2024, realisasi mencapai 42,15 dengan capaian 100 persen. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 50,21, dengan realisasi mencapai 100, sehingga capaian meningkat sangat signifikan menjadi 199 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan kualitas lahan melalui berbagai upaya rehabilitasi lahan, konservasi lingkungan, serta pengendalian kerusakan lahan.

Secara keseluruhan, perkembangan indikator kualitas lingkungan hidup selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2025 seluruh indikator tidak hanya mencapai target yang telah ditetapkan, tetapi juga melampaui target akhir RPJMD. Hal ini mencerminkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup melalui

berbagai program pengelolaan lingkungan dan konservasi sumber daya alam telah berjalan dengan baik.

Karena keterbatasan data maka indikator ini tidak dapat diperbandingkan, baik dengan tingkat kabupaten/kota sekitar, data provinsi maupun data nasional. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.53
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi	Keterangan
			Jumlah	Realisasi Anggaran		
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	171%	Rp79.832.000,00	Rp78.165.200,00	1,74	Efisien

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Berdasarkan tabel efisiensi anggaran pada sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup, rata-rata capaian indikator pada tahun 2025 mencapai 171 persen, yang menunjukkan bahwa kinerja pada sasaran ini tidak hanya mencapai target yang telah ditetapkan, tetapi juga melampaui target secara signifikan. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp79.832.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp78.165.200,00. Perbandingan antara jumlah anggaran yang dialokasikan dengan realisasi anggaran menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 1,74, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup telah dilaksanakan secara efisien.

Tingginya capaian kinerja dengan tingkat pemanfaatan anggaran yang optimal menunjukkan bahwa berbagai program pengelolaan lingkungan hidup, seperti pengendalian pencemaran lingkungan, pemantauan kualitas lingkungan, serta upaya pelestarian sumber daya alam, telah berjalan dengan baik.

4) Sasaran 6.4 Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

Pada sasaran " **Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa** " terdapat 1 indikator yaitu sebagai berikut :

Tabel III.54
Capaian Kinerja Sasaran 6.4 Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	Persentase desa tertinggal dan desa sangat tertinggal	Persen	57,38	0,02	>100%	9,53	>100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa., 2025

Indikator persentase desa tertinggal pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 57,38 persen, sedangkan realisasi yang dicapai hanya 2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah desa tertinggal berhasil ditekan jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan. Dengan menggunakan metode perhitungan indikator yang bersifat menurun (semakin kecil semakin baik), maka capaian kinerja indikator ini mencapai 2.869 persen, yang menunjukkan kinerja sangat baik dalam upaya percepatan pengentasan desa tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah desa yang masih berstatus tertinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah berhasil ditekan secara signifikan, jauh lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Jika dihitung menggunakan metode indikator dengan arah capaian semakin kecil semakin baik, maka capaian kinerja indikator ini berada jauh di atas target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan desa, peningkatan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah memberikan dampak positif dalam upaya percepatan pengentasan desa tertinggal. Dengan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam mengurangi jumlah desa tertinggal telah berjalan dengan sangat baik.

Apabila diperbandingkan dari tahun ke tahun capaian sasaran strategis Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa adalah sebagai berikut :

Tabel III.55
Capaian Sasaran Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021- 2025

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Indikator										
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
			realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	target	realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14%
1.	Persentase desa tertinggal dan desa sangat tertinggal	60,35	60,35	100	32,49	183,41	13,09	447,5	9,53	>100%	57,38	0,02	>100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa., 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program persentase desa tertinggal dan desa sangat tertinggal selama periode 2021–2025, terlihat bahwa kinerja pemerintah daerah dalam menurunkan jumlah desa tertinggal menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan.

Pada kondisi awal RPJMD, persentase desa tertinggal dan desa sangat tertinggal berada pada angka 60,35 persen. Pada tahun 2021, realisasi masih berada pada angka yang sama yaitu 60,35 persen dengan capaian 100 persen. Selanjutnya pada tahun 2022, persentase desa tertinggal berhasil diturunkan menjadi 32,49 persen dengan capaian 183,41 persen, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi pembangunan desa.

Pada tahun 2023, realisasi kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 13,09 persen dengan capaian 447,5 persen, yang menunjukkan percepatan dalam upaya pengentasan desa tertinggal. Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2024, di mana persentase desa tertinggal berhasil ditekan menjadi 9,53 persen dengan capaian lebih dari 100 persen.

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 57,38 persen, sedangkan realisasi yang dicapai hanya 0,02 persen, sehingga capaian indikator ini lebih dari 100 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah berhasil ditekan secara signifikan hingga hampir tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal.

Secara keseluruhan, perkembangan indikator ini menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan desa, peningkatan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi desa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan status desa. Pencapaian kinerja dengan indikator sasaran sisa jumlah desa tertinggal pada tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga berhasil menekan hingga 6 desa dari target yang ditetapkan dengan capaian diatas 100% untuk jumlah desa tertinggal di Kabupaten OKU Selatan. Keberhasilan ini didukung oleh program pemerintah kabupaten melalui dinas terkait yang telah menggerakkan segenap daya dan upaya guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur didesa melalui program nyata merupakan penyuluhan, bimbingan dan pendampingan kepada masyarakat dan aparatur pemerintah desa. Namun, terdapat kendala yang dihadapi salah satunya sulit nya akses transportasi kedesa- desa yang di tuju seperti diketahui bahwa sebagian besar topografi desa-desa yang masuk kategori sangat tertinggal di kabupaten ogan komering ulu selatan berupa dataran tinggi/ berbukit dan lembah yang cukup curam. Kedepan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan akan lebih optimal dalam meningkatkan, memberdayakan masyarakat dipedesaan dengan meningkatkan intensitas jumlah penyuluhan, pendampingan, sosialisasi disertai dengan peningkatan alokasi anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.56

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi	Keterangan
			Jumlah	Realisasi Anggaran		
1	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	100%	Rp. 961.999.500	Rp. 958.987.100	1,00	Efisien

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2025

Berdasarkan tabel efisiensi anggaran pada sasaran meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, rata-rata capaian indikator pada tahun 2025 mencapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp961.999.500, dengan realisasi anggaran sebesar Rp958.987.100. Perbandingan antara anggaran yang dialokasikan dengan realisasi anggaran menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 1,00, yang mengindikasikan bahwa pemanfaatan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan secara efisien. Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

5) Sasaran 6.5 Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW

Pada sasaran Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW terdapat 1 indikator yaitu sebagai berikut :

Tabel III.57

Capaian Kinerja Sasaran 6.5 Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Persen	66	36,3	55%	36,3	55%

Sumber : Dinas PUPR, 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator tahun 2025, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ditargetkan sebesar 66 persen. Pada tahun 2025 realisasi yang dicapai sebesar 36,3 persen, sehingga tingkat capaian terhadap target mencapai 55 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang juga sebesar 36,3 persen, maka pada tahun 2025 tidak terdapat peningkatan nilai rasio ruang terbuka hijau. Kondisi ini menunjukkan bahwa luas ruang terbuka hijau yang tersedia di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih relatif tetap dan belum mengalami penambahan yang signifikan.

Apabila diperbandingkan dari tahun ke tahun capaian sasaran strategis Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW adalah sebagai berikut :

Tabel III.58
Capaian Sasaran Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW Tahun 2021- 2025

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian indikator										
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
			realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	target	realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14%
1.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	50,72	36,3	71,57	36,33	67,28	36,3	62,6	36,3	58,55	66	36,3	55%

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah selama periode 2021–2025, terlihat bahwa kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan relatif stabil, namun masih belum mencapai target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD.

Pada kondisi awal RPJMD, rasio ruang terbuka hijau tercatat sebesar 50,72 persen. Pada tahun 2021, realisasi sebesar 36,3 persen dengan capaian 71,57 persen. Pada tahun 2022, realisasi sedikit meningkat menjadi 36,33 persen dengan capaian 67,28 persen. Selanjutnya pada tahun 2023, realisasi kembali berada pada angka 36,3 persen dengan capaian 62,6 persen. Pada tahun 2024, realisasi rasio ruang terbuka hijau masih berada pada angka 36,3 persen dengan capaian 58,55 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa luas ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir.

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya nilai IKTL di Kabupaten OKU Selatan diakibatkan tingginya tingkat alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian, kurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola dengan baik, kurangnya vegetasi di sempadan sungai dan median jalan dan maraknya penebangan pohon.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.59
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi	Keterangan
			Jumlah	Realisasi Anggaran		
1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	55%	Rp57.001.100,00	Rp48.155.899,00	0,65	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel efisiensi anggaran pada sasaran rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah, rata-rata capaian indikator pada tahun 2025 mencapai 55 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja dalam peningkatan rasio ruang terbuka hijau masih belum optimal dan masih berada di bawah target yang direncanakan. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp57.000.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp48.155.899,00. Perbandingan antara anggaran yang dialokasikan dengan realisasi anggaran menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 0,65, sehingga dikategorikan tidak efisien.

7. Tujuan 7 : Meningkatkan investasi yang kondusif

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut terdapat 1 indikator pada capaian tujuan yaitu sebagai berikut :

Tabel III.60
Capaian Tujuan ” Meningkatkan investasi yang kondusif”

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	Nilai Investasi	Rp	4,5 triliun	1,276 T	28%	1,71T	28%

Sumber : Dinas PMPTSP, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel Capaian Tujuan “Meningkatkan investasi yang kondusif”, pada tahun 2025 indikator yang digunakan adalah Nilai Investasi

dengan satuan rupiah. Target nilai investasi yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar Rp4,5 triliun, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar Rp1,276 triliun, sehingga tingkat capaian terhadap target sebesar 28 persen atau masuk dalam capaian kinerja kurang. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp1,71 triliun, maka pada tahun 2025 terjadi penurunan nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Penurunan ini menunjukkan bahwa iklim investasi pada tahun 2025 belum sepenuhnya mampu mencapai target yang telah direncanakan dalam RPJMD.

Belum optimalnya capaian indikator ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi perekonomian yang belum stabil, keterbatasan infrastruktur pendukung investasi, serta masih terbatasnya minat investor untuk menanamkan modal di daerah. Selain itu, faktor regulasi, aksesibilitas wilayah, serta kesiapan kawasan investasi juga dapat mempengaruhi realisasi nilai investasi yang masuk.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 3 sasaran strategis, yaitu meningkatnya investasi, Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1) sasaran 7.1 Meningkatnya Investasi

Pada sasaran **Meningkatnya Invesatasi** terdapat 1 indikator yaitu sebagai berikut :

Tabel III.61

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Invesatasi

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	22	25	114%	42	114%

Sumber : Dinas PMPTSP, Tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator tahun 2025, jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) ditargetkan sebanyak 22 perusahaan. Pada tahun 2025 realisasi yang dicapai sebanyak 25 perusahaan, sehingga tingkat capaian terhadap target mencapai 114 persen atau capaian kinerja sangat baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa jumlah investor yang menanamkan modal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan minat investor untuk berinvestasi di daerah, yang didukung oleh berbagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, seperti penyederhanaan proses perizinan, peningkatan pelayanan investasi, serta promosi potensi daerah kepada calon investor.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai 42 perusahaan, jumlah investor pada tahun 2025 mengalami penurunan. Meskipun demikian, capaian terhadap target tetap berada pada kategori baik karena masih mampu melampaui target yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Dengan capaian tersebut, indikator jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2025 juga telah melampaui target akhir RPJMD, sehingga menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi dan menarik minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah berjalan dengan baik.

Telah dianalisis juga capaian kinerja indikator jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) pada 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2021-2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.62
capaian indikator kinerja jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) selama periode 2021–2025

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Indikator										
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
			realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	target	realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14%
1.	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	11	30	272,7	29	207,14	39	243,75	42	233,30	22	25	114%

Sumber : Dinas PMPTSP, Tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) selama periode 2021–2025, terlihat bahwa kinerja pemerintah daerah dalam menarik minat investor menunjukkan

capaian yang cukup baik meskipun mengalami fluktuasi pada beberapa tahun terakhir.

Pada kondisi awal RPJMD, jumlah investor berskala nasional tercatat sebanyak 11 perusahaan. Pada tahun 2021, realisasi meningkat signifikan menjadi 30 perusahaan dengan capaian 272,7 persen. Pada tahun 2022, realisasi sedikit menurun menjadi 29 perusahaan, namun capaian masih tinggi yaitu 207,14 persen. Selanjutnya pada tahun 2023, jumlah investor kembali meningkat menjadi 39 perusahaan dengan capaian 243,75 persen.

Pada tahun 2024, realisasi kembali meningkat menjadi 42 perusahaan dengan capaian 233,30 persen, yang menunjukkan adanya peningkatan minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sementara itu pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebanyak 22 perusahaan, dengan realisasi 25 perusahaan, sehingga capaian mencapai 114 persen. Meskipun realisasi tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, capaian terhadap target tetap melampaui target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, indikator ini menunjukkan kinerja yang berhasil karena sepanjang periode RPJMD jumlah investor yang masuk secara konsisten mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya upaya pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, peningkatan kualitas pelayanan perizinan melalui sistem perizinan berbasis elektronik, serta adanya promosi potensi daerah kepada calon investor. Selain itu, keberadaan potensi sumber daya alam, sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan juga menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modal. Dukungan pemerintah daerah melalui penyederhanaan proses perizinan, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, serta upaya peningkatan infrastruktur pendukung investasi turut berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah investor yang berinvestasi di daerah tersebut.

Karena keterbatasan data yang dimiliki maka data jumlah investor tidak dapat diperbandingkan dengan data kabupaten lain, provinsi maupun nasional. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatkan investasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.63

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya investasi

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi	Keterangan
			Jumlah	Realisasi Anggaran		
1	Meningkatnya investasi	114%	Rp14.812.000,00	Rp14.812.000,00	1,14	Efisien

Sumber : Dinas PMPTSP, Tahun 2025

Berdasarkan tabel efisiensi anggaran pada sasaran meningkatnya investasi, rata-rata capaian indikator pada tahun 2025 mencapai 114 persen, yang menunjukkan bahwa kinerja pada sasaran ini telah melampaui target yang ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp14.812.000,00, dengan realisasi anggaran yang sama yaitu Rp14.812.000,00. Dengan demikian, tingkat penyerapan anggaran mencapai 100 persen dari total anggaran yang tersedia. Perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 1,14, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran ini dapat dikategorikan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran yang tersedia mampu mendukung pencapaian kinerja yang optimal dalam upaya meningkatkan investasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Capaian tersebut mencerminkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah, seperti peningkatan pelayanan perizinan, promosi potensi daerah, serta penguatan koordinasi dalam pengembangan investasi, telah berjalan dengan baik sehingga mampu menarik minat investor untuk menanamkan modal di daerah.

2) sasaran 7.2 Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja

Pada sasaran **Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja** terdapat 1 indikator yaitu sebagai berikut :

Tabel III.64

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	2,09	1,92	109%	1,81	109%

Sumber : Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja, Tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan sebesar 2,09 persen. Pada tahun 2025 realisasi yang dicapai sebesar 1,92 persen, sehingga tingkat capaian terhadap target mencapai 109 persen dengan capaian kinerja sanfat baik. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar 1,81 persen, maka pada tahun 2025 terjadi sedikit peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Meskipun demikian, capaian indikator ini tetap berada di atas target yang telah ditetapkan, sehingga kinerja dalam pengendalian tingkat pengangguran masih tergolong baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan relatif stabil. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesempatan kerja, seperti pengembangan sektor ekonomi produktif, peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan kerja, serta dukungan terhadap kegiatan usaha masyarakat, turut berkontribusi dalam menjaga tingkat pengangguran tetap berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Telah dianalisis juga capaian kinerja indikator Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2021-2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.65

capaian indikator kinerja Tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama periode 2021–2025

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Indikator										
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
			realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	target	realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14%
1.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	2,29	2,29	100	1,92	123,00	1,81	82,65	1,8	115,16	2,09	1,92	1,09

Sumber : Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja, Tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode 2021–2025, terlihat bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menunjukkan perkembangan yang relatif stabil dengan kecenderungan tingkat pengangguran yang tetap terkendali.

Pada kondisi awal RPJMD, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 2,29 persen. Pada tahun 2021, realisasi berada pada angka yang sama yaitu 2,29 persen dengan capaian 100 persen. Selanjutnya pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan menjadi 1,82 persen dengan capaian 123,08 persen, yang menunjukkan adanya peningkatan kesempatan kerja di masyarakat.

Pada tahun 2023, realisasi kembali menurun menjadi 1,81 persen dengan capaian 82,65 persen. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2024, di mana tingkat pengangguran terbuka mencapai 1,8 persen dengan capaian 115,16 persen, yang menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang semakin membaik.

Sementara itu pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 2,09 persen, dengan realisasi 1,92 persen, sehingga capaian indikator mencapai 109 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka masih berada di bawah target yang telah ditetapkan, sehingga kinerja pengendalian pengangguran dapat dikategorikan baik.

Secara keseluruhan, perkembangan indikator ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama periode RPJMD cenderung berada pada tingkat yang relatif rendah dan terkendali. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan sektor ekonomi produktif, serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui berbagai program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.

Jika diperbandingkan dengan nilai tingkat pengangguran terbuka antara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dianalisis sebagai berikut :

Gambar III.17

Nilai tingkat pengangguran terbuka antara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Badan Pusat Statistik, tahun 2025

Nilai tersebut tergolong relatif rendah dibandingkan dengan sebagian besar kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa daerah bahkan memiliki tingkat pengangguran yang jauh lebih tinggi, seperti Kota Palembang sebesar 6,81 persen, Kota Lubuklinggau sebesar 5,01 persen, Musi Rawas Utara sebesar 4,78 persen, dan Kota Prabumulih sebesar 4,72 persen. Sementara itu, beberapa daerah lain seperti Muara Enim (4,13 persen) dan Ogan Komering Ulu (3,85 persen) juga memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa daerah yang memiliki tingkat pengangguran lebih rendah, seperti Musi Rawas sebesar 1,74 persen dan Musi Banyuasin sebesar 2,04 persen, serta Kota Pagar Alam sebesar 2,19 persen yang relatif mendekati nilai Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Secara umum, posisi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berada pada kelompok daerah dengan tingkat pengangguran terbuka yang rendah di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut relatif baik, yang dapat dipengaruhi oleh

aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, serta usaha mikro dan kecil yang mampu menyerap tenaga kerja lokal. Kondisi ini juga mencerminkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mendorong kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap pengendalian tingkat pengangguran.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya investasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.66
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi	Keterangan
			Jumlah	Realisasi Anggaran		
1	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	109%	Rp161.033.600,00	Rp160.121.428,00	1,10	Efisien

Sumber : Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja, Tahun 2025

Berdasarkan tabel efisiensi anggaran pada sasaran tingkat pengangguran terbuka (TPT), rata-rata capaian indikator pada tahun 2025 mencapai 109 persen, yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam pengendalian tingkat pengangguran telah melampaui target yang ditetapkan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp161.033.600,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp160.121.428,00. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran sangat tinggi dan hampir seluruh anggaran yang dialokasikan telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terkait ketenagakerjaan. Perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,10, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran ini dapat dikategorikan efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran yang tersedia mampu mendukung pencapaian kinerja secara optimal dalam upaya menekan tingkat pengangguran di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

3) Sasaran 7.3 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban

Pada sasaran **Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban** terdapat 2 indikator yaitu sebagai berikut :

Tabel III.67

capaian kinerja sasaran Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban

No	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2025)
				Realisasi	Capaian		
1	Angka kriminalitas	Persen	0,19	0,038	>100%	0,038	>100%
2	Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD	Jumlah	0	0	100%	0	100%
Rata-rata Capaian					100%		100%

Sumber : SatpolPP dan Badan Kesbangpol, 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator tahun 2025, terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pada aspek ketentraman dan ketertiban masyarakat, yaitu angka kriminalitas dan jumlah konflik IPOLEKSOSBUD.

Indikator angka kriminalitas memiliki target sebesar 0,19 persen, sedangkan realisasi pada tahun 2025 sebesar 0,038 persen, sehingga capaian indikator ini lebih dari 100 persen dengan capaian sangat baik. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang juga sebesar 0,038 persen, kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tetap berada pada tingkat yang rendah dan stabil.

Sementara itu, indikator jumlah konflik IPOLEKSOSBUD memiliki target 0 kejadian, dan realisasi pada tahun 2025 juga 0 kejadian, sehingga capaian indikator ini mencapai 100 persen dengan capaian sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2025 tidak terjadi konflik yang berkaitan dengan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator pada sasaran ini mencapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berada dalam kondisi yang baik dan kondusif. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah bersama aparat keamanan serta masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Telah dianalisis juga perkembangan capaian angka kriminalitas dan IPOLEKSOSBUD 5 tahun terakhir dari tahun 2021-2025, yang secara terinci dijelaskan sebagai berikut :

Tabel III.68
Capaian angka kriminalitas dan IPOLEKSOSBUD 5 tahun terakhir dari Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Indikator										
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
			realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	realisasi	%	target	realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14%
1.	Angka kriminalitas	0,37	0,036	97	0,041	141,3	0,038	>100%	0,038	>100%	0,19	0,038	>100%
2.	Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD	5	3	60	3	133,33	1	80	0	100,00	0	0	100%

Sumber : SatpolPP dan Badan Kesbangpol, 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada aspek ketentraman dan ketertiban masyarakat selama periode 2021–2025, terlihat bahwa kondisi keamanan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan tingkat kriminalitas yang relatif rendah serta tidak adanya konflik sosial yang signifikan.

Indikator angka kriminalitas pada kondisi awal RPJMD tercatat sebesar 0,37 persen. Pada tahun 2021, realisasi sebesar 0,036 persen dengan capaian 97 persen. Selanjutnya pada tahun 2022, realisasi sedikit meningkat menjadi 0,041 persen dengan capaian 141,3 persen. Pada tahun 2023, angka kriminalitas kembali menurun menjadi 0,038 persen dengan capaian lebih dari 100 persen, dan kondisi tersebut tetap stabil pada tahun 2024 dengan realisasi yang sama yaitu 0,038 persen dan capaian lebih dari 100 persen sehingga dapat dikatakan capaian kinerja indikator ini sangat baik.

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 0,19 persen, dengan realisasi 0,038 persen, sehingga capaian indikator ini kembali lebih dari 100 persen sehingga dapat dikatakan capaian kinerja indikator ini sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih berada jauh di bawah target yang telah ditetapkan, sehingga kondisi keamanan masyarakat dapat dikategorikan baik dan terkendali. Sementara itu, indikator jumlah konflik IPOLEKSOSBUD

pada kondisi awal RPJMD tercatat sebanyak 5 kejadian. Pada tahun 2021, realisasi menurun menjadi 3 kejadian dengan capaian 60 persen, kemudian pada tahun 2022 tetap berada pada angka 3 kejadian dengan capaian 133,33 persen. Pada tahun 2023, jumlah konflik kembali menurun menjadi 1 kejadian dengan capaian 80 persen, dan pada tahun 2024 berhasil ditekan hingga 0 kejadian dengan capaian 100 persen. Kondisi tersebut dapat dipertahankan pada tahun 2025, di mana target yang ditetapkan 0 kejadian dan realisasi juga 0 kejadian, sehingga capaian indikator mencapai 100 persen.

Secara keseluruhan, perkembangan kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan relatif aman dan kondusif. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah, aparat keamanan, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan mencegah potensi konflik sosial di wilayah tersebut.

Pada indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan data kabupaten/kota sekitar maupun provinsi karena keterbatasan data pembandingan yang tersedia.

Telah dianalisis Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.69
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi	Keterangan
			Jumlah	Realisasi Anggaran		
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	100%	Rp3.204.505.432,00	Rp3.194.989.780,00	1,00	Efisien

Sumber : SatpolPP dan Badan Kesbangpol, 2025

Berdasarkan tabel efisiensi anggaran pada sasaran meningkatnya keamanan dan ketertiban, rata-rata capaian indikator pada tahun 2025 mencapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran ini dapat tercapai secara optimal.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp3.204.505.432,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.194.989.780,00. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 1,00, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran ini dapat dikategorikan efisien.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran yang tersedia mampu mendukung pencapaian kinerja secara optimal dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Capaian tersebut juga mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah bersama aparat keamanan serta masyarakat dalam menjaga kondisi wilayah yang aman dan kondusif, sehingga dapat mendukung kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, serta pembangunan daerah secara berkelanjutan.



PENUTUP

**BAB
IV**



**ABUSAMA, SH
BUPATI OKU SELATAN**



**H. MISNADI
WAKIL BUPATI OKU SELATAN**

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sub sistem dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu suatu instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai bahan pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan kinerja, LKjIP Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025 memuat informasi kinerja mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Tahun 2025 secara keseluruhan berhasil. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 20 Sasaran yang masuk dalam 7 Tujuan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel IV.1
Presentase Capaian Kinerja, Anggaran dan Tingkat Efisiensi Per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Rata-Rata Capaian	Katagori Capaian	Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Meningkatkan Perekonomian Dan Pengurangan Kemiskinan					
1.1	Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi	16%	Kurang	99%	Tidak Efisien
1.2	Meningkatnya kesejahteraan petani	102%	Sangat Baik	99%	Efisien

No	Sasaran Strategis	Rata-Rata Capaian	Katagori Capaian	Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.3	Meningkatnya Peran Industri dan Perdagangan	115%	Sangat Baik	99%	Efisien
1.4	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	75%	Baik	98%	Tidak Efisien
1.5	Meningkatnya Ketahanan Pangan	105%	Sangat Baik	97%	Efisien
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan					
2.1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas	88%	Baik	87%	Efisien
2.2	Meningkatnya Pelayanan Publik	93%	Baik	99%	Efisien
2.3	Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah	92%	Baik	98%	Tidak Efisien
3. Meningkatkan Akses Pendidikan Berkualitas					
3.1	Meningkatnta akses pendidikan berkualitas	91%	Baik	60%	Efisien
4. Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat					
4.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	73%	Cukup	93%	Tidak Efisien
4.2	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	17%	Kurang	93%	Tidak Efisien
5. Meningkatkan kesetaraan dan Keadilan Gender					
5.1	Meningkatnya pembangunan gender dan perlindungan anak	20%	Kurang	98%	Tidak Efisien
6. Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas					
6.1	Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas	95%	Baik	95%	Efisien
6.2	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	100%	Baik	97%	Efisien
6.3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	171%	Sangat Baik	98%	Efisien
6.4	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	>100%	Sangat Baik	100%	Efisien
6.5	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	55%	Cukup	85%	Tidak Efisien
7. Meningkatkan investasi yang kondusif					
7.1	Meningkatnya Investasi	114%	Sangat Baik	100%	Efisien
7.2	Meningktanya Kualitas Tenaga Kerja	109%	Sangat Baik	99%	Efisien
7.3	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	>100%	Sangat Baik	100%	Efisien

Sumber :

Secara umum, kinerja pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menunjukkan hasil yang positif, karena sebagian besar sasaran strategis berada pada kategori Sangat Baik dan Baik, yaitu sebanyak 15 sasaran atau sekitar 75% dari total sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat 2 sasaran dengan kategori Cukup dan 3 sasaran dengan kategori Kurang yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2025 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 85% dengan katagori Baik.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Permasalahan teknis yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diantaranya :

1. Dalam pencapaian di beberapa sasaran masih jumpai adanya kendala baik berupa keterbatasan sumber daya yang ada, baik sumber daya aparatur, alokasi anggaran maupun sarana dan prasarana.
2. Permasalahan yang terkait dengan faktor eksternal seperti perubahan regulasi dari pemerintah pusat, dan faktor iklim dan cuaca serta kondisi geopolitik yang turut mempengaruhi pencapaian sasaran strategis.

Solusi pemecahan masalah yang diharapkan dapat memberikan perbaikan-perbaikan kinerja ke depan adalah:

1. Melakukan terobosan-terobosan dalam rangka menyediakan sumber daya yang memadai, seperti mengupayakan bantuan alokasi dana dari pemerintah pusat, ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan lain-lain.
2. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan, seperti misalnya dengan menyelenggarakan forum Perangkat Daerah.

Pada akhir laporan ini diharapkan agar laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025 ini di samping sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, agar dapat pula dimanfaatkan pula untuk :

- a. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- b. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan

c. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025 disusun, dengan harapan informasi yang tersaji dapat meningkatkan kinerja yang telah baik dan memperbaiki kinerja yang belum optimal dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Muaradua, 2026

Bupati Ogan Komering Ulu Selatan,



Abusama